SALINAN

BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023-2043

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LEBAK,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2023-2043;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725), sebagaimana telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-

Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin dan/atau Hak Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
15. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi dan Penerbitan Persetujuan Substansi

Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);

16. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 330);
17. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Basis Data dan Penyajian Peta Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, dan Kota serta Peta Rencana Detail Tata Ruang Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 326);
18. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 15 Tahun 2021 tentang Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 327);
19. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Pengawasan Penataan Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1484);
20. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Banten Nomor 102);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LEBAK

dan

BUPATI LEBAK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023-2043

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Provinsi adalah Provinsi Banten.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Lebak.
4. Daerah adalah Kabupaten Lebak.
5. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
6. Bupati adalah Bupati Lebak.
7. Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
8. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
9. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
10. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

11. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budi daya.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaataan ruang.
13. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan ruang.
14. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
15. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
16. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan polar uang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
17. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.
18. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil Perencanaan Tata Ruang.
19. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan Tata Ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
20. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang wilayah Daerah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi Daerah.

21. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
22. Pusat Kegiatan Wilayah yang selanjutnya disingkat PKW adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala provinsi atau beberapa kabupaten.
23. Pusat Kegiatan Lokal yang selanjutnya disingkat PKL adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Daerah atau beberapa Kecamatan.
24. Pusat Pelayanan Kawasan yang selanjutnya disingkat PPK adalah kawasan perkotaan yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala Kecamatan atau beberapa desa.
25. Pusat Pelayanan Lingkungan yang selanjutnya disingkat PPL adalah pusat permukiman yang berfungsi untuk melayani kegiatan skala antar desa.
26. Jalan Arteri Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antar pusat kegiatan nasional atau antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan wilayah.
27. Jalan Kolektor Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna antara pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lokal, antar pusat kegiatan wilayah, atau antara pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lokal.
28. Jalan Lokal Primer adalah jalan yang menghubungkan secara berdaya guna pusat kegiatan nasional dengan pusat kegiatan lingkungan, pusat kegiatan wilayah dengan pusat kegiatan lingkungan, antarpusat kegiatan lokal, atau pusat kegiatan lokal dengan pusat kegiatan lingkungan, serta antarpusat kegiatan lingkungan.
29. Jalan Lokal Sekunder adalah jalan yang menghubungkan kawasan sekunder kesatu dengan perumahan, kawasan

sekunder kedua dengan perumahan, kawasan sekunder ketiga dan seterusnya sampai ke perumahan.

30. Jalan Lingkungan Primer adalah jalan yang menghubungkan antarpusat kegiatan di dalam kawasan perdesaan dan jalan di dalam lingkungan Kawasan perdesaan.
31. Jalan Tol adalah jalan umum yang merupakan bagian sistem jaringan jalan dan sebagai jalan nasional yang penggunanya diwajibkan membayar tol.
32. Terminal Penumpang Tipe A adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota antarprovinsi (AKAP), angkutan lintas batas antar negara, angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), antarkota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
33. Terminal Penumpang Tipe B adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk angkutan antarkota dalam provinsi (AKDP), antarkota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
34. Terminal Penumpang Tipe C adalah terminal penumpang yang berfungsi melayani kendaraan penumpang umum untuk antarkota (AK), serta angkutan perdesaan (ADES).
35. Terminal Barang adalah Tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang.
36. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota adalah jalur kereta api antarkota yang melintasi wilayah kabupaten/kota untuk melayani perpindahan orang dan/atau barang.
37. Stasiun Penumpang adalah tempat perhentian kereta api untuk keperluan naik turun penumpang.
38. Pelabuhan Pengumpan Lokal adalah pelabuhan yang fungsi pokoknya melayani kegiatan angkutan laut dalam negeri, alih muat angkutan laut dalam negeri dalam

jumlah terbatas, merupakan pengumpan bagi Pelabuhan Utama dan Pelabuhan Pengumpul, dan sebagai tempat asal tujuan penumpang dan/atau barang, serta angkutan penyeberangan dengan jangkauan pelayanan dalam kabupaten/kota.

39. Terminal Khusus adalah terminal yang terletak di luar daerah lingkungan kerja dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan yang merupakan bagian dari pelabuhan terdekat untuk melayani kepentingan sendiri sesuai dengan usaha pokoknya.
40. Pelabuhan Perikanan Pantai adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas C.
41. Pangkalan Pendaratan Ikan adalah tempat yang terdiri atas daratan dan perairan di sekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan sistem bisnis perikanan yang digunakan sebagai tempat kapal perikanan bersandar, berlabuh, dan/atau bongkar muat ikan yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang perikanan kelas D.
42. Pembangkit Listrik Tenaga Air yang selanjutnya disingkat PLTA adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air, waduk/bendungan, atau saluran irigasi yang pembangunannya bersifat multiguna.
43. Pembangkit Listrik Tenaga Bayu yang selanjutnya disingkat PLTB adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi angin (bayu) menjadi listrik.

44. Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi yang selanjutnya disingkat PLTP adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan energi panas bumi.
45. Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro yang selanjutnya disingkat PLTMH adalah adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga dari aliran/terjunan air, saluran sungai, atau saluran irigasi.
46. Pembangkit Listrik Lainnya adalah pembangkit listrik yang memanfaatkan tenaga lainnya.
47. Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTET adalah saluran tenaga tinggi yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) diudara bertegangan nominal diatas 230 Kv sesuai dengan standar dibidang ketenagalistrikan.
48. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat telanjang (konduktor) diudara bertegangan nominal diatas 35 Kv sampai dengan 230 kV sesuai dengan standar dibidang ketenagalistrikan.
49. Saluran Udara Tegangan Menengah yang selanjutnya disingkat SUTM adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara bertegangan di bawah 35 kV sesuai standar di bidang ketenagalistrikan.
50. Saluran Udara Tegangan Rendah yang selanjutnya disingkat SUTR adalah bagian hilir dari sistem tenaga listrik pada tegangan distribusi di bawah 1 kV, yang langsung memasok kebutuhan listrik tegangan rendah ke konsumen.
51. Gardu Listrik adalah suatu instalasi yang terdiri dari peralatan listrik yang berfungsi untuk mengubah tenaga listrik tegangan tinggi yang satu ke tegangan tinggi yang lainnya atau tegangan menengah dan pengukuran, pengawasan, operasi serta pengaturan pengamanan sistem tenaga listrik.

52. Jaringan Tetap adalah satu kesatuan penyelenggaraan jaringan telekomunikasi untuk layanan telekomunikasi tetap, termasuk pipa/kabel bawah laut telekomunikasi.
53. Jaringan Bergerak Seluler adalah jaringan yang melayani telekomunikasi bergerak dengan teknologi seluler di permukaan bumi.
54. Jaringan Irigasi Primer adalah Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas bangunan utama, saluran induk/ primer, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap,bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya.
55. Jaringan Irigasi Sekunder adalah Bagian dari jaringan irigasi yang terdiri atas saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkapnya
56. Bangunan Pengendali Banjir adalah jaringan yang dapat memperlambat waktu tiba banjir dan menurunkan besarnya debit banjir.
57. Bangunan Sumber Daya Air adalah bangunan yang menunjang kegiatan pengelolaan air, sumber air, dan daya air yang terkandung di dalamnya
58. Jaringan Air Baku adalah prasarana pengambilan dan atau penyedia air baku, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
59. Unit Air Baku adalah sarana pengambilan dan/atau penyedia air baku.
60. Unit Produksi adalah infrastruktur yang dapat digunakan untuk proses pengolahan air baku menjadi air minum melalui proses fisika, kimia, dan/atau biologi.
61. Unit Distribusi adalah sarana pengaliran air minum dari bangunan penampungan sampai unit pelayanan.
62. Sumur Pompa adalah Sarana berupa sumur yang bertujuan untuk mendapatkan air baku untuk air minum yang dibuat dengan mengebor tanah pada kedalaman tertentu.

63. Bak Penampungan Air Hujan adalah sarana untuk menampung air hujan sebagai air baku.
64. Sistem Penyediaan Air Minum yang selanjutnya disingkat SPAM adalah satu kesatuan sarana dan prasarana penyediaan air minum, termasuk pipa/kabel bawah laut air minum.
65. Sistem Pengelolaan Air Limbah yang selanjutnya disingkat SPAL adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
66. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik adalah sarana pengelolaan air limbah non domestik.
67. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah sarana pengelolaan air limbah non domestik.
68. Jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik adalah prasarana pengelolaan air limbah non domestik, termasuk pipa/kabel bawah laut air limbah.
69. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) adalah satu kesatuan sarana dan prasarana pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
70. Tempat Penampungan Sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
71. Tempat Pemrosesan Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
72. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
73. Jalur Evakuasi Bencana adalah jalan yang dikhususkan untuk jalur evakuasi bila terjadi bencana.

74. Tempat Evakuasi Bencana adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan memindahkan korban bencana dari lokasi bencana ke tempat yang aman atau penampungan pertama untuk mendapatkan tindakan penanganan lebih lanjut.
75. Jaringan Drainase Primer adalah jaringan untuk menampung dan mengalirkan air lebih dari saluran drainase sekunder dan menyalurkan ke badan air penerima.
76. Jaringan Drainase Sekunder adalah jaringan untuk menampung air dari saluran drainase tersier dan membuang air tersebut ke jaringan drainase primer.
77. Kawasan Lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
78. Kawasan Budi Daya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
79. Badan Air adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
80. Kawasan Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
81. Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, pariwisata, dan rekreasi.
82. Kawasan Cagar Budaya adalah satuan ruang geografis yang memiliki dua situs cagar budaya atau lebih yang letaknya berdekatan dan/atau memperlihatkan ciri tata

ruang yang khas, dan ditetapkan oleh pemerintah kabupaten/kota berdasarkan rekomendasi tim ahli cagar budaya.

83. Kawasan Hutan Produksi Tetap adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai di bawah 125 (seratus dua puluh lima) di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestrian alam, dan taman buru.
84. Hutan Produksi Terbatas adalah kawasan hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikali dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 sampai dengan 174 di luar kawasan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan taman buru.
85. Kawasan Perkebunan Rakyat adalah hutan rakyat yaitu hutan yang dimiliki oleh rakyat dengan luas minimal 0,25 (nol koma dua lima) hektare, penutupan tajuk tanaman berkayu atau jenis lainnya lebih dari 50% (lima puluh persen) atau jumlah tanaman pada tahun pertama minimal 500 (lima ratus) tanaman tiap hektare.
86. Kawasan Tanaman Pangan adalah kawasan lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
87. Kawasan Perkebunan adalah kawasan yang memiliki potensi untuk dimanfaatkan dan dikembangkan baik pada lahan basah dan/atau lahan kering untuk komoditas perkebunan.
88. Kawasan Peternakan adalah kawasan yang secara khusus diperuntukkan untuk kegiatan peternakan atau terpadu dengan komponen usaha tani (berbasis tanaman pangan, perkebunan, hortikultura atau perikanan) berorientasi ekonomi dan berakses dari hulu sampai hilir.

89. Kawasan Perikanan Tangkap adalah kawasan perikanan yang berbasis pada kegiatan penangkapan ikan dan/atau kegiatan pengangkutan ikan.
90. Kawasan Perikanan budidaya adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk budi daya ikan atas dasar potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan kondisi lingkungan serta kondisi prasarana sarana umum yang ada.
91. Kawasan Peruntukan Industri adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan industri berdasarkan RTRW yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
92. Lokasi Pariwisata adalah lokasi yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
93. Kawasan Permukiman Perkotaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perkotaan.
94. Kawasan Permukiman Perdesaan adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung peri kehidupan dan penghidupan di Kawasan Perdesaan.
95. Kawasan Pertahanan dan Keamanan adalah kawasan yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.
96. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan adalah wilayah budi daya pertanian terutama pada wilayah perdesaan yang memiliki hamparan lahan pertanian pangan berkelanjutan dan/atau hamparan lahan cadangan

pertanian pangan berkelanjutan serta unsur penunjangnya dengan fungsi utama untuk mendukung kemandirian, ketahanan, dan kedaulatan pangan nasional.

97. Ruang Terbuka Hijau Perkotaan yang selanjutnya disebut RTH Perkotaan adalah bagian dari ruang-ruang terbuka (*openspaces*) suatu wilayah perkotaan yang di isi oleh tumbuhan, tanaman, dan vegetasi (endemik, introduksi) guna mendukung manfaat langsung dan/atau tidak langsung yang dihasilkan oleh RTH dalam kota tersebut yaitu keamanan, kenyamanan, kesejahteraan, dan keindahan wilayah perkotaan tersebut.
98. Kawasan Strategis adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten/kota terhadap ekonomi, sosial, budaya dan/atau lingkungan.
99. Ketentuan Umum Zonasi adalah ketentuan umum yang mengatur Pemanfaatan Ruang dan Ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang yang disusun untuk setiap klasifikasi peruntukan/fungsi ruang dan Kawasan sekitar jaringan prasarana sesuai dengan RTRW Kabupaten.
100. Ketentuan Khusus adalah ketentuan yang mengatur pemanfaatan kawasan yang memiliki fungsi khusus dan memiliki aturan tambahan seperti adanya kawasan yang bertampalan dengan kawasan peruntukan utama, yang disebut sebagai kawasan pertampalan/tumpeng susun *(overlay)*.
101. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah koefisein perbandingan antara luas lantai dasar bangunan Gedung dengan luas persil.
102. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah koefisien perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung luas persil.

103. Koefisien Dasar Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukan bagi pertamanan/penghijauan dengan luas persil.
104. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
105. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
106. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR selain RDTR.
107. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang yang didasarkan pada kebijakan nasional yang bersifat strategis dan belum diatur dalam RTR dengan mempertimbangkan asas dan tujuan Penyelenggaraan Penataan Ruang
108. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan penataan ruang.
109. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

BAB II
RUANG LINGKUP
Bagian Kesatu
Ruang Lingkup Muatan Materi
Pasal 2

Lingkup pengaturan RTR Wilayah Kabupaten meliputi:

a. Ketentuan umum;
b. ruang lingkup, tujuan, kebijakan, dan strategi Penataan Ruang Wilayah Kabupaten;
c. rencana Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
d. rencana Pola Ruang Kabupaten;
e. Kawasan Strategis Kabupaten;
f. arahan Pemanfaatan Ruang Kabupaten;
g. ketentuan Pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Kabupaten;
h. peran masyarakat dan kelembagaan;
i. penyidikan;
j. ketentuan pidana;
k. ketentuan peralihan;
l. ketentuan lain-lain;
m. ketentuan penutup;
n. penjelasan; dan
o. lampiran.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup Wilayah Perencanaan

Pasal 3

(1) Ruang lingkup wilayah perencanaan RTRW Daerah dilakukan di seluruh wilayah Daerah secara geografis terletak pada koordinat 105^0 25' -106^0 30' bujur timur dan antara 6^0 18' – 7^0 00 lintang selatan dengan luas wilayah kurang lebih 331.264 (tiga ratus tiga puluh satu ribu dua ratus enam puluh empat) hektare meliputi 28 (dua puluh delapan) Kecamatan dan 345 (tiga ratus empat puluh lima) kelurahan atau desa.
(2) Batas wilayah Daerah, meliputi:
    a. sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Serang dan Kabupaten Tangerang;
    b. sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Bogor dan Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat;

c. sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Pandeglang; dan

d. sebelah Selatan berbatasan dengan Samudra Hindia.

(3) Lingkup wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. Kecamatan Banjarsari;
b. Kecamatan Bayah;
c. Kecamatan Bojongmanik;
d. Kecamatan Cibadak;
e. Kecamatan Cibeber;
f. Kecamatan Cigemblong;
g. Kecamatan Cihara;
h. Kecamatan Cijaku;
i. Kecamatan Cikulur;
j. Kecamatan Cileles;
k. Kecamatan Cilograng;
l. Kecamatan Cimarga;
m. Kecamatan Cipanas;
n. Kecamatan Cirinten;
o. Kecamatan Curugbitung;
p. Kecamatan Gunungkencana;
q. Kecamatan Kalanganyar;
r. Kecamatan Lebakgedong;
s. Kecamatan Leuwidamar;
t. Kecamatan Maja;
u. Kecamatan Malingping;
v. Kecamatan Muncang;
w. Kecamatan Panggarangan;
x. Kecamatan Rangkasbitung;
y. Kecamatan Sajira;
z. Kecamatan Sobang;
aa. Kecamatan Wanasalam; dan
bb. Kecamatan Warunggunung.

BAB III

TUJUAN, KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENATAAN RUANG

Bagian Kesatu

Tujuan Penataan Ruang

Pasal 4

Penataan Ruang bertujuan mewujudkan ruang wilayah Daerah yang aman, nyaman, produktif, berkelanjutan, berdaya saing tinggi berbasis pariwisata dan potensi lokal.

Bagian Kedua

Kebijakan Penataan Ruang

Pasal 5

(1) Untuk mewujudkan tujuan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dirumuskan kebijakan Penataan Ruang Daerah.
(2) Kebijakan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten meliputi:
    a. kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten;
    b. kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten; dan
    c. kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.
(3) Kebijakan pengembangan Struktur Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi :
    a. peningkatan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana wilayah; dan
    b. perlindungan kawasan rawan bencana alam melalui pengembangan sistem mitigasi bencana terpadu untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana alam.
(4) Kebijakan pengembangan Pola Ruang Wilayah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi :
    a. kebijakan pengembangan Kawasan Lindung; dan
    b. kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya.

(5) Kebijakan pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berupa peningkatan fungsi pelestarian Kawasan Lindung.

(6) Kebijakan pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b meliputi :
   a. peningkatan ketahanan pangan dan agribisnis berbasis kewilayahan;
   b. pengoptimalan kawasan wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan;
   c. pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan; dan
   d. peningkatan fungsi kawasan di Daerah untuk pertahanan dan keamanan negara.

(7) Kebijakan pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c berupa peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran Kawasan Strategis.

Bagian Ketiga

Strategi Penataan Ruang

Pasal 6

(1) Untuk mewujudkan kebijakan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dirumuskan Strategi Penataan Ruang Daerah.

(2) Strategi Penataan Ruang meliputi :
   a. strategi pengembangan Struktur Ruang Kabupaten;
   b. strategi pengembangan Pola Ruang Kabupaten; dan
   c. strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten.

Pasal 7

(1) Strategi pengembangan Struktur Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, meliputi:

a. strategi peningkatan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana Wilayah; dan
b. strategi perlindungan kawasan rawan bencana alam melalui pengembangan sistem mitigasi bencana terpadu untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana alam.

(2) Strategi peningkatan kualitas dan pemerataan jangkauan pelayanan prasarana dan sarana Wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. menetapkan pusat-pusat kegiatan secara berhierarki;
b. mengembangkan dan meningkatkan fasilitas, sarana dan prasarana sesuai dengan fungsi dan hierarki pusat-pusat pelayanan;
c. mengembangkan fungsi atau kegiatan baru pada pusat-pusat pelayanan yang dapat meningkatkan kualitas pelayanan;
d. mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan pada kawasan perdesaan sebagai penunjang kawasan agropolitan;
e. menciptakan pemerataan pembangunan wilayah;
f. mengembangkan dan meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tidak terbarukan; dan
g. mengembangkan sistem jaringan prasarana dan sarana antar pusat kegiatan yang memungkinkan terjaganya akses antar pusat kegiatan/pelayanan.

(3) Strategi perlindungan kawasan rawan bencana alam melalui pengembangan sistem mitigasi bencana terpadu untuk melindungi manusia dan kegiatannya dari bencana alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. menentukan kawasan rawan bencana berdasarkan norma, standar, peraturan, dan ketentuan;

b. menentukan distribusi peruntukan ruang dalam suatu kawasan rawan bencana dilakukan melalui kajian terhadap tingkat kerawanan bahaya serta tingkat risiko yang dihadapi suatu Wilayah terhadap suatu jenis bahaya;
c. menetapkan rencana pengelolaan kawasan rawan bencana sebagai acuan yang harus digunakan dalam Pemanfaatan Ruang pada kawasan rawan bencana; dan
d. memberikan sosialisasi, penyuluhan, pelatihan dan pendidikan kepada semua *stakeholder* menyangkut kebencanaan dari mulai tindakan pencegahan, tindakan pada saat bencana terjadi, dan tindakan setelah bencana terjadi.

Pasal 8

(1) Strategi pengembangan Pola Ruang Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, meliputi:
a. strategi pengembangan Kawasan Lindung; dan
b. strategi pengembangan Kawasan Budi Daya.
(2) Strategi pengembangan Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa peningkatan fungsi pelestarian Kawasan Lindung.
(3) Peningkatan fungsi pelestarian Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
a. menetapkan kawasan di luar kawasan hutan yang mempunyai fungsi lindung menjadi Kawasan Lindung;
b. mempertahankan Kawasan Lindung yang telah ada agar sesuai dengan fungsi perlindungannya;
c. meningkatkan kualitas kawasan hutan yang berfungsi sebagai Kawasan Lindung, yaitu Kawasan Hutan Lindung dan kawasan hutan konservasi;
d. mengendalikan bentuk-bentuk kegiatan yang berada di dalam Kawasan Lindung yang tidak sesuai dengan

fungsi perlindungan dan/atau dapat merusak fungsi perlindungan Kawasan Lindung; dan

e. mempertahankan luasan ruang terbuka hijau pada kawasan Perkotaan minimal 30% (tiga puluh persen) yang terdiri dari ruang terbuka hijau publik 20% (dua puluh persen) dan ruang terbuka hijau privat 10% (sepuluh persen).

(4) Strategi pengembangan Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi :

a. peningkatan ketahanan pangan dan agribisnis berbasis kewilayahan;
b. pengoptimalan kawasan wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan;
c. pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan; dan
d. peningkatan fungsi kawasan di Daerah untuk pertahanan dan keamanan negara.

(5) Peningkatan ketahanan pangan dan agribisnis berbasis kewilayahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a, terdiri atas:

a. memanfaatkan lahan yang tidak atau kurang produktif yang berada di luar Kawasan Lindung;
b. perlindungan pertanian pangan melalui penetapan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
c. meningkatkan produktivitas Kawasan Budi Daya pertanian dengan usaha-usaha intensifikasi dan diversifikasi pertanian; dan
d. mewujudkan Kawasan Budi Daya melalui pengembangan hutan produksi, pertanian, perkebunan, perikanan, pertambangan dan energi, Kawasan Peruntukan Industri, pariwisata, pergaraman, permukiman, dan kawasan peruntukan lainnya secara produktif melalui pemberdayaan masyarakat di perkotaan dan perdesaan.

(6) Pengoptimalan kawasan wisata alam, wisata budaya, dan wisata buatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b, terdiri atas:
   a. mengembangkan kawasan wisata alam;
   b. mengembangkan kawasan wisata budaya;
   c. mengembangkan kawasan wisata buatan;
   d. mengembangkan kawasan wisata terpadu di bagian timur;
   e. mengembangkan kawasan obyek wisata dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup, budaya dan agama; dan
   f. mengembangkan dan menguatkan prasarana, sarana dan utilitas pendukung kawasan wisata.

(7) Pengembangan potensi pertambangan yang berwawasan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, terdiri atas:
   a. mengembangkan kemitraan dalam rangka meningkatkan produksi dan kemampuan usaha pertambangan;
   b. meningkatkan kualitas pengelolaan bahan tambang secara efisien dan efektif yang ramah lingkungan;
   c. meningkatkan pengawasan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan; dan
   d. meningkatkan potensi hasil pertambangan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

(8) Peningkatan fungsi kawasan di Daerah untuk pertahanan dan keamanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d, terdiri atas:
   a. mendukung penetapan kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan;
   b. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;

c. mengembangkan Kawasan Lindung dan/atau Kawasan Budi Daya tidak terbangun di sekitar Kawasan Pertahanan dan Keamanan Negara sebagai zona penyangga; dan
d. memelihara dan menjaga aset-aset pertahanan dan keamanan.

Pasal 9

(1) Strategi pengembangan Kawasan Strategis Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, berupa peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran Kawasan Strategis.
(2) Peningkatan dan pemantapan fungsi dan peran Kawasan Strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
    a. mengoptimalkan pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomi kawasan;
    b. meningkatkan sarana dan prasarana pendukung perkotaan;
    c. membatasi dan mencegah Pemanfaatan Ruang yang berpotensi mengurangi fungsi perlindungan kawasan;
    d. membatasi pengembangan prasarana dan sarana di dalam dan di sekitar kawasan yang ditetapkan untuk fungsi lindung yang dapat memicu perkembangan kegiatan budi daya;
    e. mengoptimalkan pengembangan kawasan melalui peningkatan nilai ekonomis Kawasan Lindung melalui pemanfaatan untuk daya tarik wisata, pendidikan, dan penelitian berbasis lingkungan hidup; dan
    f. mencegah dampak negatif pemanfaatan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi terhadap fungsi lingkungan hidup dan keselamatan masyarakat.

BAB IV

RENCANA STRUKTUR RUANG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 10

(1) Rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah terdiri atas:
    a. sistem pusat permukiman; dan
    b. sistem jaringan prasarana.
(2) Rencana struktur ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Sistem Pusat Permukiman

Pasal 11

(1) Sistem pusat Permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a, meliputi:
    a. PKW;
    b. PKL; dan
    c. pusat kegiatan lainnya.
(2) PKW sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Kecamatan Rangkasbitung.
(3) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
    a. Kecamatan Bayah;
    b. Kecamatan Cipanas;
    c. Kecamatan Maja; dan
    d. Kecamatan Malingping.
(4) Pusat kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
    a. PPK; dan
    b. PPL.
(5) Sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum

dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

(1) PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
   a. Kecamatan Cileles;
   b. Kecamatan Leuwidamar;
   c. Kecamatan Cikulur;
   d. Kecamatan Cibeber;
   e. Kecamatan Wanasalam;
   f. Kecamatan Cijaku;
   g. Kecamatan Cirinten;
   h. Kecamatan Gunungkencana;
   i. Kecamatan Banjarsari;
   j. Kecamatan Muncang;
   k. Kecamatan Curugbitung;
   l. Kecamatan Cilograng; dan
   m. Kecamatan Warunggunung.

(2) PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
   a. Margajaya di Kecamatan Cimarga;
   b. Cigemblong di Kecamatan Cigemblong;
   c. Sinarjaya di Kecamatan Sobang;
   d. Bojongmanik di Kecamatan Bojongmanik;
   e. Sajira di Kecamatan Sajira;
   f. Lebakgedong di Kecamatan Lebakgedong;
   g. Mekarjaya di Kecamatan Panggarangan;
   h. Sukaraja di Kecamatan Warunggunung;
   i. Ciakar di Kecamatan Gunungkencana;
   j. Cipining di Kecamatan Curugbitung;
   k. Keboncau di Kecamatan Bojongmanik;
   l. Pajagan di Kecamatan Sajira;
   m. Sarageni di Kecamatan Cimarga;
   n. Curugpanjang di Kecamatan Cikulur;

o. Kandangsapi di Kecamatan Cijaku;
p. Pondokpanjang di Kecamatan Cihara;
q. Leuwiipuh di Kecamatan Banjarsari;
r. Kertaraharja di Kecamatan Banjarsari;
s. Muara di Kecamatan Wanasalam; dan
t. Kaduhauk di Kecamatan Banjarsari.

Pasal 13

Ketentuan mengenai PKW, PKL dan PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dalam RDTR.

Bagian Ketiga

Sistem Jaringan Prasarana

Pasal 14

Sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b, meliputi:

a. sistem jaringan transportasi;
b. sistem jaringan energi;
c. sistem jaringan telekomunikasi;
d. sistem jaringan sumber daya air; dan
e. sistem jaringan prasarana lainnya.

Paragraf 1

Sistem Jaringan Transportasi

Pasal 15

(1) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a, terdiri atas:
    a. sistem jaringan jalan;
    b. sistem jaringan kereta api; dan
    c. sistem jaringan transportasi laut.
(2) Sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 16

Sistem Jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. jalan umum;
b. Jalan Tol;
c. terminal penumpang; dan
d. Terminal Barang.

Pasal 17

(1) Jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a, terdiri atas:
    a. jalan arteri;
    b. jalan kolektor;
    c. jalan lokal; dan
    d. jalan lingkungan.
(2) Jalan arteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Jalan Arteri Primer, terdiri atas:
    a. ruas Bts. Kota Pandeglang – Bts. Kota Rangkasbitung;
    b. ruas Jln. By Pass Rangkasbitung (Jln. Soekarno Hatta - Rangkasbitung); dan
    c. ruas Cikande - Rangkasbitung.
(3) Jalan kolektor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jalan Kolektor Primer terdiri atas:
    a. ruas Bts. Kota Rangkasbitung-Cigelung (Bts. Prov Jabar);
    b. ruas Jln. Raya Cipanas (Rangkasbitung);
    c. ruas Muara Binuangeun - Simpang;
    d. ruas Simpang - Bayah;
    e. ruas Bayah - Cibarenok - Bts. Prov. Jabar;
    f. ruas Jln. Raya Cikande (Jln. Otto Iskandardinata Rangkasbitung);
    g. ruas Ciruas - Petir - Warunggunung;
    h. ruas Citeras - Kopo (Citeras - Tigaraksa);
    i. ruas Maja - Koleang;
    j. ruas Picung - Malingping - Simpang;

k. ruas Bayah - Cikotok;
l. ruas Cikotok - Bts. Jabar;
m. ruas Jl. Jendral Ahmad Yani (Rangkasbitung);
n. ruas Jl. Sunan Kalijaga (Rangkasbitung);
o. ruas Cikumpay - Ciparay;
p. ruas Ciparay-Warungbanten;
q. ruas Picung - Munjul;
r. ruas Gunung Luhur – Cipulus;
s. ruas Gunung Madur - Pulo Manuk; dan
t. ruas Cipanas - Ciparay.

(4) Jalan Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. Jalan Lokal Primer; dan
b. Jalan Lokas Sekunder.

(5) Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(6) Jalan Lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berupa Jalan Lingkungan Primer.

(7) Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 18

Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b, terdiri atas:

a. ruas Jalan Tol Serang-Panimbang;
b. ruas Jalan Tol Ujung Kulon-Pelabuhan Ratu;
c. ruas Jalan Tol Cileles - Maja – Rangkasbitung; dan
d. ruas Jalan Tol Rangkasbitung – Merak.

Pasal 19

(1) Terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c, terdiri atas:

a. Terminal Penumpang Tipe A;
b. Terminal Penumpang Tipe B; dan
c. Terminal Penumpang Tipe C.

(2) Terminal Penumpang Tipe A sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Terminal Penumpang Tipe A Mandala di Kecamatan Cibadak; dan
b. Terminal Penumpang Tipe A Malingping di Kecamatan Malingping.

(3) Terminal Penumpang Tipe B sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Terminal Penumpang Tipe B Bayah di Kecamatan Bayah; dan
b. Terminal Penumpang Tipe B Cipanas di Kecamatan Cipanas.

(4) Terminal Penumpang Tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. Terminal Penumpang Tipe C Kalijaga di Kecamatan Rangkasbitung;
b. Terminal Penumpang Tipe C Curug di Kecamatan Rangkasbitung;
c. Terminal Penumpang Tipe C Aweh di Kecamatan Kalanganyar;
d. Terminal Penumpang Tipe C Leuwidamar di Kecamatan Leuwidamar;
e. Terminal Penumpang Tipe C Cikotok di Kecamatan Cibeber;
f. Terminal Penumpang Tipe C Binuangeun di Kecamatan Wanasalam;
g. Terminal Penumpang Tipe C Maja di Kecamatan Maja; dan
h. Terminal Penumpang Tipe C Panggarangan di Kecamatan Panggarangan.

Pasal 20

Terminal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf d, terdiri atas:

a. Terminal Barang di Kecamatan Maja; dan
b. Terminal Barang di Kecamatan Warunggunung.

Pasal 21

(1) Sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
    a. jaringan jalur kereta api; dan
    b. stasiun kereta api.
(2) Jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa jaringan jalur kereta api umum.
(3) Jaringan jalur kereta api umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota, terdiri atas:
    a. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Saketi - Bayah;
    b. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Rangkasbitung - Saketi - Labuan;
    c. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Serpong - Maja - Rangkasbitung - Merak; dan
    d. Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota Cilegon - Serang - Pandeglang - Rangkasbitung.
(4) Stasiun kereta api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa Stasiun Penumpang, terdiri atas:
    a. Stasiun Penumpang Rangkasbitung di Kecamatan Rangkasbitung;
    b. Stasiun Penumpang Citeras di Kecamatan Rangkasbitung;
    c. Stasiun Penumpang Maja di Kecamatan Maja;
    d. Stasiun Penumpang Citra Maja di Kecamatan Maja;
    e. Stasiun Penumpang Banjarsari di Kecamatan Banjarsari;
    f. Stasiun Penumpang Kerta di Kecamatan Banjarsari;

g. Stasiun Penumpang Malingping di Kecamatan Malingping;
h. Stasiun Penumpang Panggarangan di Kecamatan Panggarangan; dan
i. Stasiun Penumpang Bayah di Kecamatan Bayah.

Pasal 22

Sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf c, berupa pelabuhan laut terdiri atas:

a. pelabuhan pengumpan;
b. Terminal Khusus; dan
c. pelabuhan perikanan.

Pasal 23

(1) Pelabuhan pengumpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, berupa Pelabuhan Pengumpan Lokal, terdiri atas:
    a. Kecamatan Bayah; dan
    b. Kecamatan Wanasalam.
(2) Terminal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b, terdapat di Kecamatan Bayah.
(3) Pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf c, terdiri atas:
    a. Pelabuhan Perikanan Pantai; dan
    b. Pangkalan Pendaratan Ikan.
(4) Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dapat menjadi pelabuhan perikanan samudera dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Pelabuhan Perikanan Pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berada di Kecamatan Wanasalam.
(6) Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berada di Kecamatan Cilograng.

Paragraf 2

Sistem Jaringan Energi

Pasal 24

(1) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b, berupa jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.

(2) Jaringan infrastruktur ketenagalistrikan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan
   b. jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

(3) Infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
   a. PLTA;
   b. PLTB;
   c. PLTP;
   d. PLTMH; dan
   e. pembangkit listrik lainnya.

(4) Jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
   a. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
   b. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
   c. Gardu Listrik.

(5) Sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 25

(1) PLTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf a, berupa Waduk Karian di Kecamatan Rangkasbitung.

(2) PLTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf b, terdiri atas:
   a. Kecamatan Bayah;
   b. Kecamatan Cihara;
   c. Kecamatan Malingping; dan
   d. Kecamatan Wanasalam.

(3) PLTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf c, berada di Kecamatan Sobang.

(4) PLTMH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf d, terdiri atas:
   a. Kecamatan Bayah;
   b. Kecamatan Cibeber;
   c. Kecamatan Cigemblong;
   d. Kecamatan Cilograng;
   e. Kecamatan Cipanas;
   f. Kecamatan Panggarangan; dan
   g. Kecamatan Sobang.

(5) Pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3) huruf e, berupa EBT Hidro dan Biomassa, berada di Kecamatan Panggarangan.

Pasal 26

(1) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf a, terdiri atas:
   a. SUTET; dan
   b. SUTT.

(2) SUTET sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa SUTET Cilegon Baru – Cibinong yang melewati Kecamatan Rangkasbitung dan Kecamatan Maja.

(3) SUTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. Rangkasbitung – Bunar;
   b. Rangkasbitung Baru – Bunar;
   c. Rangkasbitung Baru – Kopo;
   d. Saketi – Rangkasbitung;

e. Serang – Rangkasbitung;
f. Saketi – Malingping;
g. Malingping – Bayah; dan
h. Bayah – Pelabuhan Ratu.

(4) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf b, terdiri atas:
a. SUTM; dan
b. SUTR.

(5) SUTM dan SUTR sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan huruf b, berada di seluruh Kecamatan.

(6) Gardu Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4) huruf c, terdiri atas:
a. Gardu Listrik Rangkasbitung di Kecamatan Rangkasbitung;
b. Gardu Listrik Rangkasbitung Baru di Kecamatan Rangkasbitung;
c. Gardu Listrik Malingping di Kecamatan Cijaku; dan
d. Gardu Listrik Bayah di Kecamatan Bayah.

Paragraf 3

Sistem Jaringan Telekomunikasi

Pasal 27

(1) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c, meliputi:
a. Jaringan Tetap; dan
b. jaringan bergerak.

(2) Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Kecamatan Banjarsari;
b. Kecamatan Bayah;
c. Kecamatan Rangkasbitung;
d. Kecamatan Cibadak;
e. Kecamatan Cihara;
f. Kecamatan Cikulur;
g. Kecamatan Cilograng;

h. Kecamatan Malingping;
i. Kecamatan Wanasalam;
j. Kecamatan Panggarangan;
k. Kecamatan Cibeber;
l. Kecamatan Warunggunung;
m. Kecamatan Cijaku;
n. Kecamatan Gunungkencana;
o. Kecamatan Cileles;
p. Kecamatan Cimarga;
q. Kecamatan Kalanganyar;
r. Kecamatan Maja;
s. Kecamatan Sajira;
t. Kecamatan Curugbitung;
u. Kecamatan Leuwidamar.
v. Kecamatan Cipanas;
w. Kecamatan Lebakgedong; dan
x. Kecamatan Sobang.

(3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa Jaringan Bergerak Seluler.

(4) Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa menara *Base Transceiver Station* (BTS) terdapat di seluruh Kecamatan.

(5) Pengembangan sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

(6) Sistem jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4

Sistem Jaringan Sumber Daya Air

Pasal 28

(1) Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d, berupa prasarana sumber daya air, terdiri atas:
   a. sistem jaringan irigasi;
   b. sistem pengendalian banjir; dan
   c. Bangunan Sumber Daya Air.

(2) Sistem Jaringan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini

Pasal 29

(1) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. Jaringan Irigasi Primer; dan
   b. Jaringan Irigasi Sekunder.

(2) Jaringan Irigasi Primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di seluruh Kecamatan.

(3) Jaringan Irigasi Sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. Kecamatan Banjarsari;
   b. Kecamatan Bayah;
   c. Kecamatan Cibadak;
   d. Kecamatan Cibeber;
   e. Kecamatan Cihara;
   f. Kecamatan Cikulur;
   g. Kecamatan Cileles;
   h. Kecamatan Cilograng;
   i. Kecamatan Cimarga;
   j. Kecamatan Cipanas;
   k. Kecamatan Cirinten;
   l. Kecamatan Gunungkencana;

m. Kecamatan Kalanganyar;
n. Kecamatan Lebakgedong;
o. Kecamatan Malingping;
p. Kecamatan Muncang;
q. Kecamatan Panggarangan;
r. Kecamatan Rangkasbitung;
s. Kecamatan Sajira;
t. Kecamatan Sobang; dan
u. Kecamatan Warunggunung.

Pasal 30

Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf b, berupa bangunan pengendalian banjir, terdiri atas:

a. Kecamatan Banjarsari;
b. Kecamatan Cibeber;
c. Kecamatan Cikulur;
d. Kecamatan Cilograng;
e. Kecamatan Cimarga;
f. Kecamatan Gunungkencana;
g. Kecamatan Leuwidamar;
h. Kecamatan Maja;
i. Kecamatan Rangkasbitung;
j. Kecamatan Sajira;
k. Kecamatan Warunggunung;
l. Kecamatan Cijaku;
m. Kecamatan Curugbitung;
n. Kecamatan Malingping;
o. Kecamatan Panggarangan; dan
p. Kecamatan Wanasalam.

Pasal 31

Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) huruf c, berada di seluruh Kecamatan.

Pasal 32

Sistem jaringan irigasi, sistem pengendalian banjir, dan Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30 dan Pasal 31 tercantum dalam Lampiran IX, dan Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 33

(1) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf e, terdiri atas :
   a. SPAM;
   b. SPAL;
   c. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
   d. sistem jaringan persampahan;
   e. sistem jaringan evakuasi bencana; dan
   f. sistem drainase.

(2) Sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 34

SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. jaringan perpipaan; dan
b. bukan jaringan perpipaan.

Pasal 35

(1) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf a, terdiri atas:
   a. Jaringan Air Baku;
   b. Unit Air Baku;

c. Unit Produksi; dan
d. Unit Distribusi.

(2) Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Kecamatan Cibadak;
b. Kecamatan Kalanganyar;
c. Kecamatan Warunggunung;
d. Kecamatan Rangkasbitung;
e. Kecamatan Maja;
f. Kecamatan Sajira; dan
g. Kecamatan Curugbitung.

(3) Unit Air Baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di Kecamatan Rangkasbitung.

(4) Unit Produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri atas:
a. Kecamatan Maja;
b. Kecamatan Bayah;
c. Kecamatan Cibadak;
d. Kecamatan Kalanganyar;
e. Kecamatan Rangkasbitung;
f. Kecamatan Sajira;
g. Kecamatan Cilograng;
h. Kecamatan Lebakgedong;
i. Kecamatan Leuwidamar;
j. Kecamatan Muncang;
k. Kecamatan Wanasalam; dan
l. Kecamatan Cijaku.

(5) Unit Distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri atas:
a. Kecamatan Cibadak;
b. Kecamatan Kalanganyar; dan
c. Kecamatan Rangkasbitung.

(6) Jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan bagian dari SPAM Regional Karian Serpong.

Pasal 36

(1) Bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, terdiri atas:
    a. sumur pompa; dan
    b. Bak Penampungan Air Hujan.
(2) Sumur pompa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
    a. Kecamatan Rangkasbitung;
    b. Kecamatan Cikulur; dan
    c. Kecamatan Wanasalam.
(3) Bak Penampungan Air Hujan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
    a. Kecamatan Lebakgedong;
    b. Kecamatan Bayah;
    c. Kecamatan Cigemblong; dan
    d. Kecamatan Leuwidamar.

Pasal 37

(1) SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
    a. sistem pengelolaan air limbah non domestik; dan
    b. sistem pengelolaan air limbah domestik.
(2) Sistem pengelolaan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik, terdiri atas:
    a. Kecamatan Rangkasbitung;
    b. Kecamatan Cileles;
    c. Kecamatan Cimarga; dan
    d. Kecamatan Bayah
(3) Sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
    a. Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik; dan
    b. jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik.

(4) Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
   a. Kecamatan Cibadak;
   b. Kecamatan Kalanganyar;
   c. Kecamatan Cikulur;
   d. Kecamatan Rangkasbitung;
   e. Kecamatan Maja;
   f. Kecamatan Leuwidamar;
   g. Kecamatan Cipanas;
   h. Kecamatan Gunungkencana;
   i. Kecamatan Malingping;
   j. Kecamatan Panggarangan; dan
   k. Kecamatan Bayah.

(5) Jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, berada di seluruh Kecamatan.

Pasal 38

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c, berada di Kecamatan Rangkasbitung dan Kecamatan Cimarga.

Pasal 39

(1) Sistem Jaringan Persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf d, terdiri atas:
   a. TPS;
   b. TPA; dan
   c. TPST.

(2) TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di seluruh Kecamatan.

(3) TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. Kecamatan Maja;
   b. Kecamatan Cihara;
   c. Kecamatan Cipanas;

d. Kecamatan Bayah;
e. Kecamatan Banjarsari; dan
f. Kecamatan Leuwidamar

(4) Rencana pembangunan lokasi TPA baru, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) TPST sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berada di Kecamatan Maja

Pasal 40

Sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf e, terdiri atas:

a. sistem jaringan evakuasi bencana banjir tingkat tinggi;
b. sistem jaringan evakuasi bencana gempa bumi tingkat tinggi;
c. sistem jaringan evakuasi bencana longsor tingkat tinggi;
d. sistem jaringan evakuasi bencana likuefaksi tingkat sedang dan tinggi; dan
e. sistem jaringan evakuasi bencana tsunami tingkat tinggi.

Pasal 41

(1) Sistem jaringan evakuasi bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a, terdiri atas:
    a. jalur evakuasi bencana banjir tingkat tinggi; dan
    b. tempat evakuasi bencana banjir tingkat tinggi.

(2) Jalur evakuasi bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
    a. Kecamatan Maja;
    b. Kecamatan Curugbitung;
    c. Kecamatan Banjarsari
    d. Kecamatan Gunungkencana
    e. Kecamatan Wanasalam;
    f. Kecamatan Malingping;
    g. Kecamatan Cihara; dan

h. Kecamatan Panggarangan.

(3) Tempat evakuasi bencana banjir tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Kecamatan Maja;
b. Kecamatan Banjarsari;
c. Kecamatan Wanasalam;
d. Kecamatan Malingping;
e. Kecamatan Cihara; dan
f. Kecamatan Panggarangan.

Pasal 42

(1) Sistem jaringan evakuasi bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b, terdiri atas:
a. jalur evakuasi bencana gempa bumi tingkat tinggi; dan
b. tempat evakuasi bencana gempa bumi tingkat tinggi.

(2) Jalur evakuasi bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
a. Kecamatan Cibadak;
b. Kecamatan Kalanganyar;
c. Kecamatan Rangkasbitung;
d. Kecamatan Cimarga;
e. Kecamatan Maja;
f. Kecamatan Curugbitung;
g. Kecamatan Muncang;
h. Kecamatan Sajira;
i. Kecamatan Bojongmanik;
j. Kecamatan Cibeber
k. Kecamatan Malingping;
l. Kecamatan Cigemblong;
m. Kecamatan Panggarangan;
n. Kecamatan Bayah;
o. Kecamatan Cirinten; dan
p. Kecamatan Cilograng.

(3) Tempat evakuasi bencana gempa bumi tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. Kecamatan Cibadak;
   b. Kecamatan Rangkasbitung;
   c. Kecamatan Cimarga;
   d. Kecamatan Muncang;
   e. Kecamatan Malingping;
   f. Kecamatan Cigemblong;
   g. Kecamatan Bayah;
   h. Kecamatan Cirinten;
   i. Kecamatan Panggarangan;
   j. Kecamatan Cibeber; dan
   k. Kecamatan Cilograng.

Pasal 43

(1) Sistem jaringan evakuasi bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c, terdiri atas:
   a. jalur evakuasi bencana longsor tingkat tinggi; dan
   b. tempat evakuasi bencana longsor tingkat tinggi.

(2) Jalur evakuasi bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berada di Kecamatan Cibeber.

(3) Tempat evakuasi bencana longsor tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berada di Kecamatan Cibeber.

Pasal 44

(1) Sistem jaringan evakuasi bencana likuefaksi tingkat sedang dan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf d, terdiri atas:
   a. jalur evakuasi bencana likuefaksi tingkat sedang dan tinggi; dan
   b. tempat evakuasi bencana likuefaksi tingkat sedang dan tinggi.

(2) Jalur evakuasi bencana likuefaksi tingkat sedang dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. Kecamatan Panggarangan;
   b. Kecamatan Cihara;
   c. Kecamatan Cibadak;
   d. Kecamatan Rangkasbitung;
   e. Kecamatan Kalanganyar;
   f. Kecamatan Maja;
   g. Kecamatan Banjarsari
   h. Kecamatan Malingping; dan
   i. Kecamatan Wanasalam.

(3) Tempat evakuasi bencana likuefaksi tingkat sedang dan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. Kecamatan Panggarangan;
   b. Kecamatan Cihara;
   c. Kecamatan Cibadak;
   d. Kecamatan Rangkasbitung;
   e. Kecamatan Maja;
   f. Kecamatan Banjarsari;
   g. Kecamatan Malingping; dan
   h. Kecamatan Wanasalam.

Pasal 45

(1) Sistem jaringan evakuasi bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf e, terdiri atas:
   a. jalur evakuasi bencana tsunami tingkat tinggi; dan
   b. tempat evakuasi bencana tsunami tingkat tinggi.

(2) Jalur evakuasi bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. Kecamatan Panggarangan;
   b. Kecamatan Cihara;
   c. Kecamatan Malingping; dan

d. Kecamatan Wanasalam.

(3) Tempat evakuasi bencana tsunami tingkat tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. Kecamatan Panggarangan;
b. Kecamatan Cihara;
c. Kecamatan Malingping; dan
d. Kecamatan Wanasalam.

Pasal 46

(1) Sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf f, terdiri atas:
a. Jaringan Drainase Primer; dan
b. Jaringan Drainase Sekunder.

(2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, berada di seluruh Kecamatan.

BAB V

RENCANA POLA RUANG WILAYAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 47

(1) Rencana pola ruang wilayah Daerah terdiri atas:
a. Kawasan Lindung; dan
b. Kawasan Budi Daya.

(2) Rencana pola ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Lindung

Pasal 48

Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. Badan Air;

b. kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya;
c. kawasan konservasi; dan
d. Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 49

(1) Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf a, seluas kurang lebih 3.765 (tiga ribu tujuh ratus enam puluh lima) hektare, tersebar di seluruh Kecamatan.
(2) Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf b, berupa Kawasan Hutan Lindung, dengan luas kurang lebih 3.471 (tiga ribu empat ratus tujuh puluh satu) hektare, terdiri atas:
    a. Kecamatan Banjarsari;
    b. Kecamatan Cibeber;
    c. Kecamatan Cijaku;
    d. Kecamatan Cilograng;
    e. Kecamatan Gunungkencana;
    f. Kecamatan Malingping;
    g. Kecamatan Muncang;
    h. Kecamatan Sobang; dan
    i. Kecamatan Wanasalam.
(3) Kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c, berupa kawasan pelestarian alam.
(4) Kawasan pelestarian alam sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berupa Taman Nasional Gunung Halimun-Salak dengan luas kurang lebih 32.119 (tiga puluh dua ribu seratus sembilan belas) hektare, terdiri atas:
    a. Kecamatan Bayah;
    b. Kecamatan Cibeber;
    c. Kecamatan Cigemblong;
    d. Kecamatan Cipanas;
    e. Kecamatan Lebakgedong;
    f. Kecamatan Leuwidamar;

g. Kecamatan Muncang;
h. Kecamatan Panggarangan;
i. Kecamatan Sajira; dan
j. Kecamatan Sobang.

(5) Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf d dengan luas kurang lebih 5.054 (lima ribu lima puluh empat) hektare, terdiri atas:
a. Kecamatan Bojongmanik;
b. Kecamatan Cigemblong;
c. Kecamatan Cirinten;
d. Kecamatan Leuwidamar;
e. Kecamatan Muncang; dan
f. Kecamatan Sobang.

Bagian Ketiga

Kawasan Budi Daya

Pasal 50

Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. kawasan hutan produksi;
b. Kawasan Perkebunan Rakyat;
c. kawasan pertanian;
d. kawasan perikanan;
e. Kawasan Peruntukan Industri;
f. kawasan pariwisata;
g. kawasan permukiman; dan
h. Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Paragraf 1

Kawasan Hutan Produksi

Pasal 51

(1) Kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf a, terdiri atas:
a. Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
b. Kawasan Hutan Produksi Tetap.

(2) Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 28.512 (dua puluh delapan ribu lima ratus dua belas) hektare, terdiri atas:
   a. Kecamatan Banjarsari;
   b. Kecamatan Bayah;
   c. Kecamatan Bojongmanik;
   d. Kecamatan Cibeber;
   e. Kecamatan Cigemblong;
   f. Kecamatan Cihara;
   g. Kecamatan Cijaku;
   h. Kecamatan Cikulur;
   i. Kecamatan Cileles;
   j. Kecamatan Cilograng;
   k. Kecamatan Cimarga;
   l. Kecamatan Cipanas;
   m. Kecamatan Cirinten;
   n. Kecamatan Gunungkencana;
   o. Kecamatan Lebakgedong;
   p. Kecamatan Leuwidamar;
   q. Kecamatan Malingping;
   r. Kecamatan Muncang;
   s. Kecamatan Panggarangan;
   t. Kecamatan Sajira;
   u. Kecamatan Sobang; dan
   v. Kecamatan Wanasalam.

(3) Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 17.947 (tujuh belas ribu sembilan ratus empat puluh tujuh) hektare, terdiri atas:
   a. Kecamatan Banjarsari;
   b. Kecamatan Cibeber;
   c. Kecamatan Cigemblong;
   d. Kecamatan Cijaku;
   e. Kecamatan Cipanas;

f. Kecamatan Cirinten;
g. Kecamatan Curugbitung;
h. Kecamatan Gunungkencana;
i. Kecamatan Lebakgedong;
j. Kecamatan Leuwidamar;
k. Kecamatan Panggarangan; dan
l. Kecamatan Wanasalam.

Paragraf 2

Kawasan Perkebunan Rakyat

Pasal 52

Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf b, dengan luas kurang lebih 16.326 (enam belas ribu tiga ratus dua puluh enam) hektare, terdiri atas :

a. Kecamatan Banjarsari;
b. Kecamatan Bayah;
c. Kecamatan Bojongmanik;
d. Kecamatan Cibeber;
e. Kecamatan Cigemblong;
f. Kecamatan Cihara;
g. Kecamatan Cijaku;
h. Kecamatan Cikulur;
i. Kecamatan Cileles;
j. Kecamatan Cilograng;
k. Kecamatan Cimarga;
l. Kecamatan Cipanas;
m. Kecamatan Cirinten;
n. Kecamatan Curugbitung;
o. Kecamatan Gunungkencana;
p. Kecamatan Kalanganyar;
q. Kecamatan Lebakgedong;
r. Kecamatan Leuwidamar;
s. Kecamatan Maja;
t. Kecamatan Malingping;
u. Kecamatan Muncang;

v. Kecamatan Panggarangan;
w. Kecamatan Rangkasbitung;
x. Kecamatan Sajira;
y. Kecamatan Sobang;
z. Kecamatan Wanasalam; dan
aa. Kecamatan Warunggunung.

Paragraf 3

Kawasan Pertanian

Pasal 53

(1) Kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf c, dengan luas lebih kurang 226.839,12 (dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan koma nol satu dua), terdiri dari:
    a. Kawasan Tanaman Pangan;
    b. kawasan perkebunan; dan
    c. Kawasan Peternakan.
(2) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 46.433,07 (empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tiga koma nol tujuh) hektare berada di seluruh Kecamatan.
(3) Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk didalamnya Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas kurang lebih 34.949,05 (tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma nol lima) hektare, tersebar di seluruh Kecamatan.
(4) Kawasan perkebunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 142.071 (seratus empat puluh dua ribu tujuh puluh satu) hektare berada di seluruh Kecamatan.
(5) Kawasan peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dengan luas kurang lebih 3.386 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam) hektare, terdiri atas:
    a. Kecamatan Banjarsari;
    b. Kecamatan Bojongmanik;

c. Kecamatan Cigemblong;
d. Kecamatan Cikulur;
e. Kecamatan Cilograng;
f. Kecamatan Cimarga;
g. Kecamatan Cipanas;
h. Kecamatan Cirinten;
i. Kecamatan Curugbitung;
j. Kecamatan Gunungkencana;
k. Kecamatan Leuwidamar;
l. Kecamatan Muncang; dan
m. Kecamatan Sajira.

Paragraf 4

Kawasan Perikanan

Pasal 54

(1) Kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf d, terdiri dari:
a. Kawasan Perikanan Tangkap; dan
b. Kawasan Perikanan Budi Daya.

(2) Kawasan Perikanan Tangkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 428 (empat ratus dua puluh delapan) hektare terdiri atas :
a. Kecamatan Bayah;
b. Kecamatan Cilograng;
c. Kecamatan Panggarangan; dan
d. Kecamatan Wanasalam.

(3) Kawasan Perikanan Budi Daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 120 (seratus dua puluh) hektare terdiri atas :
a. Kecamatan Malingping; dan
b. Kecamatan Wanasalam.

Paragraf 5

Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 55

(1) Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf e dengan luas kurang lebih 10.981 (sepuluh ribu sembilan ratus delapan puluh satu) hektare terdiri atas:
   a. Kecamatan Banjarsari;
   b. Kecamatan Bayah;
   c. Kecamatan Bojongmanik;
   d. Kecamatan Cibadak;
   e. Kecamatan Cikulur;
   f. Kecamatan Cileles;
   g. Kecamatan Cimarga;
   h. Kecamatan Curugbitung;
   i. Kecamatan Gunungkencana;
   j. Kecamatan Leuwidamar;
   k. Kecamatan Maja;
   l. Kecamatan Rangkasbitung; dan
   m. Kecamatan Warunggunung.

(2) Penentuan kegiatan industri pada Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 6

Kawasan Pariwisata

Pasal 56

Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf f berupa lokasi wisata, tercantum dalam Lampiran XIII dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7

Kawasan Permukiman

Pasal 57

(1) Kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf g, terdiri atas:
    a. Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
    b. Kawasan Permukiman Perdesaan.
(2) Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dengan luas kurang lebih 14.109 (empat belas ribu seratus sembilan) hektare, terdiri atas:
    a. Kecamatan Bayah;
    b. Kecamatan Cibadak;
    c. Kecamatan Cikulur;
    d. Kecamatan Curugbitung;
    e. Kecamatan Kalanganyar;
    f. Kecamatan Maja;
    g. Kecamatan Malingping;
    h. Kecamatan Rangkasbitung; dan
    i. Kecamatan Warunggunung.
(3) Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dengan luas kurang lebih 16.257 (enam belas ribu dua ratus lima puluh tujuh) hektare berada di seluruh Kecamatan.

Paragraf 8

Kawasan Pertahanan dan Keamanan

Pasal 58

(1) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 huruf h, terdiri atas:
    a. Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
    b. lokasi pertahanan dan keamanan.
(2) Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a seluas kurang lebih 334 (tiga ratus tiga puluh empat) hektare berada di:
    a. Kecamatan Sajira; dan;

b. Kecamatan Panggarangan;

(3) Lokasi pertahanan dan keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
   a. Kodim di Kecamatan Rangkasbitung;
   b. Koramil di Kecamatan Rangkasbitung;
   c. Koramil di Kecamatan Warunggunung;
   d. Koramil di Kecamatan Maja;
   e. Koramil di Kecamatan Sajira;
   f. Koramil di Kecamatan Cipanas;
   g. Koramil di Kecamatan Leuwidamar;
   h. Koramil di Kecamatan Cimarga;
   i. Koramil di Kecamatan Muncang;
   j. Koramil di Kecamatan Bojongmanik;
   k. Koramil di Kecamatan Gunung Kencana;
   l. Koramil di Kecamatan Cileles;
   m. Koramil di Kecamatan Banjarsari;
   n. Koramil di Kecamatan Malingping;
   o. Koramil di Kecamatan Panggarangan; dan
   p. Koramil di Kecamatan Bayah.

BAB VI
KAWASAN STRATEGIS
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 59

(1) Kawasan Strategis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri atas:
   a. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;
   b. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial budaya;
   c. Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi; dan

d. Kawasan Stategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

(2) Kawasan Strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pertumbuhan Ekonomi

Pasal 60

(1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf a, terdiri atas:
   a. ekowisata sekitar kawasan Waduk Karian, mendukung Kawasan Strategis Provinsi Banten dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi;
   b. koridor Rangkasbitung – Cibadak – Citeras – Warunggunung – Cikulur – Cileles; dan
   c. Kota Baru Maja.

(2) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. mewujudkan ekowisata kawasan Waduk Karian sebagai pusat pengembangan pariwisata, pertanian dan perikanan yang berkelanjutan;
   b. mewujudkan koridor Rangkasbitung – Cibadak – Citeras – Warunggunung – Cikulur – Cileles sebagai pusat perdagangan dan jasa skala Daerah; dan
   c. mewujudkan Kota Baru Maja sebagai pusat permukiman perkotaan dan perdagangan dan jasa yang berkelanjutan.

(3) Arahan pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. pengembangan pariwisata, perdagangan dan jasa, pertanian, dan perikanan di sekitar kawasan Waduk Karian;
   b. pengembangan perdagangan dan jasa, perkantoran, dan permukiman pada koridor Rangkasbitung – Cibadak – Citeras – Warunggunung – Cikulur – Cileles; dan
   c. pengembangan permukiman, perdagangan dan jasa, fasilitas umum dan fasilitas sosial di Kota Baru Maja.

Bagian Ketiga

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya

Pasal 61

(1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf b, terdiri atas:
   a. kawasan Masyarakat Adat Baduy; dan
   b. kawasan Kaolotan Banten Kidul.

(2) Tujuan pengembangan kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. mewujudkan kawasan Masyarakat Adat Baduy sebagai kawasan pariwisata budaya yang berkelanjutan dengan tetap menjaga nilai-nilai budaya Masyarakat Adat Baduy; dan
   b. mewujudkan kawasan Kaolotan Banten Kidul sebagai kawasan pariwisata budaya yang berkelanjutan.

(3) Arahan Pengembangan kawasan startegis dari sudut kepentingan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. pengembangan pariwisata kawasan Masyarakat Baduy; dan

b. pengembangan pariwisata, dan konservasi Kawasan Kaolotan Banten Kidul.

Bagian Keempat

Kawasan Strategis dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi

Pasal 62

(1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf c, berupa PLTP Gunung Endut.
(2) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mewujudkan PLTP Gunung Endut sebagai pembangkit listrik alternatif dalam pemenuhan kebutuhan listrik Daerah.
(3) Arahan pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung.

Bagian Kelima

Kawasan Stategis dari Sudut Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup

Pasal 63

(1) Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) huruf d, berupa kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Halimun Salak.
(2) Tujuan pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk mewujudkan

kawasan penyangga Taman Nasional Gunung Halimun Salak sebagai kawasan konservasi.

(3) Arahan pengembangan Kawasan Strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk pengembangan konservasi alam.

BAB VII
ARAHAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH DAERAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 64

Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, terdiri atas:

a. ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
b. indikasi program utama; dan
c. pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang.

Bagian Kedua
Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang
Pasal 65

(1) Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a, terdiri atas:
    a. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan berusaha;
    b. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan nonberusaha; dan
    c. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan yang bersifat strategis nasional.

(2) Pelaksanaan Ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
    a. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;

b. Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
c. Rekomendasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(3) Pelaksanaan ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Indikasi Program Utama

Paragraf 1

Umum

Pasal 66

(1) Indikasi program utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b, terdiri atas:
a. tahap I (2023-2024);
b. tahap II (2025-2029);
c. tahap III (2030-2034);
d. tahap IV (2035-2039); dan
e. tahap V (2040-2043).

(2) Indikasi program utama tahap I (2023-2024) dan tahap II (2025-2029) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b terdiri atas :
a. program utama:
b. lokasi;
c. sumber pendanaan;
d. instansi pelaksana; dan
e. waktu pelaksanaan.

(3) Program utama sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, berupa program pengembangan Wilayah Daerah untuk mewujudkan Struktur Ruang, Pola Ruang, dan Kawasan Strategis Kabupaten.

(4) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b, berupa tempat dimana program utama akan dilaksanakan.

(5) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c, dapat berasal dari :
   a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
   b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
   c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten; dan/atau
   d. sumber pendanaan lainnya.

(6) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d, terdiri atas :
   a. Pemerintah Pusat;
   b. Pemerintah Daerah Provinsi;
   c. Pemerintah Daerah Kabupaten;
   d. swasta;
   e. kerja sama pemerintah dan badan usaha;
   f. Masyarakat; dan
   g. sumber dana lainnya yang sah sesuai peraturan perundang-undangan.

(7) Waktu pelaksanaan sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e, mulai dari tahun 2023 sampai dengan tahun 2029.

(8) Indikasi program utama tahap kesatu dan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran XV dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 2

Indikasi Program Utama Tahap III Sampai Tahap V

Pasal 67

(1) Indikasi program utama tahap III (2030-2034) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf c terdiri atas:
   a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah;

b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Daerah; dan
c. perwujudan Kawasan Strategis Daerah.

(2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, terdiri atas:
a. perwujudan sistem pusat permukiman, terdiri atas:
1. pengembangan dan penataan PKW, terdiri atas:
a) pengembangan kawasan pusat pemerintahan Daerah;
b) pembangunan, pengembangan, dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas yang menunjang pusat permukiman;
c) peningkatan sarana rumah sakit umum daerah;
d) pengembangan prasarana perdagangan regional;
e) peningkatan dan pengembangan terminal;
f) peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan;
g) pengembangan prasarana dan sarana permukiman; dan
h) pengembangan dan peningkatan sarana sosial dan budaya perkotaan.
2. pengembangan dan penataan PKL, terdiri atas:
a) penyusunan RDTR;
b) pembangunan, pengembangan, dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas yang menunjang pusat permukiman;
c) pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
d) pengembangan dan peningkatan terminal penumpang dan barang;
e) pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan air minum;
f) pengembangan prasarana dan sarana permukiman; dan

g) pengembangan dan peningkatan sarana sosial dan budaya.

3. pengembangan dan penataan PPK, terdiri atas:
   a) penyusunan RDTR;
   b) pembangunan, pengembangan, dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas yang menunjang pusat permukiman;
   c) peningkatan sarana pelayanan kesehatan;
   d) peningkatan sarana pasar lingkungan;
   e) peningkatan kapasitas pelayanan air minum;
   f) pembangunan dan peningkatan terminal penumpang;
   g) pengembangan prasarana dan sarana permukiman;
   h) pengembangan dan peningkatan sarana sosial dan budaya; dan
   i) pengembangan prasarana dan sarana untuk mendukung pengembangan agroindustri dan agropolitan;
4. pengembangan dan penataan PPL, terdiri atas:
   a) pembangunan, pengembangan, dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas yang menunjang pusat permukiman;
   b) peningkatan sarana pelayanan kesehatan;
   c) peningkatan sarana pasar lingkungan;
   d) peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perdesaan;
   e) pengembangan prasarana dan sarana dasar permukiman;
   f) pengembangan prasarana dan sarana untuk mendukung pengembangan agroindustri dan agropolitan; dan
   g) pengembangan dan peningkatan sarana sosial dan budaya.

b. perwujudan sistem jaringan transportasi, terdiri atas:

1. perwujudan jalan umum, terdiri atas:
   a) pengembangan dan pemeliharaan jaringan Jalan Arteri Primer;
   b) pengembangan dan pemeliharaan jaringan Jalan Kolektor Primer;
   c) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan jalan lokal primer dan lokal sekunder;
   d) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalan lingkungan primer; dan
   e) pembangunan sistem jaringan transportasi angkutan massal cepat terpadu berbasis jalan.
2. perwujudan terminal penumpang, terdiri atas :
   a) peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe A;
   b) peningkatan Terminal Penumpang Tipe B menjadi Tipe A;
   c) pengembangan Terminal Penumpang Tipe A;
   d) peningkatan Terminal Penumpang Tipe C menjadi Tipe B;
   e) pengembangan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B;
   f) pengembangan, dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C;
   g) pembangunan dan peningkatan sub terminal menjadi Terminal Penumpang Tipe C; dan
   h) kajian pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kecamatan Maja.
3. perwujudan Terminal Barang, berupa pengembangan Terminal Barang.
4. perwujudan sistem jaringan kereta api, terdiri atas:
   a) pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;

b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
c) pengembangan angkutan antarkota;
d) pengembangan jalur ganda dan elektrifikasi;
e) pengaktifan kembali Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
f) pembangunan Stasiun Penumpang Kota Baru Maja;
g) pengaktifan kembali dan pengembangan Stasiun Penumpang; dan
h) peningkatan pelayanan sarana dan prasarana Stasiun Penumpang.

5. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, terdiri atas:
a) pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
b) pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana terminal khusus;
c) pengembangan dan peningkatan pelabuhan Pangkalan Pendaratan Ikan menjadi Pelabuhan Perikanan Pantai
d) pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Perikanan Pantai mejadi Pelabuhan Perikanan Samudera; dan
e) pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan.

c. perwujudan sistem jaringan energi, terdiri atas:
1. peningkatan pasokan daya yang bersumber dari PLN Ranting Rangkasbitung;
2. pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berupa PLTA;
3. pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berupa PLTMH;
4. pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berupa PLTB;

5. pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berupa PLTP;
6. pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berupa EBT Hidro dan Biomasa;
7. pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan sarana pendukung;
8. peningkatan kapasitas pembangkit listrik eksisting;
9. peningkatan kapasitas dan pelayanan Gardu Listrik;
10. pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik berupa SUTET;
11. pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik berupa SUTT;
12. pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik berupa SUTM;
13. pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik berupa SUTR;

d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, terdiri atas:
   1. pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi;
   2. penataan dan pengaturan menara *Base Transceiver Station* (BTS);
   3. pembangunan dan pengembangan menara *Base Transceiver Station* (BTS);
   4. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan menara *Base Transceiver Station* (BTS);
   5. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Jaringan Tetap; dan
   6. pengembangan fasilitas internet gratis pada fasilitas publik.

e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, terdiri atas:

1. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
2. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir;
4. pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan bangunan sumber daya air;
5. kajian pembangunan bendungan Pasir Kopo;
6. kajian pembangunan bendungan Leuwi Kopo;
7. kajian pembangunan bendungan Cilawang;
8. pengelolaan jaringan sumber daya air lintas provinsi;
9. pengelolaan daerah aliran sungai lintas Daerah; dan
10. pengelolaan dan pengembangan cekungan air tanah.

f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri atas :

1. perwujudan SPAM, terdiri atas:
   a) pengembangan Jaringan Air Baku;
   b) pengembangan Unit Air Baku;
   c) pengembangan Unit Produksi;
   d) pengembangan Unit Distribusi;
   e) pengembangan Sumur Pompa;
   f) pengembangan Bak Penampungan Air Hujan;
   g) pengembangan sistem unit produksi air minum; dan
   h) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas SPAM
2. perwujudan SPAL, terdiri atas:
   a) pengembangan infrastruktur SPAL non domestik;
   b) pengembangan infrastruktur SPAL domestik;
   c) pengembangan jaringan SPAL domestik;

d) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas sistem pengelolaan air limbah; dan
e) pengembangan instalasi pengolah lumpur tinja.

3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdiri atas:
   a) pengembangan prasarana pengolahan limbah industri;
   b) pengembangan prasarana pengolahan limbah medis; dan
   c) pengembangan prasarana pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
4. perwujudan sistem jaringan persampahan, terdiri atas:
   a) pembangunan dan pengembangan TPS;
   b) pengembangan TPA;
   c) pembangunan dan pengembangan TPST;
   d) kajian pembangunan dan pengembangan TPST Cilulumpang;
   e) kajian pembangunan dan pengembangan TPST Gn. Kukulu;
   f) kajian pembangunan dan pengembangan TPST Gn. Padu;
   g) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas sistem jaringan persampahan;
   h) peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan; dan
   i) pengembangan pengelolaan sampah *reduce, reuse, recycle*.
5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, terdiri atas:
   a) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana banjir tingkat tinggi;

b) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi tingkat tinggi;
c) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana longsor tingkat tinggi;
d) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana likuefaksi tingkat sedang dan tingkat tinggi;
e) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana tsunami tingkat tinggi;
f) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana banjir tingkat tinggi;
g) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi tingkat tinggi;
h) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana longsor tingkat tinggi;
i) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana likuefaksi tingkat sedang dan tingkat timggi;
j) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana tsunami tingkat tinggi;
k) pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
l) pengembangan sistem pengelolaan kawasan rawan bencana.

6. perwujudan sistem drainase, terdiri atas:
a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer; dan
b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder.

(3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
a. perwujudan Kawasan Lindung, terdiri atas:
1. perwujudan kawasan Badan Air, terdiri atas:
a) operasional dan pemeliharaan Badan Air berupa sungai, danau, embung dan waduk;
b) pengembangan tanggul di Badan Air berupa sungai, danau, embung dan waduk;

c) pengelolaan hidrologi dan kualitas air pada Badan Air berupa sungai, danau, embung dan waduk; dan

d) pengendalian kegiatan budi daya di kawasan Badan Air berupa sungai, danau, embung dan waduk.

2. perwujudan kawasan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya berupa Kawasan Hutan Lindung, terdiri atas :

a) pengawasan dan pematauan dalam rangka mencegah penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;

b) rehabilitasi dan reklamasi Kawasan Hutan Lindung;

c) penetapan dan pengembangan kawasan resapan air;

d) pelestarian, pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan adat sebagai cagar budaya

e) sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat sekitar Kawasan Hutan Lindung dalam upaya pelestarian kawasan hutan lindung; dan

f) pengendalian kegiatan Budi Daya di kawasan hutan lindung.

3. Perwujudan kawasan konservasi berupa Taman Nasional, terdiri atas :

a) rehabitiasi kawasan konservasi sebagai upaya pelestarian;

b) pengawasan dan pemantauan kawasan taman nasional;

c) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;

d) pelestarian, pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan adat sebagai cagar budaya

e) pengendalian kegiatan budi daya pada kawasan taman nasional; dan

f) sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat sekitar dalam upaya pelestarian taman nasional.

4. perwujudan Kawasan Cagar Budaya, terdiri atas:

a) pelestarian, pengembangan dan pengelolaan kawasan cagar budaya;

b) pengendalian dan perlindungan Kawasan Cagar Budaya;

c) pengendalian kegiatan budi daya pada kawasan hutan adat agar tidak mengganggu fungsi utama Kawasan Cagar Budaya; dan

d) pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan dalam upaya pelestarian Kawasan Cagar Budaya.

b. perwujudan Kawasan Budi Daya, terdiri atas:

1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, terdiri atas:

a) rehabilitasi dan reklamasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

b) pengawasan dan pemantauan dalam rangka mencegah penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

c) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;

d) pembinaan dan sosialisasi kepada Masyarakat sekitar dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas;

e) pengembangan hutan tanaman rakyat;

f) pengembangan budi daya wana tani sebagai lumbung ketahanan pangan dan rehabilitasi lahan;

g) pelestarian, pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan adat sebagai cagar budaya;
h) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
i) pengendalian kegiatan budi daya pada kawasan Hutan Produksi Terbatas agar tidak mengganggu fungsi utama kawasan.

2. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap, terdiri atas:
a) rehabilitasi dan reklamasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
b) pengawasan dan pemantauan dalam rangka mencegah penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Tetap;
c) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
d) pembinaan dan sosialisasi kepada Masyarakat sekitar dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Tetap;
e) pengembangan hutan tanaman rakyat;
f) pengembangan budi daya wana tani sebagai lumbung ketahanan pangan dan rehabilitasi lahan;
g) pelestarian, pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan adat sebagai cagar budaya;
h) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
i) pengendalian kegiatan budi daya pada kawasan Hutan Produksi Tetap agar tidak mengganggu fungsi utama kawasan.

3. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat, terdiri atas:
   a) pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
   b) rehabilitasi Kawasan Perkebunan Rakyat yang rusak;
   c) peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat;
   d) pelestarian, pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan adat sebagai cagar budaya;
   e) pengendalian dan pengawasan kegiatan budi daya di sekitar Kawasan Perkebunan Rakyat; dan
   f) sosialisasi dan pembinaan Masyarakat dalam rangka pengembangan kegiatan perkebunan.
4. perwujudan Kawasan Pertanian, terdiri atas:
   a) pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan;
   b) peningkatan produktivitas lahan tanaman pangan;
   c) pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian;
   d) intensifikasi dan diversifikasi pertanian di Kawasan Tanaman Pangan;
   e) pengembangan dan optimalisasi sistem jaringan irigasi di Kawasan Tanaman Pangan;
   f) pengendalian kegiatan budi daya di sekitar Kawasan Tanaman Pangan yang dapat mengurangi fungsi utama kawasan;
   g) penyusunan kebijakan insentif dan disinsentif pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
   h) pengembangan Kawasan Perkebunan;
   i) pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkebunan;

j) pengembangan dan peningkatan produksi komoditi unggulan perkebunan;
k) optimalisasi program penggunaan bibit unggul yang mendukung perkembangan perkebunan;
l) pengembangan agroindustri dengan fungsi yang didasarkan pada potensi perkebunan;
m) pelestarian, pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan adat sebagai cagar budaya
n) penataan dan pengendalian lokasi peternakan dan sentra produksi peternakan di Kawasan Pertanian;
o) pengembangan komoditas peternakan yang bernilai ekonomi tinggi di Kawasan Peternakan;
p) intensifikasi budi daya peternakan di Kawasan Peternakan;
q) pengembangan agropolitan di Kawasan Pertanian; dan
r) penelitian dan pengembangan pertanian di Kawasan Pertanian.

5. perwujudan Kawasan Perikanan Tangkap, terdiri atas:
   a) ekstensifikasi dan intensifikasi perikanan di kawasan perikanan;
   b) pengembangan prasarana dan sarana pendukung kawasan perikanan; dan
   c) pengendalian kegiatan perikanan tangkap yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung.
6. perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya, terdiri atas:
   a) ekstensifikasi dan intensifikasi perikanan di Kawasan Perikanan;
   b) pengembangan komoditas perikanan unggulan di Kawasan Perikanan;

c) pengembangan sentra budi daya perikanan di Kawasan Perikanan;
d) pengembangan pengelolaan balai benih ikan;
e) pengembangan prasarana dan sarana pendukung Kawasan Perikanan;
f) rehabilitasi Kawasan Perikanan budi daya untuk menjaga ekosistem sekitarnya; dan
g) pengendalian kegiatan perikanan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung.

7. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, terdiri atas:
a) pengembangan kawasan peruntukan industri yang berkelanjutan;
b) pengembangan dan peningkatan prasaran, sarana, dan utilitas di kawasan peruntukan industri;
c) pengembangan kawasan industri;
d) pengawasan dan pemantauan kegiatan industri untuk mencegah timbulnya dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya;
e) pengembangan dan penataan kawasan-kawasan industri berupa sentra industri kecil dan menengah; dan
f) monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana induk pengembangan industri kabupaten.

8. perwujudan Kawasan Pariwisata, terdiri atas:
a) monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana induk pengembangan pariwisata Daerah;
b) penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya;
c) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di lokasi pariwisata;
d) peningkatan kualitas objek wisata;

e) pengelolaan lokasi pariwisata yang berkelanjutan;
f) pengembangan pemasaran dan promosi kawasan wisata dalam rangka memperluas pangsa pasar wisata;
g) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di lokasi pariwisata; dan
h) pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat sekitar obyek wisata sebagai upaya pengembangan pariwisata.

9. perwujudan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
a) pengembangan dan penataan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan;
b) pencadangan lahan untuk permukiman;
c) pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana lingkungan pendukung perumahan;
d) pengembangan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas permukiman;
e) penataan dan rehabiltasi kawasan permukiman kumuh;
f) pelestarian, pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan adat sebagai cagar budaya
g) pengendalian dan penataan kawasan permukiman di daerah sempadan sungai dan pantai; dan
h) monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pengembangan kawasan permukiman.

10. perwujudan Kawasan Pertahanan Dan Keamanan, terdiri atas:
a) penetapan batas atau deliniasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan; dan
b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

(4) Perwujudan rencana Kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, terdiri atas:

a. perwujudan Kawasan Strategis Daerah dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri atas:
   1. penyusunan rencana pengembangan kawasan agrowisata sekitar Bendungan Karian;
   2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas perkotaan kawasan Kota Baru Maja; dan
   3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas koridor Rangkasbitung – Cibadak, Citeras, Warunggunung – Cikulur – Cileles.

b. perwujudan Kawasan Strategis Daerah dari sudut kepentingan sosial budaya, terdiri atas:
   1. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan adat Baduy;
   2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan adat Baduy;
   3. rehabiltasi dan revitalisasi kawasan Kaolotan Banten Kidul; dan
   4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan Kaolotan Banten Kidul.

c. perwujudan Kawasan Strategis Daerah dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, terdiri atas:
   1. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas PLTP Gunung Endut; dan
   2. penataan kawasan PLTP Gunung Endut.

d. perwujudan Kawasan Strategis Daerah dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, terdiri atas:
   1. rehabilitasi hutan pada sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak; dan
   2. pengendalian dan pengawasan sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak

Pasal 68

(1) Indikasi program utama tahap IV (2035-2039) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf d terdiri atas:
   a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah;
   b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Daerah; dan
   c. perwujudan Kawasan Strategis Daerah.

(2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, terdiri atas:
   a. perwujudan sistem pusat permukiman, terdiri atas:
      1. pengembangan dan penataan PKW, terdiri atas:
         a) pengembangan kawasan pusat pemerintahan Daerah;
         b) pembangunan, pengembangan, dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas yang menunjang pusat permukiman;
         c) peningkatan sarana rumah sakit umum daerah;
         d) pengembangan prasarana perdagangan regional;
         e) peningkatan dan pengembangan terminal;
         f) peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan; dan
         g) pengembangan prasarana dan sarana permukiman.
      2. pengembangan dan penataan PKL, terdiri atas:
         a) pembangunan, pengembangan, dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas yang menunjang pusat permukiman;
         b) pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
         c) pengembangan dan peningkatan terminal penumpang dan barang;

d) pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan air minum ;
e) pengembangan prasarana dan sarana permukiman; dan
f) pengembangan dan peningkatan sarana sosial dan budaya.

3. pengembangan dan penataan PPK, terdiri atas:
a) penyusunan RDTR;
b) pembangunan, pengembangan, dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas yang menunjang pusat permukiman;
c) peningkatan kapasitas pelayanan air minum;
d) Peningkatan sarana pelayanan kesehatan;
e) Peningkatan sarana pasar lingkungan;
f) pembangunan dan peningkatan terminal penumpang;
g) pengembangan prasarana dan sarana permukiman;
h) pengembangan dan peningkatan sarana sosial dan budaya; dan
i) pengembangan prasarana dan sarana untuk mendukung pengembangan agroindustri dan agropolitan.

4. pengembangan dan penataan PPL, terdiri atas:
a) pembangunan, pengembangan, dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas yang menunjang pusat permukiman;
b) peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perdesaan;
c) pengembangan prasarana dan sarana dasar permukiman;
d) pengembangan prasarana dan sarana untuk mendukung pengembangan agroindustri dan agropolitan; dan

e) pengembangan dan peningkatan sarana sosial dan budaya.

b. perwujudan sistem jaringan transportasi, terdiri atas:

1. perwujudan Jalan umum, terdiri atas:
   a) pengembangan dan pemeliharaan jaringan Jalan Arteri Primer;
   b) pengembangan dan pemeliharaan jaringan Jalan Kolektor Primer;
   c) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan Jalan Lokal Primer dan lokal sekunder;
   d) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan Jalan Lingkungan Primer; dan
   e) pembangunan sistem jaringan transportasi angkutan massal cepat terpadu berbasis jalan.
2. perwujudan Jalan Tol, berupa pembangunan dan pemeliharaan Jalan Tol.
3. Pembangunan Sistem Jaringan Trasnportasi Angkutan Massal Cepat Terpadu Berbasis Jalan.
4. perwujudan terminal penumpang, terdiri atas :
   a) peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe A;
   b) peningkatan Terminal Penumpang Tipe B menjadi Tipe A;
   c) pengembangan Terminal Penumpang Tipe A;
   d) peningkatan Terminal Penumpang Tipe C menjadi Tipe B;
   e) pengembangan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B;
   f) pengembangan, dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C;
   g) pembangunan dan peningkatan sub terminal menjadi Terminal Penumpang Tipe C; dan

h) kajian pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kecamatan Maja.

5. perwujudan Terminal Barang, berupa pengembangan Terminal Barang.
6. perwujudan sistem jaringan kereta api, terdiri atas:
   a) pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
   b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
   c) pengembangan angkutan antarkota;
   d) pengembangan jalur ganda dan elektrifikasi;
   e) pengaktifan kembali Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
   f) pengaktifan kembali dan pengembangan Stasiun Penumpang; dan
   g) peningkatan pelayanan sarana dan prasarana Stasiun Penumpang.
7. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, terdiri atas:
   a) pembangunan dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal;
   b) pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Terminal Khusus;
   c) pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Perikanan Pantai mejadi Pelabuhan Perikanan Samudera
   d) pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan.

c. perwujudan sistem jaringan energi, terdiri atas:
   1. pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berupa PLTA;
   2. pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berupa PLTMH;
   3. pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berupa PLTB;

4. pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berupa PLTP;
5. pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berupa Pembangkit listrik lainnya;
6. pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan sarana pendukung;
7. peningkatan kapasitas pembangkit listrik eksisting;
8. peningkatan kapasitas dan pelayanan Gardu Listrik;
9. pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik berupa SUTET;
10. pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik berupa SUTT;
11. pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik berupa SUTM;
12. pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik berupa SUTR; dan

d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, terdiri atas:
   1. pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi;
   2. penataan dan pengaturan menara *Base Transceiver Station* (BTS);
   3. pembangunan dan pengembangan menara *Base Transceiver Station* (BTS);
   4. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan menara *Base Transceiver Station* (BTS);
   5. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan tetap; dan
   6. pengembangan fasilitas internet gratis pada fasilitas publik.

e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, terdiri atas:

1. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;
2. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir;
4. pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan bangunan sumber daya air;
5. kajian pembangunan bendungan Pasir Kopo;
6. kajian pembangunan bendungan Cilawang;
7. pengelolaan jaringan sumber daya air lintas provinsi;
8. pengelolaan daerah aliran sungai lintas Daerah; dan
9. pengelolaan dan pengembangan cekungan air tanah.

f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri atas:
   1. perwujudan SPAM, terdiri atas:
      a) pengembangan Jaringan Air Baku;
      b) pengembangan Unit Air Baku;
      c) pengembangan Unit Produksi;
      d) pengembangan Unit Distribusi;
      e) pengembangan Sumur Pompa;
      f) pengembangan Bak Penampungan Air Hujan;
      g) pengembangan sistem unit produksi air minum; dan
      h) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas SPAM
   2. perwujudan SPAL, terdiri atas:
      a) pengembangan infrastruktur SPAL non domestik;
      b) pengembangan infrastruktur SPAL domestik;
      c) pengembangan jaringan SPAL domestik;

d) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas sistem pengelolaan air limbah; dan
e) pengembangan instalasi pengolah lumpur tinja.

3. perwujudan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdiri atas:
   a) pengembangan prasarana pengolahan limbah industri;
   b) pengembangan prasarana pengolahan limbah medis; dan
   c) pengembangan prasarana pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
4. perwujudan sistem jaringan persampahan, terdiri atas:
   a) pembangunan dan pengembangan TPS;
   b) Kajian Pembangunan dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Gn. Kukulu
   c) Kajian Pembangunan dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Gn. Padu
   d) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas sistem jaringan persampahan;
   e) peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan; dan
   f) pengembangan pengelolaan sampah *reduce, reuse, recycle*
5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, terdiri atas :
   a) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana banjir tingkat tinggi;
   b) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi tingkat tinggi;

c) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana longsor tingkat tinggi;
d) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana likuefaksi tingkat sedang dan tingkat tinggi;
e) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana tsunami tingkat tinggi;
f) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana banjir tingkat tinggi;
g) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi tingkat tinggi;
h) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana longsor tingkat tinggi;
i) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana likuefaksi tingkat sedang dan tingkat timggi;
j) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana tsunami tingkat tinggi;
k) pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
l) pengembangan sistem pengelolaan kawasan rawan bencana.

6. perwujudan Sistem Drainase, terdiri atas:
a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer; dan
b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder.

(3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, terdiri atas:
a. perwujudan Kawasan Lindung, terdiri atas:
1. perwujudan kawasan Badan Air, terdiri atas:
a) operasional dan pemeliharaan Badan Air berupa sungai, danau, embung dan waduk;
b) pengembangan tanggul di Badan Air berupa sungai, danau, embung dan waduk;
c) pengelolaan hidrologi dan kualitas air pada Badan Air berupa sungai, danau, embung dan waduk; dan

d) pengendalian kegiatan budi daya di kawasan Badan Air berupa sungai, danau, embung dan waduk.

2. perwujudan kawasan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya berupa Kawasan Hutan Lindung, terdiri atas:
   a) pengawasan dan pemantauan dalam rangka mencegah penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
   b) rehabilitasi dan reklamasi Kawasan Hutan Lindung;
   c) penetapan dan pengembangan kawasan resapan air;
   d) pelestarian, pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan adat sebagai cagar budaya
   e) sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat sekitar Kawasan Hutan Lindung dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
   f) pengendalian kegiatan budi daya di Kawasan Hutan Lindung.
3. perwujudan kawasan konservasi berupa Taman Nasional, terdiri atas:
   a) rehabilitasi kawasan konservasi sebagai upaya pelestarian;
   b) pengawasan dan pemantauan kawasan Taman Nasional;
   c) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
   d) pelestarian, pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan adat sebagai cagar budaya;
   e) pengendalian kegiatan budi daya pada kawasan Taman Nasional; dan

f) sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat sekitar dalam upaya pelestarian Taman Nasional.

4. perwujudan Kawasan Cagar Budaya, terdiri atas:
   a) pelestarian, pengembangan dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
   b) pengendalian dan perlindungan Kawasan Cagar Budaya;
   c) pengendalian kegiatan budi daya pada kawasan hutan adat agar tidak mengganggu fungsi utama Kawasan Cagar Budaya; dan
   d) pemberdayaan Masyarakat di sekitar kawasan dalam upaya pelestarian Kawasan Cagar Budaya.

b. perwujudan Kawasan Budi Daya, terdiri atas:
   1. Perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, terdiri atas :
      a) rehabilitasi dan reklamasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
      b) pengawasan dan pematauan dalam rangka mencegah penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
      c) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
      d) pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
      e) pengembangan hutan tanaman rakyat;
      f) pengembangan budi daya wana tani sebagai lumbung ketahanan pangan dan rehabilitasi lahan;
      g) pelestarian, pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan adat sebagai cagar budaya;

h) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan

i) pengendalian kegiatan budi daya pada kawasan Hutan Produksi Terbatas agar tidak mengganggu fungsi utama kawasan;

2. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap, terdiri atas :

a) rehabilitasi dan reklamasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;

b) pengawasan dan pematauan dalam rangka mencegah penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Tetap;

c) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;

d) pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Tetap;

e) pengembangan hutan tanaman rakyat;

f) pengembangan budi daya wana tani sebagai lumbung ketahanan pangan dan rehabilitasi lahan;

g) pelestarian, pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan adat sebagai cagar budaya;

h) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan

i) pengendalian kegiatan budi daya pada kawasan Hutan Produksi Tetap agar tidak mengganggu fungsi utama kawasan.

3. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat, terdiri atas:

a) pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;

b) rehabilitasi Kawasan Perkebunan Rakyat yang rusak;
c) peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat;
d) pelestarian, pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan adat sebagai cagar budaya;
e) pengendalian dan pengawasan kegiatan budi daya di sekitar Kawasan Perkebunan Rakyat; dan
f) sosialisasi dan pembinaan Masyarakat dalam rangka pengembangan kegiatan perkebunan.

4. perwujudan Kawasan Pertanian, terdiri atas:
a) pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan;
b) peningkatan produktivitas lahan tanaman pangan;
c) pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian;
d) intensifikasi dan diversifikasi pertanian di Kawasan Tanaman Pangan;
e) pengembangan dan optimalisasi sistem jaringan irigasi di Kawasan Tanaman Pangan;
f) pengendalian kegiatan budi daya di sekitar kawasan tanaman pangan yang dapat mengurangi fungsi utama kawasan;
g) penyusunan kebijakan insentif dan disinsentif pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
h) pengembangan Kawasan Perkebunan;
i) pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkebunan;
j) pengembangan dan peningkatan produksi komoditi unggulan perkebunan;
k) optimalisasi program penggunaan bibit unggul yang mendukung perkembangan perkebunan;

l) pengembangan agroindustri dengan fungsi yang didasarkan pada potensi perkebunan;
m) pelestarian, pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan adat sebagai cagar budaya;
n) penataan dan pengendalian lokasi peternakan dan sentra produksi peternakan di kawasan pertanian;
o) pengembangan komoditas peternakan yang bernilai ekonomi tinggi di Kawasan Peternakan;
p) intensifikasi budi daya peternakan di Kawasan Peternakan;
q) pengembangan agropolitan di kawasan pertanian; dan
r) penelitian dan pengembangan pertanian di kawasan pertanian.

5. perwujudan Kawasan Perikanan Tangkap, terdiri atas:
   a) ekstensifikasi dan intensifikasi perikanan di kawasan perikanan;
   b) pengembangan prasarana dan sarana pendukung kawasan perikanan; dan
   c) pengendalian kegiatan perikanan tangkap yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung.
6. perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya, terdiri atas:
   a) ekstensifikasi dan intensifikasi perikanan di kawasan perikanan;
   b) pengembangan komoditas perikanan unggulan di kawasan perikanan;
   c) pengembangan sentra budi daya perikanan di kawasan perikanan;
   d) pengembangan pengelolaan balai benih ikan;

e) pengembangan prasarana dan sarana pendukung kawasan perikanan;
f) rehabilitasi Kawasan Perikanan Budi Daya untuk menjaga ekosistem sekitarnya; dan
g) pengendalian kegiatan perikanan budi daya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung.

7. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, terdiri atas:
   a) pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang berkelanjutan;
   b) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri;
   c) pengembangan kawasan industri;
   d) pengawasan dan pemantauan kegiatan industri untuk mencegah timbulnya dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya;
   e) pengembangan dan penataan kawasan-kawasan industri berupa sentra industri kecil dan menengah; dan
   f) monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana induk pengembangan industri Kabupaten.
8. perwujudan Kawasan Pariwisata, terdiri atas:
   a) monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana induk pengembangan pariwisata Daerah;
   b) penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya;
   c) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Lokasi Pariwisata;
   d) peningkatan kualitas objek wisata;
   e) pengelolaan Lokasi Pariwisata yang berkelanjutan;

f) pengembangan pemasaran dan promosi kawasan wisata dalam rangka memperluas pangsa pasar wisata;
g) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Lokasi Pariwisata; dan
h) pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat sekitar obyek wisata sebagai upaya pengembangan pariwisata.

9. perwujudan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan dan perdesaan;
b) pencadangan lahan untuk permukiman;
c) pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana lingkungan pendukung perumahan;
d) pengembangan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas permukiman;
e) penataan dan rehabilitasi kawasan permukiman kumuh;
f) pelestarian, pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan adat sebagai cagar budaya;
g) pengendalian dan penataan kawasan permukiman di daerah sempadan sungai dan pantai; dan
h) monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pengembangan kawasan permukiman.

10. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, terdiri atas :
a) Penetapan batas atau deliniasi kawasan pertahanan dan keamanan; dan
b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

(4) Perwujudan rencana Kawasan Strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, terdiri atas:

a. perwujudan Kawasan Strategis Daerah dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri atas:
   1. penyusunan rencana pengembangan kawasan agrowisata sekitar Bendungan Karian;
   2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas perkotaan kawasan Kota Baru Maja; dan
   3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas koridor Rangkasbitung – Cibadak, Citeras, Warunggunung – Cikulur – Cileles.
b. perwujudan Kawasan Strategis Daerah dari sudut kepentingan sosial budaya, terdiri atas:
   1. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan adat Baduy;
   2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan adat Baduy;
   3. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan Kaolotan Banten Kidul; dan
   4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan Kaolotan Banten Kidul.
c. perwujudan Kawasan Strategis Daerah dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, terdiri atas:
   1. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas PLTP Gunung Endut; dan
   2. penataan kawasan PLTP Gunung Endut.
d. perwujudan Kawasan Strategis Daerah dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, terdiri atas:
   1. rehabilitasi hutan pada sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak; dan
   2. pengendalian dan pengawasan sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak.

Pasal 69

(1) Indikasi program utama tahap V (2040-2043) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (1) huruf e terdiri atas:

a. perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah;
b. perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Daerah; dan
c. perwujudan Kawasan Strategis Daerah.

(2) Perwujudan rencana Struktur Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a, terdiri atas:
a. perwujudan sistem pusat permukiman, terdiri atas:
1. pengembangan dan penataan PKW, terdiri atas:
a) pengembangan kawasan pusat pemerintahan Daerah;
b) pembangunan, pengembangan, dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas yang menunjang pusat permukiman;
c) peningkatan sarana rumah sakit umum Daerah;
d) pengembangan prasarana perdagangan regional;
e) peningkatan dan pengembangan terminal;
f) peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan;
g) pengembangan prasarana dan sarana permukiman;
2. pengembangan dan penataan PKL, tediri atas:
a) pembangunan, pengembangan, dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas yang menunjang pusat permukiman;
b) pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan;
c) pengembangan dan peningkatan terminal penumpang dan barang;
d) pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan air minum;
e) pengembangan prasarana dan sarana permukiman; dan

f) pengembangan dan peningkatan sarana sosial dan budaya.

3. pengembangan dan penataan PPK, terdiri atas:
   a) penyusunan RDTR;
   b) pembangunan, pengembangan, dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas yang menunjang pusat permukiman;
   c) Peningkatan sarana pelayanan kesehatan;
   d) Peningkatan sarana pasar lingkungan;
   e) peningkatan kapasitas pelayanan air minum;
   f) pembangunan dan peningkatan terminal penumpang;
   g) pengembangan prasarana dan sarana permukiman;
   h) pengembangan dan peningkatan sarana sosial dan budaya; dan
   i) pengembangan prasarana dan sarana untuk mendukung pengembangan agroindustri dan agropolitan.
4. pengembangan dan penataan PPL, terdiri atas:
   a) pembangunan, pengembangan, dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas yang menunjang pusat permukiman;
   b) Peningkatan sarana pelayanan kesehatan;
   c) Peningkatan sarana pasar lingkungan;
   d) peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perdesaan;
   e) pengembangan prasarana dan sarana dasar permukiman;
   f) pengembangan prasarana dan sarana untuk mendukung pengembangan agroindustri dan agropolitan; dan
   g) pengembangan dan peningkatan sarana sosial dan budaya.

b. perwujudan sistem jaringan transportasi, terdiri atas:

1. perwujudan Jalan umum, terdiri atas:
   a) pengembangan dan pemeliharaan jaringan Jalan Arteri Primer;
   b) pengembangan dan pemeliharaan jaringan Jalan Kolektor Primer;
   c) pembangunan, peningkatan dan pemeliharaan jaringan Jalan Lokal Primer dan Jalan Lokal Sekunder;
   d) pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan jaringan Jalan Lingkungan Primer; dan
   e) pembangunan sistem jaringan transportasi angkutan massal cepat terpadu berbasis jalan.
2. perwujudan Jalan Tol, berupa pembangunan dan pemeliharaan Jalan Tol.
3. Pembangunan Sistem Jaringan Trasnportasi Angkutan Massal Cepat Terpadu Berbasis Jalan.
4. perwujudan terminal penumpang, terdiri atas:
   a) peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe A;
   b) peningkatan Terminal Penumpang Tipe B menjadi Tipe A;
   c) pengembangan Terminal Penumpang Tipe A;
   d) peningkatan Terminal Penumpang Tipe C menjadi Tipe B;
   e) pengembangan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B;
   f) pengembangan, dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C;
   g) pembangunan dan peningkatan sub terminal menjadi Terminal Penumpang Tipe C; dan
   h) kajian pembangunan Terminal Penumpang Tipe B di Kecamatan Maja.
5. perwujudan Terminal Barang, berupa pengembangan Terminal Barang.

6. perwujudan sistem jaringan kereta api, terdiri atas:
    a) pembangunan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
    b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
    c) pengembangan angkutan antarkota;
    d) pengembangan jalur ganda dan elektrifikasi;
    e) pengaktifan kembali Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota;
    f) pengaktifan kembali dan pengembangan Stasiun Penumpang; dan
    g) peningkatan pelayanan sarana dan prasarana Stasiun Penumpang.
7. perwujudan sistem jaringan transportasi laut, terdiri atas:
    a) pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana Terminal Khusus;
    b) pengembangan dan peningkatan Pelabuhan Perikanan Pantai mejadi Pelabuhan Perikanan Samudera; dan
    c) pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan.

c. perwujudan sistem jaringan energi, terdiri atas:
1. Peningkatan pasokan daya listrik yang bersumber dari PLN Ranting Kecamatan Rangkasbitung secara bertahap hingga menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Lebak;
2. pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berupa PLTA;
3. pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berupa PLTMH;
4. pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berupa PLTB;
5. pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berupa PLTP;

6. pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berupa Pembangkit listrik lainnya;
7. pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan sarana pendukung;
8. peningkatan kapasitas pembangkit listrik eksisting;
9. peningkatan kapasitas dan pelayanan Gardu Listrik;
10. pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik berupa SUTET;
11. pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik berupa SUTT;
12. pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik berupa SUTM;
13. pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik berupa SUTR; dan

d. perwujudan sistem jaringan telekomunikasi, terdiri atas:
   1. pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi;
   2. penataan dan pengaturan menara *Base Transceiver Station* (BTS);
   3. pembangunan dan pengembangan menara *Base Transceiver Station* (BTS);
   4. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan menara *Base Transceiver Station* (BTS);
   5. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan tetap; dan
   6. pengembangan fasilitas internet gratis pada fasilitas publik.

e. perwujudan sistem jaringan sumber daya air, terdiri atas:
   1. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Primer;

2. pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan Jaringan Irigasi Sekunder;
3. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan Bangunan Pengendalian Banjir;
4. pengembangan, peningkatan, dan pemeliharaan bangunan sumber daya air;
5. kajian pembangunan bendungan Pasir Kopo;
6. kajian pembangunan bendungan Cilawang;
7. pengelolaan jaringan sumber daya air lintas provinsi;
8. pengelolaan daerah aliran sungai lintas Daerah; dan
9. pengelolaan dan pengembangan cekungan air tanah.

f. perwujudan sistem jaringan prasarana lainnya, terdiri atas:
   1. perwujudan SPAM, terdiri atas :
      a) pengembangan Jaringan Air Baku;
      b) pengembangan Unit Air Baku;
      c) pengembangan Unit Produksi;
      d) pengembangan Unit Distribusi;
      e) pengembangan Sumur Pompa;
      f) pengembangan Bak Penampungan Air Hujan;
      g) pengembangan sistem unit produksi air minum; dan
      h) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas SPAM
   2. perwujudan SPAL, terdiri atas:
      a) pengembangan infrastruktur SPAL non domestik;
      b) pengembangan infrastruktur SPAL domestik;
      c) pengembangan jaringan SPAL domestik;
      d) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas sistem pengelolaan air limbah; dan

e) pengembangan instalasi pengolah lumpur tinja.

3. perwujudan sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), terdiri atas:
   a) pengembangan prasarana pengolahan limbah industri;
   b) pengembangan prasarana pengolahan limbah medis; dan
   c) pengembangan prasarana pengolahan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
4. perwujudan sistem jaringan persampahan, terdiri atas:
   a) Kajian Pembangunan dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Gn. Kukulu
   b) Kajian Pembangunan dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Gn. Padu
   c) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas sistem jaringan persampahan;
   d) peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan; dan
   e) pengembangan pengelolaan sampah *reduce, reuse, recycle*
5. perwujudan sistem jaringan evakuasi bencana, terdiri atas:
   a) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana banjir tingkat tinggi;
   b) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana gempa bumi tingkat tinggi;
   c) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana longsor tingkat tinggi;
   d) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana likuefaksi tingkat sedang dan tingkat tinggi;

e) pengembangan Jalur Evakuasi Bencana tsunami tingkat tinggi;
f) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana banjir tingkat tinggi;
g) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana gempa bumi tingkat tinggi;
h) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana longsor tingkat tinggi;
i) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana likuefaksi tingkat sedang dan tingkat timggi;
j) pengembangan Tempat Evakuasi Bencana tsunami tingkat tinggi;
k) pengembangan sistem mitigasi bencana; dan
l) pengembangan sistem pengelolaan kawasan rawan bencana.

6. perwujudan sistem drainase, terdiri atas:
a) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Primer; dan
b) pengembangan dan pemeliharaan Jaringan Drainase Sekunder.

(3) Perwujudan rencana Pola Ruang Wilayah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b, terdiri atas:
a. perwujudan Kawasan Lindung, terdiri atas :
1. perwujudan kawasan Badan Air, terdiri atas:
a) operasional dan pemeliharaan Badan Air berupa sungai, danau, embung dan waduk;
b) pengembangan tanggul di Badan Air berupa sungai, danau, embung dan waduk;
c) pengelolaan hidrologi dan kualitas air pada Badan Air berupa sungai, danau, embung dan waduk; dan
d) pengendalian kegiatan budi daya di kawasan Badan Air berupa sungai, danau, embung dan waduk.

2. perwujudan kawasan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya berupa Kawasan Hutan Lindung, terdiri atas:
   a) pengawasan dan pemantauan dalam rangka mencegah penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung;
   b) rehabilitasi dan reklamasi Kawasan Hutan Lindung;
   c) penetapan dan pengembangan kawasan resapan air;
   d) pelestarian, pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan adat sebagai cagar budaya
   e) sosialisasi dan pembinaan kepada Masyarakat sekitar Kawasan Hutan Lindung dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
   f) pengendalian kegiatan budi daya di Kawasan Hutan Lindung.
3. perwujudan kawasan konservasi berupa Taman Nasional, terdiri atas:
   a) rehabilitasi kawasan konservasi sebagai upaya pelestarian;
   b) pengawasan dan pemantauan kawasan Taman Nasional;
   c) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
   d) pelestarian, pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan adat sebagai cagar budaya;
   e) pengendalian kegiatan budi daya pada kawasan Taman Nasional; dan
   f) sosialisasi dan pembinaan kepada Masyarakat sekitar dalam upaya pelestarian Taman Nasional.
4. perwujudan Kawasan Cagar Budaya, terdiri atas:

a) pelestarian, pengembangan dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya;
b) pengendalian dan perlindungan Kawasan Cagar Budaya;
c) pengendalian kegiatan budi daya pada kawasan hutan adat agar tidak mengganggu fungsi utama Kawasan Cagar Budaya; dan
d) pemberdayaan Masyarakat di sekitar kawasan dalam upaya pelestarian Kawasan Cagar Budaya.

b. perwujudan Kawasan Budi Daya, terdiri atas:
1. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Terbatas, terdiri atas :
a) rehabilitasi dan reklamasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
b) pengawasan dan pemantauan dalam rangka mencegah penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
c) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
d) pembinaan dan sosialisasi kepada Masyarakat sekitar dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
e) pengembangan hutan tanaman rakyat;
f) pengembangan budi daya wana tani sebagai lumbung ketahanan pangan dan rehabilitasi lahan;
g) pelestarian, pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan adat sebagai cagar budaya;
h) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan

i) pengendalian kegiatan budi daya pada kawasan Hutan Produksi Terbatas agar tidak mengganggu fungsi utama kawasan.

2. perwujudan Kawasan Hutan Produksi Tetap, terdiri atas :
   a) rehabilitasi dan reklamasi Kawasan Hutan Produksi Tetap;
   b) pengawasan dan pemantauan dalam rangka mencegah penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Tetap;
   c) pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah;
   d) pembinaan dan sosialisasi kepada Masyarakat sekitar dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Tetap;
   e) pengembangan hutan tanaman rakyat;
   f) pengembangan budi daya wana tani sebagai lumbung ketahanan pangan dan rehabilitasi lahan;
   g) pelestarian, pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan adat sebagai cagar budaya
   h) pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam; dan
   i) pengendalian kegiatan budi daya pada kawasan Hutan Produksi Tetap agar tidak mengganggu fungsi utama kawasan.
3. perwujudan Kawasan Perkebunan Rakyat, terdiri atas:
   a) pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
   b) rehabilitasi Kawasan Perkebunan Rakyat yang rusak;

c) peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat;
d) pelestarian, pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan adat sebagai cagar budaya
e) pengendalian dan pengawasan kegiatan budi daya di sekitar Kawasan Perkebunan Rakyat; dan
f) sosialisasi dan pembinaan Masyarakat dalam rangka pengembangan kegiatan perkebunan.

4. perwujudan Kawasan Pertanian, terdiri atas:
a) pengembangan kawasan pertanian tanaman pangan;
b) peningkatan produktivitas lahan tanaman pangan;
c) pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian;
d) intensifikasi dan diversifikasi pertanian di kawasan tanaman pangan;
e) pengembangan dan optimalisasi sistem jaringan irigasi di kawasan tanaman pangan;
f) pengendalian kegiatan budi daya di sekitar kawasan tanaman pangan yang dapat mengurangi fungsi utama kawasan;
g) penyusunan kebijakan insentif dan disinsentif pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
h) pengembangan Kawasan Perkebunan;
i) pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkebunan;
j) pengembangan dan peningkatan produksi komoditi unggulan perkebunan;
k) optimalisasi program penggunaan bibit unggul yang mendukung perkembangan perkebunan;
l) pengembangan agroindustri dengan fungsi yang didasarkan pada potensi perkebunan;

m) pelestarian, pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan adat sebagai cagar budaya;
n) penataan dan pengendalian lokasi peternakan dan sentra produksi peternakan di kawasan pertanian;
o) pengembangan komoditas peternakan yang bernilai ekonomi tinggi di Kawasan Peternakan;
p) intensifikasi budi daya peternakan di Kawasan Peternakan;
q) pengembangan agropolitan di kawasan pertanian; dan
r) penelitian dan pengembangan pertanian di kawasan pertanian.

5. perwujudan Kawasan Perikanan Tangkap, terdiri atas:
   a) ekstensifikasi dan intensifikasi perikanan di kawasan perikanan;
   b) pengembangan prasarana dan sarana pendukung kawasan perikanan; dan
   c) pengendalian kegiatan perikanan tangkap yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung.
6. perwujudan Kawasan Perikanan Budi Daya, terdiri atas:
   a) ekstensifikasi dan intensifikasi perikanan di kawasan perikanan;
   b) pengembangan komoditas perikanan unggulan di kawasan perikanan;
   c) pengembangan sentra budi daya perikanan di kawasan perikanan;
   d) pengembangan pengelolaan balai benih ikan;
   e) pengembangan prasarana dan sarana pendukung kawasan perikanan;

f) rehabilitasi Kawasan Perikanan Budi Daya untuk menjaga ekosistem sekitarnya; dan
g) pengendalian kegiatan perikanan budidaya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung.

7. perwujudan Kawasan Peruntukan Industri, terdiri atas:
   a) pengembangan Kawasan Peruntukan Industri yang berkelanjutan;
   b) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Kawasan Peruntukan Industri;
   c) pengembangan kawasan industri;
   d) pengawasan dan pemantauan kegiatan industri untuk mencegah timbulnya dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya;
   e) pengembangan dan penataan kawasan-kawasan industri berupa sentra industri kecil dan menengah; dan
   f) monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana induk pengembangan industri Kabupaten.
8. perwujudan Kawasan Pariwisata, terdiri atas:
   a) monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana induk pengembangan pariwisata Daerah;
   b) penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya;
   c) pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di Lokasi Pariwisata;
   d) peningkatan kualitas objek wisata;
   e) pengelolaan Lokasi Pariwisata yang berkelanjutan;
   f) pengembangan pemasaran dan promosi kawasan wisata dalam rangka memperluas pangsa pasar wisata;

g) pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di Lokasi Pariwisata; dan
h) pembinaan dan pemberdayaan Masyarakat sekitar obyek wisata sebagai upaya pengembangan pariwisata.

9. perwujudan Kawasan Permukiman, terdiri atas:
a) pengembangan dan penataan Kawasan Permukiman Perkotaan dan perdesaan;
b) pencadangan lahan untuk permukiman;
c) pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana lingkungan pendukung perumahan;
d) pengembangan RTH paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas permukiman;
e) penataan dan rehabilitasi kawasan permukiman kumuh;
f) pelestarian, pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan adat sebagai cagar budaya;
g) pengendalian dan penataan kawasan permukiman di daerah sempadan sungai dan pantai; dan
h) monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana pengembangan kawasan permukiman.

10. perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan, terdiri atas :
a) Penetapan batas atau deliniasi kawasan pertahanan dan keamanan; dan
b) pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

(4) Perwujudan rencana Kawasan strategis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c, terdiri atas :
a. perwujudan Kawasan Strategis Daerah dari sudut kepentingan ekonomi, terdiri atas:
1. penyusunan rencana pengembangan kawasan agrowisata sekitar bendungan Karian;

2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas perkotaan kawasan Kota Baru Maja; dan
3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas koridor Rangkasbitung – Cibadak, Citeras, Warunggunung – Cikulur – Cileles.

b. perwujudan Kawasan Strategis Daerah dari sudut kepentingan sosial budaya, terdiri atas:
1. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan adat Baduy;
2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan adat Baduy;
3. rehabilitasi dan revitalisasi kawasan Kaolotan Banten Kidul; dan
4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan Kaolotan Banten Kidul.

c. perwujudan Kawasan Strategis Daerah dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan teknologi tinggi, terdiri atas:
1. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas PLTP Gunung Endut; dan
2. penataan kawasan PLTP Gunung Endut.

d. perwujudan Kawasan Strategis Daerah dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan, terdiri atas:
1. rehabilitasi hutan pada sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak; dan
2. pengendalian dan pengawasan sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak

Bagian Keempat

Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang

Pasal 70

(1) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf c dilakukan berdasarkan indikasi program utama yang termuat dalam RTRW Daerah melalui penyelarasan indikasi program

dengan program sektoral dan kewilayahan dalam dokumen rencana pembangunan secara terpadu.

(2) Dokumen sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi masukan untuk penyusunan rencana pembangunan dan pelaksanaan peninjauan kembali dalam rangka revisi RTRW Daerah.

(3) Sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menghasilkan dokumen sebagai berikut:
   a. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka menengah 5 (lima) tahunan; dan
   b. sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang jangka pendek 1 (satu) tahunan.

(4) Pelaksanaan sinkronisasi program Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
KETENTUAN PENGENDALIAN PEMANFAATAN RUANG WILAYAH DAERAH

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 71

(1) Ketentuan pengendalian Pemanfaatan Ruang Wilayah Daerah diselenggarakan melalui:
   a. Ketentuan Umum Zonasi;
   b. penilaian pelaksanaan pemanfaatan ruang;
   c. ketentuan insentif dan disinsentif; dan
   d. arahan sanksi.

(2) Pengendalian Pemanfaatan Ruang dilakukan oleh Forum Penataan Ruang bekerjasama dengan aparat Wilayah Kecamatan dan kelurahan/desa, serta melibatkan peran Masyarakat.

(3) Pendukung rujukan pengendalian Pemanfaatan Ruang yang lebih teknis, dalam penjabaran RTRW sebagai berikut:
   a. RDTR; dan
   b. dokumen pengendalian, antara lain peraturan zonasi, pengkajian rancangan, panduan rancang kota dan standar teknis yang ditetapkan.

Bagian Kedua

Ketentuan Umum Zonasi

Pasal 72

(1) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf a disusun sebagai arahan dalam penyusunan peraturan zonasi.
(2) Peraturan zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sebagai pedoman pengendalian pemanfaatan ruang, serta berdasarkan rencana rinci Tata Ruang untuk setiap zonasi Pemanfaatan Ruang.
(3) Ketentuan Umum Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
   a. Ketentuan Umum Zonasi Rencana Struktur Ruang;
   b. Ketentuan Umum Zonasi Rencana Pola Ruang;
   c. Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang.
(4) Ketentuan Umum Zonasi Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
   a. Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem pusat permukiman; dan
   b. Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan prasarana wilayah.
(5) Ketentuan Umum Zonasi Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi:
   a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Lindung; dan
   b. Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Budi Daya.

Pasal 73

Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem pusat permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) huruf a, meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi PKW;
b. Ketentuan Umum Zonasi PKL; dan
c. Ketentuan Umum Zonasi pusat-pusat lain.

Pasal 74

Ketentuan Umum Zonasi PKW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf a, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan perkotaan berskala lintas kabupaten/kota yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
    2. kegiatan pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan permukiman perkotaan yang terencana dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, kelerengan dan mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. kegiatan permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi yang dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
    3. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. kegiatan pembangunan fasilitas dan utilitas dengan menyediakan prasarana minimum secara proporsional sesuai jenis kegiatan;
    5. kegiatan cagar budaya, pariwisata, industri dan pertahanan keamanan yang memenuhi persyaratan

teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lingkungan;

6. kegiatan perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai dengan kondisi eksisting dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. pada setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman;
   2. kegiatan yang menghalangi dan/ atau menutup lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana;
   3. kegiatan yang menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun sosial budaya Masyarakat; dan
   4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang dapat mengganggu fungsi PKW.

Pasal 75

Ketentuan Umum Zonasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf b, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan perkotaan berskala Kabupaten atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
   2. kegiatan pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan permukiman perkotaan yang terencana dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, kelerengan dan mitigasi

bencana dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi yang dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
3. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. kegiatan pembangunan fasilitas dan utilitas dengan menyediakan prasarana minimum secara proposional sesuai jenis kegiatan;
5. kegiatan cagar budaya, pariwisata, industri dan pertahanan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lingkungan;
6. kegiatan perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai dengan kondisi eksisting dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. pada setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan
2. kegiatan yang menghalangi dan/ atau menutup lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana;
3. kegiatan yang menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun sosial budaya Masyarakat; dan
4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang dapat mengganggu fungsi PKL.

Pasal 76

Ketentuan Umum Zonasi pusat-pusat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 huruf c, terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi PPK; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi PPL.

Pasal 77

Ketentuan Umum Zonasi PPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf a, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan perkotaan berskala Kecamatan atau beberapa Kecamatan yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
    2. kegiatan pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan permukiman perkotaan yang terencana dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, kelerengan dan mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. kegiatan permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi yang dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
    3. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    4. kegiatan pembangunan fasilitas dan utilitas dengan menyediakan prasarana minimum secara proporsional sesuai jenis kegiatan;
    5. kegiatan cagar budaya, pariwisata, industri dan pertahanan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lingkungan;

6. kegiatan perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai dengan kondisi eksisting dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. pada setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan
   2. kegiatan yang menghalangi dan/ atau menutup lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana;
   3. kegiatan yang menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun sosial budaya Masyarakat; dan
   4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang dapat mengganggu fungsi PPK.

Pasal 78

Ketentuan Umum Zonasi PPL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 huruf b, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan perkotaan berskala antar desa yang mendukung kegiatan perekonomian, sosial, dan budaya; dan
   2. kegiatan pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan permukiman perkotaan yang terencana dengan mempertimbangkan daya dukung daya tampung lingkungan hidup, kelerengan dan mitigasi bencana dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan permukiman dengan intensitas pemanfaatan ruang sedang hingga tinggi yang dilengkapi fasilitas keselamatan lingkungan;
3. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. kegiatan pembangunan fasilitas dan utilitas dengan menyediakan prasarana minimum secara proporsional sesuai jenis kegiatan;
5. kegiatan cagar budaya, pariwisata, industri dan pertahanan keamanan yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan lingkungan;
6. kegiatan perkebunan rakyat, pertanian dan perikanan sesuai dengan kondisi eksisting dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. pada setiap kegiatan perdagangan dan jasa wajib menyediakan areal parkir dan areal bongkar muat yang proporsional dengan jenis kegiatan yang dilayani; dan
8. kawasan perdesaan diintegrasikan dengan pengembangan kawasan agropolitan dan minapolitan yang mendorong tumbuhnya pusat pelayanan pendukung kegiatan pertanian dan perikanan melalui sistem dan usaha agrobisnis untuk melayani, mendorong, dan menarik, kegiatan pembangunan usaha agrobisnis pertanian dan perikanan di Wilayah sekitarnya.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang tidak sesuai dan/atau dapat menurunkan kualitas lingkungan permukiman; dan
   2. kegiatan yang menghalangi dan/ atau menutup lokasi dan Jalur Evakuasi Bencana;

3. kegiatan yang menyebabkan dampak negatif terhadap lingkungan maupun sosial budaya Masyarakat; dan
4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c yang dapat mengganggu fungsi PPL.

Pasal 79

Ketentuan Umum Zonasi untuk sistem jaringan prasarana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (4) huruf b, terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan transportasi;
b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan energi;
c. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan telekomunikasi;
d. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan sumber daya air; dan
e. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana lainnya.

Pasal 80

Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf a, terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan Jalan;
b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan kereta api; dan
c. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan transportasi laut.

Pasal 81

Ketentuan Umum Zonasi kawasan sistem jaringan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf a terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan jaringan jalan;
b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan terminal penumpang; dan
c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan Terminal Barang.

Pasal 82

Ketentuan Umum Zonasi kawasan jaringan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf a, terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar sistem jaringan jalan umum; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan sistem jaringan Jalan Tol.

Pasal 83

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan di sekitar sistem jaringan jalan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf a, terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan Jalan Arteri Primer;
b. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan Jalan Kolektor Primer;
c. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan Jalan Lokal Primer;
d. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan Jalan Lokal Sekunder; dan
e. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan Jalan Lingkungan Primer.

Pasal 84

Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan Jalan Arteri Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf a, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan, kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan, dan

pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa penyediaan Ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan;
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa pelebaran Badan Jalan dan untuk kebutuhan ruang pengamanan; dan
4. kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. bangunan di sepanjang kawasan sekitar sistem jaringan jalan harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
   4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan Pemanfaatan Ruang di sepanjang sistem jaringan jalan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional; dan

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

Pasal 85

Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan Jalan Kolektor Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf b, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan, kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
   2. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa penyediaan ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan;
   3. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa pelebaran badan jalan dan untuk kebutuhan ruang pengamanan; dan
   4. kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. bangunan di sepanjang kawasan sekitar sistem jaringan jalan harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang di sepanjang kawasan sekitar sistem jaringan jalan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional; dan
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

Pasal 86

Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan Jalan Lokal Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf c, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan, kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa penyediaan ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan;
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa pelebaran Badan Jalan dan untuk kebutuhan Ruang pengamanan; dan
4. kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
   2. bangunan di sepanjang kawasan sekitar sistem jaringan jalan harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
   4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan Pemanfaatan Ruang di sepanjang kawasan sekitar sistem jaringan jalan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional; dan
   2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang

mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

Pasal 87

Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan Jalan Lokal Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf d, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan, kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan
    2. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa penyediaan ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan;
    3. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa pelebaran badan jalan dan untuk kebutuhan ruang pengamanan; dan
    4. kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. bangunan di sepanjang kawasan sekitar sistem jaringan jalan harus memiliki sempadan bangunan

yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan Pemanfaatan Ruang di sepanjang kawasan sekitar sistem jaringan jalan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional; dan
   2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

Pasal 88

Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan Jalan Lingkungan Primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 huruf e, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan, kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
   2. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa penyediaan ruang untuk pandangan bebas pengemudi,

pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan;

3. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa pelebaran Badan Jalan dan untuk kebutuhan ruang pengamanan; dan
4. kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. Pemanfaatan Ruang di sepanjang sisi jalan dengan tingkat intensitas menengah hingga tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. bangunan di sepanjang kawasan sekitar sistem jaringan jalan harus memiliki sempadan bangunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. pembangunan dan pengembangan sistem jaringan prasarana di daerah milik jalan dan daerah pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
   4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan Pemanfaatan Ruang di sepanjang kawasan sekitar sistem jaringan jalan yang dapat menimbulkan hambatan lalu lintas regional; dan
   2. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

Pasal 89

Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan Jalan Tol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 huruf b, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalan, kegiatan pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan, penempatan bangunan utilitas, pengembangan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengembangan RTH yang berfungsi sebagai lansekap jalan, dan pemanfaatan oleh moda transportasi lain bila diperlukan;
    2. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa penyediaan ruang untuk pandangan bebas pengemudi, pengamanan konstruksi jalan, dan pengamanan fungsi jalan;
    3. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa pelebaran Badan Jalan dan untuk kebutuhan ruang pengamanan; dan
    4. kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, sumber daya air, SPAM, SPAL, pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), jaringan persampahan, jaringan evakuasi bencana dan drainase.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pembangunan sarana komunikasi, sarana deteksi pengamanan lain yang memungkinkan pertolongan dengan segera sampai ke tempat kejadian, serta upaya pengamanan terhadap pelanggaran, kecelakaan, dan gangguan keamanan lainnya dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pembangunan tempat istirahat dan pelayanan untuk kepentingan pengguna Jalan Tol dengan persyaratan

teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. kegiatan pemasangan iklan secara terbatas;
4. pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sistem jaringan prasarana di Daerah milik jalan dan Daerah pengawasan jalan harus memperoleh izin dari penyelenggara jalan sesuai kewenangannya; dan
5. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan Pemanfaatan Ruang yang memanfaatkan ruang milik jalan dan ruang pengawasan jalan yang mengakibatkan terganggunya fungsi sistem jaringan jalan.

Pasal 90

Ketentuan Umum Zonasi terminal penumpang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf b berupa Terminal Penumpang Tipe A, Terminal Penumpang Tipe B, dan Terminal Penumpang C, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan terminal penumpang sesuai dengan tipenya;
   2. kegiatan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, persampahan dan jaringan drainase; dan
   3. kegiatan pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi terminal penumpang dan memperhatikan keselamatan dan keamanan;
   2. pemasangan jaringan utilitas, iklan dan media informasi dengan mempertimbangkan keselamatan

dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara terminal sesuai kewenangannya dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. Pemanfaatan Ruang untuk permukiman terutama perdagangan dan jasa dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan tipenya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan terminal penumpang.

Pasal 91

Ketentuan Umum Zonasi Terminal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 huruf c, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan terminal barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. kegiatan pemeliharaan jaringan transportasi, energi, telekomunikasi, persampahan dan jaringan drainase; dan
   3. kegiatan pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pemasangan jaringan utilitas, iklan dan media informasi dengan mempertimbangkan keselamatan dan keamanan serta wajib memperoleh izin dari penyelenggara terminal sesuai kewenangannya

dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas dilaksanakan sesuai dengan tipenya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan terminal barang.

Pasal 92

Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 huruf b terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi jaringan jalur kereta api; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi stasiun kereta api.

Pasal 93

Ketentuan Umum Zonasi jaringan jalur kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf a berupa Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan jalur kereta api; dan
   2. kegiatan pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. penggunaan ruang manfaat jalur kereta api untuk penempatan fasilitas operasi kereta api serta bangunan pelengkap lainnya dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. Pemanfaatan Ruang milik jalur kereta api untuk keperluan lain atas izin pemilik prasarana perkeretaapian dengan ketentuan tidak

membahayakan konstruksi jalan rel, fasilitas operasi kereta api, dan perjalanan kereta api dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

3. Pemanfaatan Ruang pengawasan jalur kereta api untuk kegiatan lain yang tidak membahayakan operasi kereta api dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. pembangunan jalan, jalur kereta api khusus, terusan, saluran air, dan/atau prasarana lain yang memerlukan persambungan, dan perpotongan dan/atau persinggungan dengan jalur kereta api untuk kepentingan umum dan tidak membahayakan keselamatan perjalanan kereta api dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pembangunan jalan rel di luar stasiun untuk menghubungkan antara stasiun dengan tempat bongkar muat barang dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan jalur kereta api; dan
   2. kegiatan pembangunan perlintasan sebidang tanpa izin dari instansi berwenang.

Pasal 94

Ketentuan Umum Zonasi stasiun kereta api sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 huruf b berupa Stasiun Penumpang, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. pembangunan dan optimalisasi Stasiun Penumpang untuk keterpaduan antar jaringan jalur kereta api dengan jaringan jalur kereta api lainnya serta dengan moda transportasi lainnya;
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan fasilitas Stasiun Penumpang; dan
    3. kegiatan pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan yang mendukung aktivitas pelayanan perkeretaapian;
    2. kegiatan yang memanfaatkan ruang di sekitar Stasiun Penumpang dengan memperhatikan rencana pengembangan perkeretaapian dan ketentuan keselamatan perkeretaapian; dan
    3. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Stasiun Penumpang.

Pasal 95

Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan transportasi laut sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 huruf c meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi Pelabuhan Pengumpan Lokal;
b. Ketentuan Umum Zonasi Terminal Khusus; dan
c. Ketentuan Umum Zonasi pelabuhan perikanan.

Pasal 96

Ketentuan Umum Zonasi Pelabuhan Pengumpan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf a, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan lokal.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. kegiatan Pemanfaatan Ruang di dalam daerah lingkungan kerja pelabuhan dan daerah lingkungan kepentingan pelabuhan harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Pelabuhan Pengumpan Lokal.

Pasal 97

Ketentuan Umum Zonasi Terminal Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf b, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Khusus.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
    1. kegiatan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. kegiatan bongkar muat barang sepanjang tidak mengganggu fungsi Terminal Khusus dan memperhatikan keselamatan dan keamanan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Terminal Khusus.

Pasal 98

Ketentuan Umum Zonasi pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 huruf c berupa Pelabuhan Perikanan Pantai dan Pangkalan Pendaratan Ikan, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pelabuhan perikanan;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas penunjang sesuai dengan ketentuan berlaku; dan
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pelabuhan perikanan.

Pasal 99

(1) Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi di sekitar jaringan infrastruktur ketenagalistrikan.
(2) Ketentuan Umum Zonasi jaringan infrastruktur ketenagalistrikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung; dan

b. Ketentuan Umum Zonasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung.

Pasal 100

Ketentuan Umum Zonasi infrastruktur pembangkit tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a, terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar PLTA;
b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar PLTB;
c. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar PLTP;
d. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar PLTMH; dan
e. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar pembangkit listrik lainnya.

Pasal 101

Ketentuan Umum Zonasi Pembangkit PLTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf a, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTA; dan
    2. pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perumahan kepadatan rendah pada kawasan di bawah jaringan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
    3. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

4. kegiatan pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu pembangkit listrik.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkit listrik

Pasal 102

Ketentuan Umum Zonasi PLTB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf b, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTB; dan
   2. kegiatan pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perumahan kepadatan rendah pada kawasan di bawah jaringan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
   3. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   4. kegiatan pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu pembangkit listrik.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat

mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkit listrik

Pasal 103

Ketentuan Umum Zonasi PLTP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf c, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTP; dan
   2. pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
   2. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan
   3. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu pembangkit listrik.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkit listrik.

Pasal 104

Ketentuan Umum Zonasi PLTMH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf d, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan PLTMH; dan

2. pengembangan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perumahan kepadatan rendah pada Kawasan di bawah jaringan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan;
   2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
   3. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   4. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu pembangkit listrik.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkit listrik.

Pasal 105

Ketentuan Umum Zonasi pembangkit listrik lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 huruf e, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkit listrik lainnya; dan
   2. pengembangan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan dan perumahan kepadatan

rendah pada kawasan di bawah jaringan listrik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Pemanfaatan Ruang di sekitar pembangkit tenaga listrik dengan memperhatikan jarak aman dari kegiatan lain;
3. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. pendirian pengaman jaringan dan papan peringatan dengan memperhatikan keamanan dan keselamatan kawasan sekitarnya serta tidak mengganggu pembangkit listrik.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan, berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan pembangkit listrik.

Pasal 106

Ketentuan Umum Zonasi jaringan infrastruktur penyaluran tenaga listrik dan sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf b, terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
b. Ketentuan Umum Zonasi jaringan distribusi tenaga listrik; dan
c. Ketentuan Umum Zonasi Gardu Listrik.

Pasal 107

Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf a, terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SUTET; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SUTT.

Pasal 108

Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SUTET sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf a, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTET;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan pengembangan RTH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan;
    2. Pemanfaatan Ruang di sekitar SUTET dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan; dan
    3. pendirian bangunan di sekitar SUTET memperhatikan ruang bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu ruang bebas dan operasional SUTET.

Pasal 109

Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar SUTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 107 huruf b, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTT.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan pengembangan RTH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan; dan

2. Pemanfaatan Ruang di sekitar SUTT dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan; dan
3. pendirian bangunan di sekitar SUTT memperhatikan ruang bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu ruang bebas dan operasional SUTT.

Pasal 110

Ketentuan Umum Zonasi jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf b berupa:

a. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar SUTM; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi di sekitar SUTR.

Pasal 111

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar SUTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf a, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTM.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa:
   1. kegiatan pengembangan RTH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan; dan
   2. Pemanfaatan Ruang disekitar SUTM dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan; dan
   3. pendirian bangunan di sekitar SUTM memperhatikan ruang bebas sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan dan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu ruang bebas dan operasional SUTM.

Pasal 112

Ketentuan Umum Zonasi di sekitar SUTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 huruf b, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SUTR;
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan pengembangan RTH dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pendirian bangunan di sekitar SUTM memperhatikan ruang bebas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu ruang bebas dan operasional SUTR.

Pasal 113

Ketentuan Umum Zonasi Gardu Listrik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 huruf c, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pengembangan RTH atau kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan Pemanfaatan Ruang yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Gardu Listrik.

Pasal 114

Ketentuan Umum Zonasi jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf c terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Tetap; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi jaringan bergerak.

Pasal 115

Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf a, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan tetap.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. jaringan kabel tanam dan/atau kabel udara pada penyelenggaraan jaringan tetap, ditempatkan pada bahu jalan setelah mendapat izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. kegiatan budi daya lainnya yang tidak mengganggu infrastruktur dan Jaringan Tetap;
    3. pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    4. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan tetap.

Pasal 116

(1) Ketentuan Umum Zonasi jaringan bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi kawasan di sekitar Jaringan Bergerak Seluler.

(2) Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Bergerak Seluler sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan tetap dan diarahkan penggunaan menara telekomunikasi bersama.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pendirian menara telekomunikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan faktor keamanan dan keselamatan;
2. pembangunan stasiun bumi dan/atau menara telekomunikasi, memperhatikan klasifikasi zona lokasi menara dan kriteria lokasi menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Pemanfaatan Ruang pertanian dan permukiman dengan intensitas rendah di sekitar menara telekomunikasi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. kegiatan budi daya lainnya yang tidak mengganggu Jaringan Bergerak Seluler; dan
5. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Tetap.

Pasal 117

Ketentuan Umum Zonasi Sistem jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf d meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan irigasi;
b. Ketentuan Umum Zonasi sistem pengendalian banjir; dan
c. Ketentuan Umum Zonasi Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 118

Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf a berupa Jaringan Irigasi Primer dan Jaringan Irigasi Sekunder, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. pembangunan sarana dan prasarana irigasi;
    2. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air;
    3. kegiatan pemanfaatan air untuk kebutuhan irigasi;
    4. kegiatan mempertegas Jaringan Irigasi Primer; dan
    5. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan daerah irigasi.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    2. pembangunan prasarana pendukung irigasi seperti pos pantau, pintu air, bangunan bagi dan bangunan lainnya mengikuti ketentuan teknis yang berlaku;
    3. kegiatan pengendalian daya rusak air; dan
    4. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan daerah irigasi.

Pasal 119

Ketentuan Umum Zonasi sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf b berupa Ketentuan Umum Zonasi bangunan pengendalian banjir, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air; dan
   2. kegiatan pertanian dan permukiman.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. pemanfaatan air sebagai bahan baku air bersih yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek lingkungan sekitar;
   3. pemanfaatan air untuk kegiatan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek lingkungan sekitar;
   4. pembangunan sarana dan prasarana lingkungan;
   5. kegiatan pengendalian daya rusak air; dan
   6. kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi konservasi sumber daya air.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan dan ekosistem perairan; dan
2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan sistem jaringan pengendalian banjir.

Pasal 120

Ketentuan Umum Zonasi Bangunan Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 huruf c, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. pendayagunaan Bangunan Sumber Daya Air;
   2. pengendalian daya rusak air;
   3. sistem jaringan sumber daya air lainnya
   4. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bangunan Sumber Daya Air;
   5. kegiatan penelitian kondisi dan kualitas air tanah;
   6. pengembangan bangunan penanggulangan banjir;
   7. kegiatan pengambilan dan pembuangan air; dan
   8. kegiatan pengamanan sungai.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pemanfaatan air sebagai bahan baku air bersih yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek lingkungan sekitar; dan
   2. pemanfaatan air untuk kegiatan pertanian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek lingkungan sekitar.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu fungsi Bangunan Sumber Daya Air.

Pasal 121

Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 huruf e, terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi SPAM;
b. Ketentuan Umum Zonasi SPAL;
c. Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
d. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan persampahan;
e. Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan evakuasi bencana; dan
f. Ketentuan Umum Zonasi sistem drainase.

Pasal 122

Ketentuan Umum Zonasi SPAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf a terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi jaringan perpipaan; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi bukan jaringan perpipaan.

Pasal 123

Ketentuan Umum Zonasi jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf a, terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Air Baku;
b. Ketentuan Umum Zonasi Unit Air Baku;
c. Ketentuan Umum Zonasi Unit Produksi; dan
d. Ketentuan Umum Zonasi Unit Distribusi.

Pasal 124

Ketentuan Umum Zonasi Jaringan Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf a, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan air baku;
    2. pengembangan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jaringan Air Baku.

Pasal 125

Ketentuan Umum Zonasi Unit Air Baku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf b, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku;
    2. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air; dan
    3. pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pembangunan SPAM dilengkapi dengan pengolahan limbah;
    2. pembuatan sumur resapan air di sekitar bangunan SPAM; dan
    3. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Air Baku.

Pasal 126

Ketentuan Umum Zonasi Unit Produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf c, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air;
   2. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi; dan
   3. pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Produksi.

Pasal 127

Ketentuan Umum Zonasi Unit Distribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 huruf d, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air;
   2. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi; dan
   3. pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat

mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Unit Distribusi.

Pasal 128

Ketentuan Umum Zonasi bukan jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 122 huruf b, terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi Sumur Pompa; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi Bak Penampungan Air Hujan.

Pasal 129

Ketentuan Umum Zonasi Sumur Pompa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf a, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air;
    2. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Pompa; dan
    3. pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sumur Pompa.

Pasal 130

Ketentuan Umum Zonasi Bak Penampungan Air Hujan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 huruf b, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pembangunan bangunan pengambilan air;

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Bak Penampungan Air Hujan; dan
3. pengembangan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Bak Penampungan Air Hujan.

Pasal 131

Ketentuan Umum Zonasi SPAL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf b terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi SPAL non domestik; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi SPAL domestik.

Pasal 132

Ketentuan Umum Zonasi SPAL non domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf a berupa infrastuktur sistem pengelolaan air limbah non domestik, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali dan mengolah air limbah non domestik;
   2. kegiatan pengolah limbah kegiatan industri;
   3. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SPAL non domestik; dan
   4. pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan air limbah;
3. kegiatan pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. pengembangan sistem jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan SPAL non domestik.

Pasal 133

Ketentuan Umum Zonasi SPAL domestik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 huruf b berupa Infrastuktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dan jaringan pengelolaan air limbah domestik, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. pembangunan prasarana dan sarana air limbah dalam rangka mengurangi, memanfaatkan kembali dan mengolah air limbah domestik;
   2. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan SPAL domestik; dan
   3. pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. fasilitas umum dengan standar teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. kegiatan yang tidak mengganggu fisik konstruksi sistem jaringan air limbah;

3. kegiatan pemanfaatan air limbah untuk pengembangan energi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. pengembangan sistem jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan SPAL domestik.

Pasal 134

Ketentuan Umum Zonasi Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf c, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan reduksi dan kegiatan pengolahan bahan/ barang berbahaya dan beracun;
   2. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3); dan
   3. pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan pengumpulan dan penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. penyelenggaraan pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) telah mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan faktor lingkungan sekitar; dan

3. pengembangan sistem jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Pasal 135

Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf d meliputi:

a. Ketentuan Umum Zonasi TPS;
b. Ketentuan Umum Zonasi TPA; dan
c. Ketentuan Umum Zonasi TPST.

Pasal 136

Ketentuan Umum Zonasi TPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf a, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPS;
   2. kegiatan pemeliharaan tempat pengelolaan sampah;
   3. kegiatan pengumpulan, *treatment* dan pembuangan sampah;
   4. kegiatan remediasi dan pengelolaan sampah; dan
   5. pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan penghijauan;
   2. kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan;
   3. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi Tempat Pengelolaan Sampah;
   4. pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT);

5. kegiatan penampungan sementara sampah harus memperhatikan kelestarian lingkungan dan kesehatan masyarakat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPS.

Pasal 137

Ketentuan Umum Zonasi TPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf b, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pemeliharaan kawasan TPA;
   2. kegiatan pengumpulan, *treatment* dan pembuangan sampah;
   3. kegiatan remediasi dan pengelolaan sampah;
   4. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPA; dan
   5. pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan penghijauan;
   2. kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan;
   3. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi tempat pengelolaan sampah;
   4. pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT);
   5. pengolahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis dan dengan konsep *reuse*, *reduce*, dan *recycle*;

6. pembangunan TPA baru dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek daya tampung dan daya dukung lingkungan; dan
7. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPA.

Pasal 138

Ketentuan Umum Zonasi TPST sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135 huruf c, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pemeliharaan kawasan TPST;
   2. kegiatan pengumpulan, *treatment* dan pembuangan sampah;
   3. kegiatan remediasi dan pengelolaan sampah;
   4. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan TPST; dan
   5. pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan meliputi:
   1. kegiatan penghijauan;
   2. kegiatan permukiman dalam jarak yang aman dari dampak pengelolaan persampahan;
   3. kegiatan lain yang tidak mengganggu fungsi tempat pengelolaan sampah;
   4. pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT);

5. pengolahan dilaksanakan dengan teknologi ramah lingkungan sesuai dengan kaidah teknis dan dengan konsep *reuse*, *reduce*, dan *recycle*; dan
6. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan TPST.

Pasal 139

Ketentuan Umum Zonasi sistem jaringan evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf e, terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi Jalur Evakuasi Bencana; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi Tempat Evakuasi Bencana.

Pasal 140

Ketentuan Umum Zonasi Jalur Evakuasi Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf a, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan bebas dari ancaman bencana, pendirian bangunan evakuasi bencana, pendirian prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan tempat evakuasi;
   2. kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana;
   3. kegiatan pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan;
   4. kegiatan peningkatan aksesibilitas menuju ruang evakuasi bencana;

5. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jalur evakuasi bencana; dan
6. pengembangan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan pemanfaatan jalur evakuasi untuk lalu lintas umum dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   2. kegiatan pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Jalur Evakuasi Bencana.

Pasal 141

Ketentuan Umum Zonasi Tempat Evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 139 huruf b, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis dan bebas dari ancaman bencana, pendirian bangunan evakuasi bencana, pendirian prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan tempat evakuasi;
   2. kegiatan pemberdayaan Masyarakat dalam pengelolaan prasarana dan sarana pendukung pada jalur dan ruang evakuasi bencana;
   3. pemasangan papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan;
   4. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan tempat evakuasi bencana; dan

5. pengembangan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat berupa pengembangan sistem jaringan prasarana yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Tempat Evakuasi Bencana.

Pasal 142

Ketentuan Umum Zonasi sistem drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 huruf f berupa Jaringan Drainase Primer dan Jaringan Drainase Sekunder, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pembangunan prasarana dan sarana sistem jaringan drainase dalam rangka mengurangi genangan air dan mendukung pengendalian banjir;
   2. kegiatan pembangunan prasarana penunjang drainase;
   3. kegiatan Pemanfaatan Ruang sekitar jaringan drainase untuk kegiatan yang mendukung pengelolaan drainase;
   4. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase; dan
   5. pengembangan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pembangunan jaringan drainase harus saling terintegrasi dengan jaringan drainase lainnya dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

2. pengembangan sistem jaringan prasarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pembuangan material padat dan cair yang berbahaya bagi lingkungan; dan
   2. kegiatan dan pendirian bangunan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan jaringan drainase.

Pasal 143

Ketentuan Umum Zonasi untuk Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5) huruf a. terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi untuk Badan Air;
b. Ketentuan Umum Zonasi untuk kawasan perlindungan terhadap kawasan dibawahnya;
c. ketentuan umum zonasi untuk kawasan konservasi; dan
d. ketentuan umum zonasi untuk Kawasan Cagar Budaya.

Pasal 144

Ketentuan Umum Zonasi untuk Badan Air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf a, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan konservasi perairan;
   2. kegiatan budi daya tanaman mangrove;
   3. kegiatan pembangunan prasarana pengendalian kestabilan ketinggian muka air;
   4. infrastruktur sumber daya air;
   5. jaringan mitigasi bencana;
   6. kegiatan penerapan teknologi alami dan/atau buatan untuk pelestarian serta pemulihan kualitas Badan Air;

7. kegiatan pengerukan sedimentasi atau normalisasi dan pemeliharaan Badan Air; dan
8. kegiatan pemeliharaan dan kegiatan konservasi Badan Air.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan pendidikan, penelitian, dan pariwisata pada Badan Air dengan tidak merusak kawasan sekitar Badan Air, mengubah bentang alam dan mengganggu ekosistem perairan;
   2. Pemanfaatan Ruang pada Badan Air dengan tetap menjaga kelestarian lingkungan dan fungsi lindung kawasan;
   3. kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan Tanaman Pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4. pendirian bangunan untuk pengelolaan Badan Air dan/atau pemanfaatan air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan aspek lingkungan sekitar;
   5. konstruksi reservoir pembangkit listrik tenaga air dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   6. kegiatan perikanan budi daya dan perikanan tangkap dengan tidak menurunkan kualitas air dan mengganggu ekosistem perairan;
   7. budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   8. Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan di bawah perairan yang berdampak merusak pada Badan Air;
   2. kegiatan yang menimbulkan pencemaran air dan merusak kualitas Badan Air; dan
   3. kegiatan yang mengganggu dan/atau merusak kelestarian fungsi Badan Air antara lain kegiatan yang mengubah bentang alam dan mengubah fungsi hidrologi.

Pasal 145

(1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf b, berupa Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung.
(2) Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Hutan Lindung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
      1. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan konservasi dan pelestarian Kawasan Hutan Lindung; dan
      2. kegiatan peningkatan fungsi lindung pada area yang telah mengalami alih fungsi melalui pengembangan vegetasi hutan yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air.
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan, tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan, menerapkan reklamasi pasca tambang, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial budaya dan pariwisata dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi lindung dan tidak merusak keseimbangan ekosistem;
3. kegiatan budi daya lainnya pada kawasan tanaman pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. kegiatan Pemanfaatan Ruang kawasan untuk kegiatan budi daya kehutanan hasil hutan bukan kayu bagi penduduk asli dengan luasan tetap dilaksanakan dengan tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
5. Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. kegiatan permukiman di dalam kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. pemanfaatan hutan lindung dan penggunaan Kawasan Hutan Lindung untuk keperluan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui pinjam pakai kawasan hutan dan/atau kerja sama penggunaan kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
8. penetapan hutan adat dalam Kawasan Hutan Lindung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta pelestarian lingkungan hidup.

Pasal 146

(1) Ketentuan Umum Zonasi kawasan konservasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf c, berupa Ketentuan Umum Zonasi kawasan Taman Nasional.

(2) Ketentuan Umum Zonasi kawasan Taman Nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. Pemanfaatan Ruang untuk penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air, serta energi air, panas, dan angin;
   2. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pemantapan fungsi atau pengembangan pengelolaan Taman Nasional, penelitian dan pengembangan, serta ilmu pengetahuan; dan
   3. kegiatan Pemanfaatan Ruang untuk pemanfaatan sumber plasma nutfah sebagai penunjang budi daya dan pemanfaatan tumbuhan, satwa liar, serta koleksi keanekaragaman hayati.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan, tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan, menerapkan reklamasi pasca tambang, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan Tanaman Pangan yang tidak produktif dan tidak

beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial budaya dan pariwisata dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi lindung dan tidak merusak keseimbangan ekosistem;
4. Pemanfaatan Ruang kawasan untuk kegiatan budi daya bagi penduduk asli di zona penyangga dengan luasan tetap, tidak mengurangi fungsi lindung kawasan, dan di bawah pengawasan ketat;
5. kegiatan permukiman di dalam kawasan hutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan untuk keperluan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui pinjam pakai kawasan hutan dan/atau kerja sama penggunaan kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
8. Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. penetapan hutan adat dalam kawasan Taman Nasional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan yang dapat mengakibatkan kerusakan taman nasional dan ekosistemnya; dan

2. kegiatan yang tidak sesuai dengan peruntukan zona pada kawasan Taman Nasional dan mengakibatkan kerusakan fungsi pada peruntukan zona tersebut.

Pasal 147

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 huruf d, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan adat budaya Masyarakat;
   2. kegiatan pelestarian Kawasan Cagar Budaya; dan
   3. kegiatan konservasi dan pelestarian kawasan hutan.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial budaya dan pariwisata dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi lindung;
   2. Kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan tanaman pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. pengembangan sistem jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4. budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   5. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan intensitas rendah memperhatikan fungsi lindung dan tidak mengubah bentang alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan dan pendirian bangunan yang tidak sesuai dengan fungsi Kawasan Cagar Budaya;
2. kegiatan yang mengganggu Kawasan Cagar Budaya dan adat budaya Masyarakat;
3. kegiatan yang dapat mengganggu upaya pelestarian adat/kearifan lokal masyarakat setempat; dan
4. kegiatan budi daya yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.

Pasal 148

Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (5) huruf b terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi pada kawasan hutan produksi;
b. Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Perkebunan Rakyat;
c. Ketentuan Umum Zonasi pada kawasan pertanian;
d. Ketentuan Umum Zonasi pada kawasan perikanan;
e. Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Peruntukan Industri;
f. Ketentuan Umum Zonasi pada kawasan pariwisata;
g. Ketentuan Umum Zonasi pada kawasan permukiman; dan
h. Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Pertahanan dan Keamanan.

Pasal 149

Ketentuan Umum Zonasi pada kawasan hutan produksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf a, terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Hutan Produksi Tetap.

Pasal 150

Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf a, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
    2. pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi lindung;
    3. kegiatan pengembangan fungsi penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;
    4. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi kawasan hutan produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
    6. pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan dan sumber daya air.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan untuk keperluan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui pinjam pakai kawasan hutan dan/atau kerja sama penggunaan kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
    2. kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial budaya dan pariwisata dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi kawasan;
    3. kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan Tanaman Pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

4. penetapan hutan adat dalam Kawasan Hutan Lindung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan, menerapkan reklamasi pasca tambang serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
7. Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu bentang alam, kesuburan, dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.
d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang akan ditentukan berdasarkan rekomendasi instansi berwenang di bidang kehutanan.

Pasal 151

Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Hutan Produksi Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 149 huruf b, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pengembangan hutan secara berkelanjutan;
   2. pengembangan fungsi hutan produksi menjadi hutan berfungsi lindung;
   3. kegiatan pengembangan fungsi penyangga pada kawasan hutan produksi yang berbatasan dengan Kawasan Hutan Lindung;

4. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi kawasan hutan produksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. kegiatan reboisasi dan rehabilitasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas; dan
6. pemanfaatan hasil hutan untuk menjaga kestabilan neraca sumber daya kehutanan dan sumber daya air.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
1. pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan untuk keperluan di luar sektor kehutanan yang diperoleh melalui pinjam pakai kawasan hutan dan/atau kerja sama penggunaan kawasan hutan atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kehutanan;
2. kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial budaya dan pariwisata dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi kawasan;
3. budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan Tanaman Pangan yang tidak produktif dan tidak beririgasi teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. penetapan hutan adat dalam Kawasan Hutan Lindung dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek lingkungan hidup, aspek keselamatan dan tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan, menerapkan reklamasi pasca tambang serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

7. Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu bentang alam, kesuburan, dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.

d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang akan ditentukan berdasarkan rekomendasi instansi berwenang di bidang kehutanan.

Pasal 152

Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Perkebunan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf b, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pertanian dan wisata alam;
   2. kegiatan permukiman perdesaan;
   3. kegiatan yang mendukung pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat;
   4. kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan rakyat; dan
   5. kegiatan pengembangan hasil perkebunan rakyat dalam rangka mencukupi kebutuhan industri berbasis agro.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan, tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan, menerapkan reklamasi pasca tambang, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan Perkebunan Rakyat yang tidak produktif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

3. pengembangan sistem jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. alih fungsi untuk kegiatan non perkebunan dalam hal pemenuhan kebutuhan penyediaan lahan untuk perkembangan sistem pusat permukiman, Kawasan Peruntukan Industri yang berorientasi pada kegiatan perkebunan, kawasan wisata yang berorientasi pada kegiatan pertanian, lahan pengganti hutan dan tanaman pangan;
5. Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. kegiatan peternakan skala kecil dan mikro yang tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya; dan
8. kegiatan perikanan budi daya yang tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan budi daya yang merusak fungsi lahan dan kualitas tanah untuk perkebunan; dan
   2. penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama Kawasan Perkebunan yang berlokasi di lokasi hulu/kawasan resapan air.

d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang meliputi :
   1. KDB : Maksimal 10 % (sepuluh persen);
   2. KDH : Minimal 90 % (sembilan puluh persen);
   3. KLB : 2 x KDB; dan

4. KDB dan KDH sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Pasal 153

Ketentuan Umum Zonasi kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf c, terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan;
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perkebunan; dan
c. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peternakan.

Pasal 154

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Tanaman Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf a, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan; dan
    2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan, tidak mengubah dominasi fungsi utama Kawasan, menerapkan reklamasi pasca tambang, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. Pemanfaatan Ruang untuk kegiatan hunian, industri, rekreasi, perdagangan dan jasa dan kegiatan budi daya lainnya dengan syarat di luar Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
    3. pengembangan kegiatan pertanian tanaman pangan pada kawasan perkotaan dapat dilaksanakan dengan ketentuan teknis yang berlaku;

4. alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan yang tidak produktif dan non irigasi teknis bagi peruntukkan lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. kegiatan pariwisata tanpa mengganggu fungsi Kawasan Tanaman Pangan;
7. kegiatan perikanan budi daya yang tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya; dan
8. Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Tanaman Pangan.
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
   1. KDB : Maksimal 10% (sepuluh persen);
   2. KDH : Minimal 90% (sembilan puluh persen);
   3. KLB : 2 x KDB; dan
   4. KDB dan KDH sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diatas dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Pasal 155

Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Perkebunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf b, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Perkebunan;
2. kegiatan peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan;
3. kegiatan pemanfaatan hasil perkebunan; dan
4. kegiatan tanaman pangan dan hortikultura.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan, tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan, menerapkan reklamasi pasca tambang dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
   2. kegiatan budi daya lainnya pada Kawasan Perkebunan yang tidak produktif dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. pengembangan sistem jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4. perluasan permukiman secara terbatas dan dengan kepadatan rendah;
   5. kegiatan peternakan skala kecil dan mikro yang tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya;
   6. kegiatan industri pengolahan hasil perkebunan dengan skala kecil dan mikro sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   7. kegiatan perikanan budi daya dan perikanan tangkap yang tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya;
   8. Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   9. kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial budaya dan pariwisata dilaksanakan dengan memperhatikan fungsi kawasan; dan

10. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi :
   1. kegiatan yang mengganggu fungsi Kawasan Perkebunan; dan
   2. penanaman jenis tanaman perkebunan yang bersifat menyerap air dalam jumlah banyak, terutama Kawasan Perkebunan yang berlokasi di lokasi hulu/kawasan resapan air.

d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
   1. KDB : Maksimal 60% (enam puluh persen);
   2. KDH : Minimal 40% (empat puluh persen);
   3. KLB : 2 x KDB;
   4. KDB dan KDH sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Pasal 156

Ketentuan Umum Zonasi pada kawasan peruntukan Kawasan Peternakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 153 huruf c, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pengembangan Kawasan Peternakan; dan
   2. kegiatan pengelolaan dan pemanfaatan limbah ternak.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan, tidak mengubah dominasi fungsi utama Kawasan, menerapkan reklamasi pasca tambang, dan

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan budi daya lainnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. kegiatan industri pengolahan hasil peternakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. kegiatan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, dan pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. pengembangan sistem jaringan prasarana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan lingkungan sekitar;
6. kegiatan operasional dan penunjang peternakan harus memenuhi persyaratan teknis peternakan dan kesehatan hewan serta memperhatikan lingkungan sekitar;
7. budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
9. kegiatan perikanan budi daya tidak mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan peternakan di sekitar lokasi kegiatan pariwisata yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi;
2. kegiatan peternakan yang mengakibatkan pencemaran lingkungan dan kerusakan lingkungan lainnya.

d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi:
    1. KDB : Maksimal 70% (tujuh puluh persen);
    2. KDH : Minimal 30% (tiga puluh persen);
    3. KLB : 3 x KDB;
    4. KDB dan KDH sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Pasal 157

Ketentuan Umum Zonasi kawasan perikanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf d, terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan Tangkap; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya.

Pasal 158

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan Tangkap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf a, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kegiatan perikanan;
    2. kegiatan penelitian, pengembangan dan pendidikan;
    3. kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
    4. kegiatan peningkatan produktivitas kawasan perikanan.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan, tidak mengubah dominasi fungsi utama Kawasan, menerapkan reklamasi pasca tambang, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan tetap menjaga lingkungan;

3. kawasan perikanan yang memiliki hutan mangrove di dalamnya agar tetap dipertahankan keberadaannya sebagai hutan mangrove tanpa mengubah peruntukkan pemanfaatannya;
4. kegiatan dan pendirian bangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan lingkungan sekitar;
5. kegiatan penyediaan fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata secara terbatas, tidak mengganggu fungsi kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. kegiatan lain yang telah ada dan terintegrasi secara harmonis serta kegiatan selain sebagaimana dimaksud pada huruf a, yang tidak mengganggu fungsi Kawasan Perikanan Tangkap;
7. kegiatan permukiman yang mendukung kawasan perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
8. kegiatan budi daya lain dengan intensitas rendah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
10. penyelenggaraan bangunan pengolahan hasil ikan, balai pelatihan teknis nelayan, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan produk perikanan, dan pusat pembenihan ikan dapat dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

11. Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan perikanan di sekitar lokasi kegiatan pariwisata yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi;
   2. kegiatan membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan serta lingkungan sumber daya ikan dan/ atau kesehatan manusia;
   3. kegiatan alih fungsi hutan mangrove yang berada di kawasan perikanan;
   4. kegiatan yang dapat mengganggu kawasan perikanan; dan
   5. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu keseimbangan daya dukung lingkungan dan ekosistem sekitar.

d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang pada Kawasan Perikanan Tangkap meliputi :
   1. KDB : Maksimal 70% (tujuh puluh persen);
   2. KDH : Minimal 30% (tiga puluh persen);
   3. KLB : 2 x KDB;
   4. KDB dan KDH sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Pasal 159

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Perikanan Budi Daya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 huruf b, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kegiatan perikanan;

2. kegiatan penelitian, pengembangan dan pendidikan;
3. kegiatan penelitian, pendidikan, dan pariwisata; dan
4. kegiatan peningkatan produktivitas kawasan perikanan.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan, tidak mengubah dominasi fungsi utama kawasan, menerapkan reklamasi pasca tambang, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. kegiatan pemanfaatan sumber daya perikanan dengan tetap menjaga lingkungan;
   3. kegiatan dan pendirian bangunan sarana dan prasarana pendukung kawasan perikanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan lingkungan sekitar;
   4. kegiatan penyediaan fasilitas pendukung dan penunjang pariwisata secara terbatas, tidak mengganggu fungsi kawasan, dan memenuhi persyaratan teknis serta telah melalui prosedur pemanfaatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   5. kegiatan permukiman yang mendukung kawasan perikanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   6. kegiatan budi daya lain dengan intensitas rendah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   7. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   8. penyelenggaraan bangunan pengolahan hasil ikan, pengembangan sarana dan prasarana pengembangan

produk perikanan, dan pusat pembenihan ikan dapat dilaksanakan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

9. Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan perikanan di sekitar lokasi kegiatan pariwisata yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi;
   2. kegiatan membudidayakan ikan yang dapat membahayakan sumber daya ikan serta lingkungan sumber daya ikan dan/atau kesehatan manusia;
   3. kegiatan yang dapat mengganggu kawasan perikanan; dan
   4. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang mengganggu keseimbangan daya dukung lingkungan dan ekosistem sekitar.
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang pada kawasan perikanan budidaya meliputi :
   1. KDB : Maksimal 20% (dua puluh persen);
   2. KDH : Minimal 80% (delapan puluh persen);
   3. KLB : 2 x KDB;
   4. KDB dan KDH sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diatas dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Pasal 160

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Peruntukan Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf e, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri;
2. kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan dan kegiatan industri yang tidak memberikan dampak merusak dan menurunkan kualitas lingkungan;
3. kegiatan industri yang mendayagunakan teknologi, potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di Wilayah sekitarnya;
4. pengembangan sarana, prasarana, dan utilitas pendukung kegiatan peruntukan industri; dan
5. kegiatan pengembangan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan pertambangan dengan memperhatikan aspek keselamatan, tidak mengubah dominasi fungsi utama Kawasan, menerapkan reklamasi pasca tambang, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. alih fungsi kawasan tanaman pangan yang berada dalam Kawasan Peruntukan Industri dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. kegiatan peruntukan industri dengan menyediakan sistem pengolahan limbah cair, padat, dan/atau Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) secara mandiri dan terpadu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4. kegiatan pembangunan dan pengembangan kawasan industri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan wajib menyediakan RTH;
   5. pengembangan jaringan sarana dan prasarana, fasilitas umum dan fasilitas sosial dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   6. kegiatan pengembangan pariwisata dan fasilitas penunjangnya dengan mempertimbangkan dampak

konflik dengan kegiatan industri serta melalui kajian teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

7. pembangunan fasilitas untuk kepentingan umum dengan mempertimbangkan dampak konflik dengan kegiatan industri;
8. pembangunan perumahan khusus untuk pekerja industri pada kawasan industri skala besar;
9. kegiatan penggunaan air tanah dengan mempertimbangan daya dukung air pada Kawasan Peruntukan Industri;
10. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
11. kegiatan budi daya lain dengan tidak merubah fungsi utama kawasan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
12. Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
   2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Peruntukan Industri.

d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
   1. KDB : Maksimal 70% (tujuh puluh persen);
   2. KDH : Minimal 30% (tiga puluh persen);
   3. KLB : 3 x KDB;
   4. KDB dan KDH sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 diatas dapat lebih besar atau lebih kecil

berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Pasal 161

Ketentuan Umum Zonasi kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf f, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pariwisata;
   2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas pendukung kawasan pariwisata;
   3. kegiatan wisata alam, agrowisata, desa wisata, dan daya tarik wisata binaan/buatan berbasis ekowisata dan ramah lingkungan;
   4. kawasan peruntukan lainnya baik budi daya dan lindung yang telah berkembang secara harmonis di kawasan setempat;
   5. kegiatan pertanian, pekebunan, peternakan, dan hortikultura;
   6. kegiatan adat budaya masyarakat;
   7. kegiatan pelestarian cagar budaya;
   8. kawasan pariwisata yang memiliki hutan mangrove di dalamnya agar tetap dipertahankan keberadaannya sebagai hutan mangrove tanpa mengubah peruntukkan pemanfaatannya;
   9. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi kawasan pariwisata;
   10. kawasan peruntukan lainnya baik budi daya dan lindung yang telah berkembang secara harmonis di kawasan setempat; dan
   11. kegiatan pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. kegiatan wisata harus sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
2. kegiatan penataan kawasan pariwisata dengan memperhatikan kelestarian ekosistem dan fungsi kawasan;
3. kegiatan penataan kawasan pariwisata dengan memperhatikan bentuk arsitektur lokal, bentang alam, dan pandangan visual yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan nilai-nilai kearifan lokal;
4. kegiatan pariwisata pada Kawasan Lindung dilaksanakan sesuai asas konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya;
5. kegiatan pariwisata tetap melakukan perlindungan terhadap situs peninggalan kebudayaan masa lampau;
6. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. kegiatan pengembangan jaringan sarana dan prasarana serta fasilitas untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
8. pengembangan kegiatan industri kecil dan menengah penunjang pariwisata dengan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. penyediaan fasilitas evakuasi dan alat penyelamatan, alat peringatan dini pada kawasan pariwisata yang berada dalam kawasan rawan bencana; dan
10. Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan budi daya lainnya yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan menimbulkan konflik sosial ekonomi; dan
2. kegiatan yang dapat mengganggu operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pariwisata.

d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
   1. KDB : Maksimal 70% (tujuh puluh persen);
   2. KDH : Minimal 30% (tiga puluh persen);
   3. KLB : 3 x KDB;
   4. KDB dan KDH sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Pasal 162

Ketentuan Umum Zonasi pada kawasan permukiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf g, terdiri atas:

a. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perkotaan; dan
b. Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Permukiman Perdesaan.

Pasal 163

Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Permukiman Perkotaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf a, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
   2. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan;
   3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perkotaan;

4. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air; dan
5. pengembangan RTH.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pembangunan permukiman oleh pihak pengembang dengan menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai dan terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana di sekitarnya, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. pengembangan permukiman perkotaan dengan pengembangan perumahan secara vertikal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   3. pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dengan memperhatikan intensitas bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   4. pembangunan kawasan permukiman yang dikembangkan di kawasan rawan bencana harus sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
   5. kegiatan industri skala kecil dan mikro yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
   6. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu kenyamanan, keamanan dan keselamatan, dan menimbulkan dampak sosial dan lingkungan;
   7. kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan skala kecil/mikro, dan perikanan budi daya dengan tidak mengganggu kenyamanan, keamanan dan keselamatan, dan menimbulkan dampak sosial dan lingkungan;
   8. alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan di dalam Kawasan Permukiman Perkotaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   9. Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

10. kegiatan yang bersifat kepentingan umum harus memperhatikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan, dan tidak menimbulkan dampak sosial dan lingkungan;
11. kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyediakan area parkir dan bongkar muat barang; dan
12. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan peternakan dan industri skala menengah dan besar yang tinggi polutan;
   2. kegiatan industri eksisting tidak diperkenankan melakukan perluasan; dan
   3. kegiatan yang dapat mengganggu Kawasan Permukiman Perkotaan dan menurunkan fungsi kawasan permukiman.

d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
   1. KDB : Maksimal 80% (delapan puluh persen);
   2. KDH : Minimal 20% (dua puluh persen)
   3. KLB : 10 x KDB;
   4. KDB dan KDH sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Pasal 164

Ketentuan Umum Zonasi pada Kawasan Permukiman Perdesaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 162 huruf b, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan pelestarian, pemanfaatan, dan pengelolaan cagar budaya;
    2. kegiatan Pemanfaatan Ruang lainnya yang dapat meningkatkan fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan;
    3. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas yang mendukung fungsi Kawasan Permukiman Perdesaan;
    4. pembangunan sumur resapan dan/atau biopori untuk menjaga keseimbangan neraca air; dan
    5. pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pembangunan permukiman oleh pihak pengembang dengan menyediakan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai dan terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana di sekitarnya, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pengembangan Kawasan Permukiman Perdesaan dengan memperhatikan intensitas bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. kegiatan industri skala kecil dan mikro yang tidak menimbulkan dampak lingkungan dan sosial;
    4. pembangunan kawasan permukiman yang dikembangkan di kawasan rawan bencana harus sesuai dengan ketentuan teknis yang berlaku;
    5. kegiatan yang bersifat kepentingan umum harus memperhatikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan, dan menimbulkan dampak sosial dan lingkungan;
    6. kegiatan pariwisata dengan tidak mengganggu kenyamanan, keamanan dan keselamatan, dan menimbulkan dampak sosial dan lingkungan;

7. kegiatan pertanian, perkebunan, peternakan skala kecil mikro, dan perikanan dengan tidak mengganggu kenyamanan, keamanan dan keselamatan, dan tidak menimbulkan dampak sosial dan lingkungan;
8. alih fungsi Kawasan Tanaman Pangan di dalam Kawasan Permukiman Perdesaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
9. kegiatan perdagangan dan jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menyediakan area parkir dan bongkar muat barang;
10. Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
11. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat mengganggu Kawasan Permukiman Perdesaan dan menurunkan fungsi kawasan permukiman.
d. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang meliputi :
   1. KDB : Maksimal 70% (tujuh puluh persen);
   2. KDH : Minimal 30% (tiga puluh persen);
   3. KLB : 4 x KDB;
   4. KDB dan KDH sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 di atas dapat lebih besar atau lebih kecil berdasarkan hasil kajian dan rekomendasi Forum Penataan Ruang.

Pasal 165

Ketentuan Umum Zonasi Kawasan Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 huruf h, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan berupa kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pendirian bangunan hanya untuk menunjang fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan;
    2. pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    3. Pemanfaatan Ruang pada kawasan yang terdapat keunikan batuan dan fosil dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan budi daya yang mengganggu fungsi Kawasan Pertahanan dan Keamanan.
d. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang akan ditentukan melalui instansi berwenang di bidang pertahanan dan keamanan.

Pasal 166

Ketentuan khusus rencana pola ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 ayat (3) huruf c meliputi:

a. Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan;
b. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana;
c. Ketentuan Khusus kawasan resapan air;
d. Ketentuan Khusus kawasan sempadan;
e. Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya; dan
f. Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara.

Pasal 167

(1) Ketentuan Khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 huruf a, terdiri atas:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
      1. kegiatan peningkatan produktivitas tanaman pangan; dan
      2. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. alih fungsi KP2B untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2. kegiatan agrowisata dan ekowisata dan infrastruktur pendukungnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
      3. bangunan prasarana dan bangunan pendukung kegiatan pertanian yang mengurangi luasan kawasan pertanian pangan berkelanjutan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang dapat merusak lahan dan kualitas tanah Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
(2) Ketentuan khusus Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan digambarkan dalam peta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 168

(1) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 huruf b terdiri atas:
   a. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana banjir;
   b. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana likuefaksi;
   c. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana gempa bumi;
   d. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana longsor; dan
   e. Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana tsunami.
(2) Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 169

Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana banjir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf a berupa rawan bencana banjir tingkat tinggi, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. membangun prasarana dan sarana mitigasi bencana banjir;
   2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana banjir;
   3. pengembangan RTH; dan
   4. kegiatan pengembangan biopori dan/atau sumur resapan.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:

1. pembangunan dan pengembangan kegiatan pertambangan, perikanan, pariwisata, industri, permukiman yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang harus memperhatikan intensitas bangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan menerapkan konsep mitigasi bencana;
4. bangunan bertingkat wajib menyediakan tempat dan jalur evakuasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
5. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang menimbulkan dan/atau meningkatkan risiko bencana banjir; dan
   2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 170

Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana likuefaksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf b berupa rawan bencana likuefaksi tingkat sedang dan tinggi, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. membangun prasarana dan sarana mitigasi bencana likuefaksi;

2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana likuefaksi; dan
3. kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana likuefaksi.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pembangunan dan pengembangan kegiatan perikanan, pariwisata, industri, permukiman yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan intensitas rendah dan intensitas sedang;
   3. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan menerapkan konsep mitigasi bencana;
   4. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   5. bangunan bertingkat wajib menyediakan tempat dan jalur evakuasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   6. kegiatan dan pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan peraturan tata bangunan yang berlaku.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan intensitas bangunan tinggi;
   2. kegiatan yang menimbulkan dan/atau meningkatkan risiko bencana likuefaksi; dan
   3. kegiatan yang mengganggu fungsi Jalur Evakuasi Bencana dan Tempat Evakuasi Bencana; dan
   4. kegiatan pertambangan di kawasan rawan bencana likuefaksi.

Pasal 171

Ketentuan khusus kawasan rawan bencana gempa bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf c berupa rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. membangun prasarana dan sarana mitigasi bencana gempa bumi;
    2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana gempa bumi; dan
    3. pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. pembangunan dan pengembangan kegiatan pertambangan, perikanan, pariwisata, industri, permukiman yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    2. pembangunan prasarana dan sarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    3. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan menerapkan konsep mitigasi bencana;
    4. pembangunan gedung harus menerapkan standar konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    5. bangunan bertingkat wajib menyediakan tempat dan jalur evakuasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
    1. kegiatan yang dapat meningkatkan dampak risiko bencana gempa bumi; dan

2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan ruang evakuasi bencana.

Pasal 172

Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana longsor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf d berupa rawan bencana longsor tingkat tinggi, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. membangun prasarana dan sarana mitigasi bencana longsor;
   2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana longsor;
   3. kegiatan rehabilitasi lahan dan konservasi tanah di kawasan rawan bencana longsor; dan
   4. pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pembangunan dan pengembangan kegiatan pertambangan, perikanan, pariwisata, industri, permukiman yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan intensitas rendah dan intesitas sedang;
   3. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan menerapkan konsep mitigasi bencana;
   4. pemasangan papan reklame, papan penyuluhan, papan peringatan, dan rambu-rambu pengamanan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   5. bangunan bertingkat wajib menyediakan tempat dan jalur evakuasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

6. kegiatan dan pendirian bangunan dilaksanakan sesuai dengan peraturan tata bangunan yang berlaku.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang menimbulkan dan/atau meningkatkan risiko bencana longsor; dan
   2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.

Pasal 173

Ketentuan Khusus kawasan rawan bencana tsunami sebagaimana dimaksud dalam Pasal 168 ayat (1) huruf e berupa rawan bencana tsunami tingkat tinggi, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. membangun prasarana dan sarana mitigasi bencana tsunami;
   2. pengembangan sistem jaringan evakuasi bencana tsunami;
   3. pengembangan *coastal forest* dengan vegetasi mangrove, pohon kelapa serta vegetasi lainnya yang dapat meredam energi gelombang dan tsunami; dan
   4. pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. pembangunan dan pengembangan kegiatan pertambangan, perikanan, pariwisata, industri, permukiman yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
   2. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan intensitas rendah dan intensitas sedang;

3. pembangunan prasarana dan sarana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan menerapkan konsep mitigasi bencana;
5. bangunan bertingkat wajib menyediakan tempat dan jalur evakuasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. pembangunan gedung harus menerapkan standar konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan yang dapat meningkatkan dampak risiko bencana tsunami; dan
   2. kegiatan yang mengganggu fungsi jalur evakuasi bencana dan tempat evakuasi bencana.

Pasal 174

(1) Ketentuan Khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 huruf c, terdiri atas:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
      1. kegiatan pengembangan RTH;
      2. kegiatan pelestarian kawasan; dan
      3. kegiatan yang mendukung peningkatan fungsi resapan air.
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. pembangunan dan pengembangan kegiatan pertambangan, perikanan, pariwisata, industri, permukiman yang memenuhi daya dukung daya tampung lingkungan hidup, mitigasi bencana dan persyaratan teknis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. kegiatan Pemanfaatan Ruang budi daya lainnya dengan mempertimbangkan karakteristik jenis tanah dan batuan kawasan resapan air;
3. kegiatan budi daya terbangun dengan intensitas Pemanfaatan Ruang rendah dan intensitas Pemanfaatan Ruang sedang; dan
4. kegiatan budi daya melakukan penanaman vegetasi yang bersifat menyimpan air, menyediakan sumur resapan, dan/atau segala kegiatan yang bersifat menyimpan air atau mempertahankan fungsi resapan air.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu fungsi kawasan resapan air.

(2) Ketentuan khusus kawasan resapan air sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 175

(1) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 huruf d, terdiri atas:
   a. Ketentuan Khusus kawasan sempadan sungai;
   b. Ketentuan Khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk; dan
   c. Ketentuan Khusus kawasan sempadan pantai.

(2) Ketentuan Khusus kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 176

Ketentuan Khusus kawasan sempadan sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf a, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
    1. pembangunan prasarana dan utilitas mitigasi dan pengurangan risiko bencana;
    2. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan menerapkan konsep mitigasi bencana;
    3. kegiatan pertanian;
    4. kegiatan yang dapat menunjang atau meningkatkan perlindungan kawasan sempadan sungai; dan
    5. pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
    1. kegiatan tanaman pangan dan perikanan yang tidak mengganggu fungsi sungai;
    2. kegiatan pariwisata alam, pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
    3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik sungai;
    4. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan intensitas rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    5. budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
    6. pemasangan papan reklame secara terbatas, papan penyuluhan, dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:

1. kegiatan Pemanfaatan Ruang eksisting yang tidak bersifat kepentingan umum tidak diperkenankan menambah luasan; dan
2. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas air sungai, kondisi fisik sungai, dasar sungai, serta mengganggu aliran air sungai.

Pasal 177

Ketentuan Khusus kawasan sempadan situ, danau, embung, dan waduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. pembangunan prasarana dan utilitas mitigasi dan pengurangan risiko bencana;
   2. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan menerapkan konsep mitigasi bencana;
   3. kegiatan pertanian;
   4. kegiatan yang dapat menunjang atau meningkatkan perlindungan kawasan sempadan waduk; dan
   5. pengembangan RTH.
b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan tanaman pangan dan perikanan yang tidak mengganggu fungsi waduk/danau;
   2. kegiatan pariwisata alam, pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
   3. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik waduk;

4. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan intensitas rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. pemasangan papan reklame secara terbatas, papan penyuluhan, dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
   1. kegiatan Pemanfaatan Ruang eksisting yang tidak bersifat kepentingan umum tidak diperkenankan menambah luasan; dan
   2. kegiatan Pemanfaatan Ruang berupa kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kualitas air, kondisi fisik sekitar waduk, waduk, serta mengganggu debit air.

Pasal 178

Ketentuan Khusus kawasan sempadan pantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) huruf c, terdiri atas:

a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
   1. pembangunan prasarana dan utilitas mitigasi dan pengurangan risiko bencana;
   2. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan menerapkan konsep mitigasi bencana;
   3. kegiatan pertanian;
   4. kegiatan yang dapat menunjang atau meningkatkan perlindungan kawasan sempadan pantai;

5. pengembangan RTH; dan
6. kegiatan perikanan budi daya dan perikanan tangkap.

b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
   1. kegiatan perikanan budi daya dan perikanan tangkap yang tidak mengganggu fungsi kawasan pantai dan berdampak negatif bagi lingkungan sekitar;
   2. bangunan lain yang telah ada dan/atau bangunan yang telah memiliki izin dan tidak mengganggu lingkungan sekitarnya;
   3. kegiatan pariwisata alam, pendidikan, dan penelitian tanpa mengubah bentang alam;
   4. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak menimbulkan dampak merugikan bagi kelestarian dan keamanan fungsi serta fisik pantai;
   5. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan intensitas rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan;
   6. kegiatan pemanfaatan sempadan pantai dengan tidak menutup akses publik melewati dan menuju pantai;
   7. kegiatan budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
   8. pemasangan papan reklame secara terbatas, papan penyuluhan, dan peringatan serta rambu-rambu pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan berupa kegiatan yang mengganggu bentang alam, mengganggu kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, kelestarian lingkungan hidup, dan kegiatan yang merusak kawasan sekitar pantai.

Pasal 179

(1) Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 huruf e, terdiri atas:
    a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
        1. kegiatan penelitian, kegiatan pendidikan, kegiatan sosial budaya masyarakat; dan
        2. kegiatan konservasi dan pelestarian kawasan hutan adat.
    b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
        1. budi daya untuk pertahanan dan keamanan, kepentingan umum, proyek strategis nasional, dan/atau bencana dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
        2. kegiatan wisata alam dengan tidak mengubah bentang alam dan memperhatikan fungsi lindung; dan
        3. kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan intensitas rendah memperhatikan fungsi lindung dan tidak mengubah bentang alam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
    c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
        1. kegiatan yang dapat mengganggu upaya pelestarian adat/kearifan lokal masyarakat setempat; dan
        2. kegiatan yang mengganggu bentang alam, kesuburan dan keawetan tanah, fungsi hidrologi, kelestarian flora dan fauna, serta kelestarian lingkungan hidup.
(2) Ketentuan Khusus Kawasan Cagar Budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 180

(1) Ketentuan Khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud dalam dalam Pasal 166 huruf f, terdiri atas:
   a. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan meliputi:
      1. kegiatan operasional, penunjang, dan pengembangan kawasan pertambangan mineral dan batubara; dan
      2. kegiatan pemulihan bentang alam setelah kegiatan penambangan agar dapat digunakan kembali bagi kegiatan lain; dan
      3. kegiatan reklamasi di kawasan bekas penambangan.
   b. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang diperbolehkan dengan syarat meliputi:
      1. kegiatan penambangan dengan menerapkan teknik penambangan ramah lingkungan;
      2. kegiatan penambangan dengan memberdayakan masyarakat di lingkungan sekitar guna kepentingan dan kesejahteraan masyarakat setempat;
      3. kegiatan penambangan dengan mempertimbangkan potensi bahan tambang, kondisi geologi, geohidrologi, dan kemampuan daya dukung lingkungan dalam kaitannya dengan kelestarian lingkungan;
      4. kegiatan penambangan dengan memiliki kajian studi lingkungan dan dilengkapi perizinan lingkungan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. pengembangan jaringan prasarana pada kawasan penambangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
6. kegiatan industri pengolahan hasil pertambangan terpadu dengan bahan baku pertambangan sepanjang tidak mengubah fungsi zonasi utama.

c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang tidak diperbolehkan meliputi:
1. kegiatan penambangan yang dapat merusak sarana lingkungan permukiman dan sistem jaringan prasarana;
2. kegiatan penambangan diperbukitan yang dibawahnya terdapat mata air;
3. kegiatan pengambilan material tambang yang dapat menimbulkan bencana di kawasan sekitarnya; dan
4. kegiatan penambangan di kawasan rawan bencana dengan tingkat kerentanan tinggi.

(2) Ketentuan khusus kawasan pertambangan mineral dan batubara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga

Penilaian Pelaksanaan Pemanfaatan Ruang

Pasal 181

Penilaian pelaksanaan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

a. penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
b. penilaian perwujudan RTR.

Pasal 182

(1) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 huruf a, terdiri atas:
   a. kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
   b. pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(2) Kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan dalam periode:
   a. selama pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan pelaksanaan dalam memenuhi ketentuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang paling lambat 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
   b. pasca pembangunan, dilakukan untuk memastikan kepatuhan hasil pembangunan dengan ketentuan dalam Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(3) Kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam periode selama pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, apabila ditemukan inkonsistensi/tidak dilaksanakan, maka akan dilakukan penyesuaian.

(4) Kepatuhan pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dalam periode pasca pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, apabila ditemukan inkonsistensi, dilakukan pengenaan sanksi.

(5) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pemerintah pusat dan dapat didelegasikan kepada Pemerintah Daerah.

(6) Pemenuhan prosedur perolehan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b huruf dilaksanakan dengan ketentuan:

a. apabila Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang diterbitkan tidak melalui prosedur yang benar, maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang batal demi hukum; dan
b. apabila Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang tidak sesuai akibat perubahan RTR, maka Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dibatalkan dan dapat dimintakan ganti kerugian yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang juga meliputi penilaian pernyataan mandiri pelaku usaha menengah kecil.

(8) Penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang sebagaimana yang dimaksud ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(9) Dalam hal penilaian pelaksanaan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang terhadap pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (6) terbukti tidak benar kegiatan pemanfaatan ruangnya dilakukan pembinaan oleh instansi Pemerintah Daerah yang menerbitkan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang.

Pasal 183

(1) Penilaian perwujudan RTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 huruf b terdiri atas:
a. penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang; dan
b. penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang.

(2) Penilaian perwujudan RTR dilakukan terhadap:
a. kesesuaian program;
b. kesesuaian lokasi; dan
c. kesesuaian waktu pelaksanaan kegiatan Pemanfaatan Ruang.

(3) Penilaian tingkat perwujudan rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan pembangunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana terhadap rencana Struktur Ruang.

(4) Penilaian tingkat perwujudan rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b dilakukan dengan penyandingan pelaksanaan program pengelolaan lingkungan, pembangunan berdasarkan perizinan berusaha, dan hak atas tanah terhadap rencana Pola Ruang.

(5) Penilaian perwujudan RTR dilakukan secara periodik dan terus menerus yaitu 1 (satu) kali dalam 5 (tahun) dan dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelum peninjauan kembali RTR.

(6) Tata cara penilaian perwujudan RTR selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat

Ketentuan Insentif dan Disinsentif

Pasal 184

(1) Ketentuan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
   a. insentif fiskal; dan/atau
   b. insentif non fiskal.

(2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa:
   a. pemberian keringanan pajak; dan/atau
   b. pengurangan retribusi.

(3) Insentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
   a. pemberian kompensasi;
   b. subsidi;
   c. imbalan;

d. sewa ruang;
e. urun saham;
f. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
g. penyediaan prasarana dan sarana;
h. penghargaan; dan/atau
i. publikasi atau promosi.

(4) Insentif fiskal dan/atau non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya berupa:
a. pemberian kompensasi;
b. pemberian penyediaan sarana dan prasarana;
c. penghargaan; dan/atau
d. publikasi atau promosi daerah.

(5) Insentif fiskal dan/atau non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat berupa:
a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
b. subsidi;
c. pemberian kompensasi;
d. imbalan;
e. sewa ruang;
f. urun saham;
g. fasilitasi Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
h. penyediaan prasarana dan sarana;
i. penghargaan; dan/atau
j. publikasi atau promosi.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian insentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 185

(1) Ketentuan disinsentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf c terdiri atas:
a. disinsentif fiskal; dan

b. disinsentif non fiskal.

(2) Disinsentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi.

(3) Disinsentif non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dapat berupa:
   a. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan;
   b. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana; dan/atau
   c. pemberian status tertentu.

(4) Disinsentif fiskal dan non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya berupa pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(5) Disinsentif fiskal dan/atau non fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat berupa:
   a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
   b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
   c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian disinsentif diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal 186

(1) Arahan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) huruf d dilakukan melalui pengenaan sanksi administratif.

(2) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap Orang yang :
   a. tidak menaati RTR yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi Ruang;
   b. tidak mematuhi ketentuan Pemanfaatan Ruang dalam RTR; dan

c. menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

(3) Pemeriksaan perubahan fungsi Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui audit Tata Ruang.

(4) Terhadap pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dapat langsung dikenakan sanksi administratif tanpa melalui proses audit Tata Ruang.

(5) Pengenaan sanksi administratif dikenakan berdasarkan kriteria besar atau kecilnya:
   a. dampak yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang;
   b. nilai manfaat pengenaan sanksi administratif yang diberikan terhadap Pemanfaatan Ruang; dan/atau
   c. kerugian publik yang ditimbulkan akibat pelanggaran Pemanfaatan Ruang.

(6) Pengenaan Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
   a. peringatan tertulis;
   b. denda administratif;
   c. penghentian sementara kegiatan;
   d. penghentian sementara pelayanan umum;
   e. penutupan lokasi;
   f. pencabutan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
   g. pembatalan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang;
   h. pembongkaran bangunan; dan/atau
   i. pemulihan fungsi Ruang.

(7) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

(8) Bentuk dan cara penghitungan denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b lebih lanjut diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IX

KELEMBAGAAN

Pasal 187

(1) Dalam rangka Penyelenggaraan Penataan Ruang dan kerja sama antar sektor/antar daerah bidang Penataan Ruang dibentuk Forum Penataan Ruang.
(2) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas untuk memberikan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
(3) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
(4) Anggota Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas instansi vertikal bidang pertanahan, perangkat daerah bersifat melekat pada jabatannya (*ex-officio*), asosiasi profesi, asosiasi akademisi, dan tokoh Masyarakat.
(5) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X

HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Hak Masyarakat

Pasal 188

(1) Dalam Penataan Ruang, setiap orang berhak untuk:
    a. berperan serta dalam proses perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan pengendalian Pemanfaatan Ruang;

b. mengetahui secara terbuka RTRW Daerah, RTR kawasan, rencana rinci Tata Ruang kawasan, termasuk tata letak dan tata bangunan;
c. menikmati manfaat Ruang dan/atau pertambahan nilai Ruang sebagai akibat dari Penataan Ruang;
d. mengajukan tuntutan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR diwilayahnya;
e. mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan Penataan Ruang dan/atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR kepada pejabat berwenang; dan
f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah dan/atau kepada pelaksana kegiatan Pemanfaatan Ruang apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RTR menimbulkan kerugian.

(2) Pelaksanaan hak Masyarakat untuk menikmati pertambahan nilai Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(3) Hak memperoleh penggantian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diselenggarakan dengan cara musyawarah di antara pihak yang berkepentingan atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Kewajiban Masyarakat

Pasal 189

(1) Dalam Pemanfaatan Ruang, setiap orang wajib:
a. menaati rencana Tata Ruang yang telah ditetapkan;

b. memanfaatkan Ruang sesuai dengan rencana Tata Ruang;
c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang; dan
d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

(2) Pelaksanaan kewajiban Masyarakat dalam Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah dan aturan-aturan Penataan Ruang yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Peran Masyarakat

Pasal 190

Penyelenggaraan Penataan Ruang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan peran Masyarakat pada tahap:
a. perencanaan Tata Ruang;
b. Pemanfaatan Ruang; dan
c. pengendalian Pemanfaatan Ruang.

Pasal 191

(1) Bentuk peran Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 huruf a berupa:
a. masukan; dan
b. kerja sama.

(2) Masukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
a. persiapan penyusunan RTR;
b. penentuan arah pengembangan Wilayah atau kawasan;
c. pengidentifikasian potensi dan masalah pembangunan Wilayah atau kawasan;

d. perumusan konsepsi RTR; dan/atau
e. penetapan RTR.

(3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang.

(4) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut tentang peran masyarakat dalam perencanaan Tata Ruang dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 192

Bentuk peran Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 huruf b berupa:

a. masukan mengenai kebijakan Pemanfaatan Ruang;
b. kerja sama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau sesama unsur Masyarakat dalam Pemanfaatan Ruang;
c. kegiatan Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RTR yang telah ditetapkan;
d. peningkatan efisiensi, efektivitas dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang laut, ruang udara dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
e. menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
f. kegiatan investasi dalam Pemanfaatan Ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 193

Bentuk peran Masyarakat dalam pengendalian Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 190 huruf c berupa:

a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi pelaksanaan RTR yang telah ditetapkan;
c. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan Pemanfaatan Ruang yang melanggar RTR yang telah ditetapkan; dan
d. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RTR.

Pasal 194

(1) Tata cara peran Masyarakat dalam Penataan Ruang di Wilayah Kabupaten dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan peran Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah.

BAB XI

PENYELESAIAN SENGKETA

Pasal 195

(1) Sengketa Penataan Ruang merupakan perselisihan antar pemangku kepentingan dalam pelaksanaan Penataan Ruang.
(2) Antar pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu antar orang perorangan, antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, antar Pemerintah Daerah, antara Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
(3) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang pada tahap pertama diupayakan berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat.

(4) Penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila tidak diperoleh kesepakatan, para pihak dapat menempuh upaya penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau di luar pengadilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyelesaian sengketa Penataan Ruang di luar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan melalui:
   a. negosiasi;
   b. mediasi; dan
   c. konsiliasi

(6) Sengketa Penataan Ruang yang terjadi akibat adanya perbedaan kebijakan pengaturan antar tingkatan pemerintah, para pemangku kepentingan dapat mengajukan fasilitasi penyelesaian kepada Forum Penataan Ruang.

(7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelesaian sengketa Penataan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
PEMBINAAN PENATAAN RUANG
Pasal 196

(1) Pembinaan Penataan Ruang diselenggarakan melalui:
   a. peningkatan kualitas dan efektifitas penyelenggaraan Penataan Ruang; dan
   b. peningkatan peran Masyarakat dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.

(2) Pemerintah Daerah Kabupaten melakukan pembinaan kepada Masyarakat.

(3) Masyarakat berperan aktif dalam pelaksanaan pembinaan Penataan Ruang untuk mencapai tujuan pembinaan Penataan Ruang.

(4) Bentuk pembinaan Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. koordinasi penyelenggaraan Penataan Ruang;

b. sosialisasi peraturan perundang-undangan dan pedoman bidang Penataan Ruang;
c. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Penataan Ruang;
d. pendidikan dan pelatihan;
e. penelitian, kajian, dan pengembangan;
f. pengembangan sistem informasi dan komunikasi Penataan Ruang;
g. penyebarluasan informasi Penataan Ruang kepada Masyarakat;
h. peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat; dan/atau
i. pengembangan profesi perencana Tata Ruang.

(5) Pelaksanaan pengembangan profesi perencana Tata Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf i dilakukan oleh Menteri.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 197

(1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang Penataan Ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana.

(2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.

(3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, Penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(5) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 198

Pengenaan sanksi pidana mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Penataan Ruang.

BAB XV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 199

(1) Kecamatan Rangkasbitung tidak diperkenankan kegiatan pertambangan.
(2) Kegiatan pertambangan di Kecamatan Rangkasbitung yang telah memperoleh izin dan masih berlaku pada saat peraturan ini ditetapkan, dapat tetap melaksanakan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pertambangan mineral dan batubara.
(3) Dalam hal kebijakan yang bersifat strategis yang menyebabkan perubahan Pemanfaatan Ruang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 200

(1) Semua peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan Penataan Ruang Daerah yang telah ada dinyatakan berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan belum diganti berdasarkan Peraturan Daerah ini.
(2) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya.
(3) Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
    a. apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun Pelaku Usaha tidak melaksanakan penggunaan dan

pemanfaatan tanah, Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang dibatalkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. untuk yang sudah dilaksanakan penggunaan dan pemanfaatan tanah, Pemanfaatan Ruang dilakukan sesuai Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang telah diterbitkan

Pasal 201

(1) Jangka waktu RTRW Kabupaten adalah 20 (dua puluh) tahun.

(2) RTRW Kabupaten dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali pada setiap periode 5 (lima) tahunan.

(3) Peninjauan kembali RTRW Kabupaten dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam periode 5 (lima) tahun apabila terjadi perubahan lingkungan strategis berupa:

a. bencana alam yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan Undang-Undang;
c. perubahan batas Wilayah daerah yang ditetapkan dengan Undang-Undang; dan
d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.

BAB XVI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 202

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak Tahun 2014-2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Nomor 20142) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 203

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lebak.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 18 Oktober 2023

BUPATI LEBAK,

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Diundangkan di Rangkasbitung
Pada tanggal 18 Oktober 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN LEBAK,

Cap/Ttd.

BUDI SANTOSO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023 NOMOR 7
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK, BANTEN : (7,39/2023)

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah Kabupaten Lebak

WIWIN BUDHYARTI, S.H., M.A
NIP 19810228 200604 2 009

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK

NOMOR 7 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBAK TAHUN 2023-2043

I. UMUM

Untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan berlandaskan Wawasan Nusantara dan Ketahanan Nasional, serta sejalan dengan kebijakan otonomi daerah yang nyata, luas, dan bertanggung jawab, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang menuntut kejelasan pendekatan dalam proses perencanaannya demi menjaga keselarasan, keserasian, keseimbangan, dan keterpaduan antar daerah, antara pusat dan daerah, antar sektor, dan antar pemangku kepentingan. Penataan ruang tersebut didasarkan pada pendekatan sistem, fungsi utama kawasan, wilayah administratif, kegiatan kawasan, dan nilai strategis kawasan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 memiliki kedudukan untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan tata ruang wilayah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota. RTRWN menjadi pedoman penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah provinsi dan Kabupaten serta keserasian antar sektor. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lebak

merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Banten ke dalam strategi pelaksanaan pemanfaatan ruang wilayah kota.

Sedangkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten (RTRWK) menjadi pedoman penataan ruang wilayah dalam upaya mewujudkan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan perkembangan antar wilayah pengembangan serta keserasian antar sektor. Adapun fungsi RTRWK adalah sebagai acuan dalam penyusunan RPJPD dan RPJMD, acuan dalam pemanfaatan ruang wilayah kabupaten, acuan untuk mewujudkan keseimbangan pembangunan dalam wilayah kabupaten, acuan lokasi investasi dalam wilayah kabupaten yang dilakukan pemerintah, masyarakat, dan swasta, pedoman untuk penyusunan rencana tata ruang kawasan strategis kabupaten, dasar pengendalian pemanfaatan ruang di wilayah Kabupaten yang meliputi indikasi arahan peraturan zonasi, ketentuan Kesesuaian Penataan Ruang, arahan insentif dan disinsentif, serta arahan sanksi dan acuan dalam administrasi pertanahan.

Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional, Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, dan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten/Kota mencakup ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi, sebagai tempat masyarakat melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya, serta merupakan suatu sumber daya yang harus ditingkatkan upaya pengelolaannya secara bijaksana. Dengan demikian RTRW Kabupaten Lebak sangatlah strategis untuk menjadi pedoman dalam penyelenggaraan penataan ruang, serta untuk menjaga kegiatan pembangunan agar tetap sesuai dengan kaidah- kaidah pembangunan berkelanjutan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1)

Perubahan luas wilayah Kabupaten Lebak terjadi karena terdapat pembaruan garis batas wilayah antar kabupaten yang tertuang

dalam Berita Acara Asistensi & Supervisi Peta Dasar, 20 Desember 2018, Badan Informasi Geospasial (BIG), serta metode analisis perhitungan *Geospatial Information System* (GIS) dengan sistem proyeksi CEA (*Cylindrical Equal Area*).

Ayat (2)

Cukup Jelas

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Ayat (1)

Pelabuhan Pengumpan yang dimaksud meliputi:

a. Pelabuhan Bayah di Kecamatan Bayah
b. Pelabuhan Muarabinuangeun di Kecamatan Wanasalam

Ayat (2)

Terminal Khusus yang dimaksud adalah Terminal Khusus yang berada dalam Kawasan PT Cemindo Gemilang di Kecamatan Bayah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Pelabuhan perikanan pantai yang dimaksud adalah Pelabuhan Binuanguen di Kecamatan Wanasalam.

Ayat (5)

Pangkalan pendaratan ikan yang dimaksud adalah PPI Cireundeu di Kecamatan Cilograng.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) yang dimaksud berada di Gunung Endut, Kecamatan Sobang.

Ayat (4)

Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH) yang dimaksud berada di:

a. PLTMH Cikidang di Kecamatan Bayah
b. PLTMH Cisungsang II di Kecamatan Cibeber
c. PLTMH Cikotok di Kecamatan Cibeber
d. PLTMH Cisono di Kecamatan Cibeber
e. PLTMH Karang Ropong (Cibareno-1) di Kecamatan Cibeber
f. PLTMH Situmulya di Kecamatan Cibeber
g. PLTMH Pasundan di Kecamatan Cibeber
h. PLTMH Bojong Cisono di Kecamatan Cigemblong
i. PLTMH Cibareno di Kecamatan Cilograng
j. PLTMH Cikamunding di Kecamatan Cilograng
k. PLTMH Cisimeut di Kecamatan Cipanas
l. PLTMH Cisiih Leutik di Kecamatan Panggarangan
m. PLTMH Cisiih Mandiri di Kecamatan Panggarangan
n. PLTMH Lebak Tundun di Kecamatan Panggarangan
o. PLTMH Nagajaya di Kecamatan Sobang

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Jaringan tetap yang dimaksud berupa jaringan serat optik.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Sistem pengelolaan air limbah non domestik direncanakan berupa pengelolaan limbah di setiap lokasi industri.

Ayat (3)

Sistem pengelolaan air limbah domestik yang direncanakan berupa:

a. Penanganan limbah secara onsite dengan pembangunan jamban keluarga, jamban komunal dan mandi cuci kakus umum
b. penanganan limbah secara offsite dengan sistem perpipaan dengan membangun Instalasi Pengolah Air Limbah (IPAL) komunal yang berada di kecamatan Maja, kecamatan Cibadak,

kecamatan Rangkasbitung, kecamatan Cipanas, kecamatan Leuwidamar, kecamatan Gunungkencana, kecamatan Malingping, kecamatan Panggarangan, kecamatan Bayah, kecamatan Kalanganyar, dan kecamatan Cikulur.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 38

Sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) yang dimaksud berada di RSUD dr. Adjidarmo, Kecamatan Rangkasbitung dan di Kawasan Peruntukan Industri di Kecamatan Cimarga.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Kawasan pertanian dengan luas kurang lebih 226.839,12 (dua ratus dua puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh sembilan dua koma satu dua) Hektare terdiri atas:

a. Kawasan Tanaman Pangan dengan luas kurang lebih 46.433,07 (empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tiga koma nol tujuh) Hektare terdiri atas 36.386 (tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam) Hektare tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini, dan sisa luasan berada di:
   1. Kawasan Hutan Lindung;
   2. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
   3. Kawasan Hutan Produksi Tetap;
   4. Kawasan Taman Nasional;
   5. Kawasan Cagar Budaya;
   6. Kawasan Badan Air;
   7. kawasan perkebunan;
   8. Kawasan Perkebunan Rakyat;
   9. kawasan permukiman perdesaan;
   10. kawasan permukiman perkotaan;
   11. kawasan peruntukan industri; dan
   12. kawasan peternakan;
b. Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas kurang lebih 34.949,05 (tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma nol lima) Hektare, terdiri atas 28.010 (dua puluh delapan ribu sepuluh) Hektare yang sesuai dengan kriteria dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Daerah ini.

c. kawasan perkebunan dengan luas kurang lebih 142.071 (seratus empat puluh dua ribu tujuh puluh satu) hektare; dan
d. kawasan peternakan dengan luas kurang lebih 3.386 (tiga ribu tiga ratus delapan puluh enam) Hektare.

Ayat (2)

Kawasan Tanaman Pangan dengan luas kurang lebih 46.433,07 (empat puluh enam ribu empat ratus tiga puluh tiga koma nol tujuh) Hektare, merupakan luas Lahan Sawah Dilindungi berdasarkan Berita Acara Kesepakatan Verifikasi Aktual Penyelesaian LSD Tidak Sesuai Peruntukan dengan Rencana Tata Ruang (RTR) tanggal 27 Oktober 2022, yang terdiri atas 36.386 (tiga puluh enam ribu tiga ratus delapan puluh enam) Hektare berupa Kawasan Tanaman Pangan dan tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Daerah ini, dan sisa luasan berada di:

a. Kawasan Hutan Lindung;
b. Kawasan Hutan Produksi Terbatas;
c. Kawasan Hutan Produksi Tetap;
d. Kawasan Taman Nasional;
e. Kawasan Cagar Budaya;
f. Kawasan Badan Air;
g. kawasan perkebunan;
h. Kawasan Perkebunan Rakyat;
i. kawasan permukiman perdesaan;
j. kawasan permukiman perkotaan;
k. kawasan peruntukan industri; dan
l. kawasan peternakan.

Ayat (3)

Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dengan luas kurang lebih 34.949,05 (tiga puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh sembilan koma nol lima) Hektare, terdiri atas 28.010 (dua puluh delapan ribu sepuluh) Hektare yang sesuai dengan kriteria dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Daerah ini.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

Pasal 70

Cukup jelas.

Pasal 71

Cukup jelas.

Pasal 72

Cukup jelas.

Pasal 73

Cukup jelas.

Pasal 74

Cukup jelas.

Pasal 75

Cukup jelas.

Pasal 76

Cukup jelas.

Pasal 77

Cukup jelas.

Pasal 78

Cukup jelas.

Pasal 79

Cukup jelas.

Pasal 80

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 81

Cukup jelas.

Pasal 82

Cukup jelas.

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas.

Pasal 85

Cukup jelas.

Pasal 86

Cukup jelas.

Pasal 87

Cukup jelas.

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas.

Pasal 90

Cukup jelas.

Pasal 91

Cukup jelas.

Pasal 92

Cukup jelas.

Pasal 93

Cukup jelas.

Pasal 94

Cukup jelas.

Pasal 95

Cukup jelas.

Pasal 96

Cukup jelas.

Pasal 97

Cukup jelas.

Pasal 98

Cukup jelas.

Pasal 99

Cukup jelas.

Pasal 100

Cukup jelas.

Pasal 101

Cukup jelas.

Pasal 102

Cukup jelas.

Pasal 103

Cukup jelas.

Pasal 104

Cukup jelas.

Pasal 105

Cukup jelas.

Pasal 106

Cukup jelas.

Pasal 107

Cukup jelas.

Pasal 108

Cukup jelas.

Pasal 109

Cukup jelas.

Pasal 110

Cukup jelas.

Pasal 111

Cukup jelas.

Pasal 112

Cukup jelas.

Pasal 113

Cukup jelas.

Pasal 114

Cukup jelas.

Pasal 115

Cukup jelas.

Pasal 116

Cukup jelas.

Pasal 117

Cukup jelas.

Pasal 118

Cukup jelas.

Pasal 119

Cukup jelas.

Pasal 120

Cukup jelas.

Pasal 121

Cukup jelas.

Pasal 122

Cukup jelas.

Pasal 123

Cukup jelas.

Pasal 124

Cukup jelas.

Pasal 125

Cukup jelas.

Pasal 126

Cukup jelas.

Pasal 127

Cukup jelas.

Pasal 128

Cukup jelas.

Pasal 129

Cukup jelas.

Pasal 130

Cukup jelas.

Pasal 131

Cukup jelas.

Pasal 132

Cukup jelas.

Pasal 133

Cukup jelas.

Pasal 134

Cukup jelas.

Pasal 135

Cukup jelas.

Pasal 136

Cukup jelas.

Pasal 137

Cukup jelas.

Pasal 138

Cukup jelas.

Pasal 139

Cukup jelas.

Pasal 140

Cukup jelas.

Pasal 141

Cukup jelas.

Pasal 142

Cukup jelas.

Pasal 143

Cukup jelas.

Pasal 144

Cukup jelas.

Pasal 145

Cukup jelas.

Pasal 146

Cukup jelas.

Pasal 147

Cukup jelas.

Pasal 148

Cukup jelas.

Pasal 149

Cukup jelas.

Pasal 150

Cukup jelas.

Pasal 151

Cukup jelas.

Pasal 152

Cukup jelas.

Pasal 153

Cukup jelas.

Pasal 154

Cukup jelas.

Pasal 155

Cukup jelas.

Pasal 156

Cukup jelas.

Pasal 157

Cukup jelas.

Pasal 158

Cukup jelas.

Pasal 159

Cukup jelas.

Pasal 160

Cukup jelas.

Pasal 161

Cukup jelas.

Pasal 162

Cukup jelas.

Pasal 163

Cukup jelas.

Pasal 164

Cukup jelas.

Pasal 165

Cukup jelas.

Pasal 166

Cukup jelas.

Pasal 167

Cukup jelas.

Pasal 168

Cukup jelas.

Pasal 169

Cukup jelas.

Pasal 170

Cukup jelas.

Pasal 171

Cukup jelas.

Pasal 172

Cukup jelas.

Pasal 173

Cukup jelas.

Pasal 174

Cukup jelas.

Pasal 175

Cukup jelas.

Pasal 176

Cukup jelas.

Pasal 177

Cukup jelas.

Pasal 178

Cukup jelas.

Pasal 179

Kawasan Cagar Budaya dalam ketentuan khusus merupakan Kawasan Hutan Adat berdasarkan :

- KEPMEN LHK NO. SK 6748/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/12/2016 tentang Penetapan Hutan Adat Kesepuhan Karang seluas ± 462 (empat ratus enam puluh dua) Hektare di Desa Jagaraksa Kecamatan Muncang Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- KEPMEN LHK NO. SK 10247/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/12/2019 tentang Penetapan Hutan Adat Kesepuhan Cibarani kepada Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cibarani seluas ± 490 (empat ratus sembilan puluh) Hektare pada Kawasan Hutan Produksi Tetap (HP) di Desa Cibarani Kecamatan Cirinten Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- KEPMEN LHK NO. SK 6164/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/7/2019 tentang Penetapan Hutan Adat Kesepuhan Citorek kepada Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Citorek seluas ± 1.647 (seribu enam ratus empat puluh tujuh) Hektare berada pada kawasan hutan konservasi (HK) Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) seluas ± 594 (lima ratus sembilan puluh empat) Hektare dan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas ± 1.053 (seribu lima puluh tiga) Hektare di Desa Citorek Timur, Desa Citorek Tengah, Desa Citorek Barat, Desa Citorek Kidul, Desa Citorek

Sabrang Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten;

- KEPMEN LHK NO. SK 1547/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/2/2019 tentang Penetapan Hutan Adat Kesepuhan Pasir Eurih Kepada Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Pasir Eurih seluas ± 580 (lima ratus delapan puluh) Hektare yang terletak di Desa Sindanglaya Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- KEPMEN LHK NO. SK 1548/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/2/2019 tentang Penetapan Hutan Adat Kesepuhan Cirompang kepada Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cirompang seluas ± 306 (tiga ratus enam) Hektare yang terletak di Desa Cirompang Kecamatan Sobang Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- KEPMEN LHK NO. SK 10084/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2022 tentang Penetapan Status Hutan Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisungsang seluas ± 1.599 (seribu lima ratus sembilan puluh sembilan) Hektare di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- KEPMEN LHK NO. SK 10083/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2022 tentang Penetapan Status Hutan Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cisitu seluas ± 1.967 (seribu sembilan ratus enam puluh tujuh) Hektare yang terletak di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten;
- KEPMEN LHK NO.SK 10085/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2022 tentang Penetapan Status Hutan Adat dalam Wilayah Masyarakat Hukum Adat Kasepuhan Cibedug seluas ± 1.268 (seribu dua ratus enam puluh delapan) Hektare di Kecamatan Cibeber Kabupaten Lebak Provinsi Banten.

Pasal 180

Cukup jelas.

Pasal 181

Cukup jelas.

Pasal 182

Cukup jelas.

Pasal 183

Cukup jelas.

Pasal 184

Cukup jelas.

Pasal 185

Cukup jelas.

Pasal 186

Cukup jelas.

Pasal 187

Cukup jelas.

Pasal 188

Cukup jelas.

Pasal 189

Cukup jelas.

Pasal 190

Cukup jelas.

Pasal 191

Cukup jelas.

Pasal 192

Cukup jelas.

Pasal 193

Cukup jelas.

Pasal 194

Cukup jelas.

Pasal 195

Cukup jelas.

Pasal 196

Cukup jelas.

Pasal 197

Cukup jelas.

Pasal 198

Cukup jelas.

Pasal 199

Cukup jelas.

Pasal 200

Cukup jelas.

Pasal 201

Cukup jelas.

Pasal 202

Cukup jelas.

Pasal 203

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LEBAK NOMOR 20237

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG

U

SKALA : 1:153.000

0 4 8 16 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat
- Stasiun Penumpang
- Terminal Barang
- Terminal Penumpang Tipe A
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Jalan Tol
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Transportasi Laut
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus

Sistem Jaringan Energi
- Gardu Listrik
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- Bangunan Pengendalian Banjir
- Bangunan Sumber Daya Air
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Tetap

Sistem Jaringan Prasarana Lainnya
- Bak Penampungan Air Hujan
- Sumur Pompa
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Tempat Evakuasi Bencana
- Jaringan Air Baku
- Unit Distribusi
- Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder
- Jalur Evakuasi Bencana

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Dasar dan Peta Tematik telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
2. Citra Satelit Spot 6, Perekaman Tahun 2017 Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
3. Permendagri No.43 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
4. Permendagri No.55 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
5. Permendagri No.57 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
6. Permendagri No.47 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tanggerang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
7. Permendagri No.4 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah
8. Hasil Analisis 2018 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI LEBAK

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM PUSAT PERMUKIMAN

U

SKALA : 1:153.000

0 4 8 16 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Pusat Permukiman
- Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)
- Pusat Kegiatan Lokal (PKL)
- Pusat Pelayanan Kawasan
- Pusat Pelayanan Lingkungan

Sistem Jaringan Transportasi
- Jalan Tol
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Dasar dan Peta Tematik telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
2. Citra Satelit Spot 6, Perekaman Tahun 2017 Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
3. Permendagri No.43 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
4. Permendagri No.55 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
5. Permendagri No.57 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
6. Permendagri No.47 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tanggerang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
7. Permendagri No.4 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah
8. Hasil Analisis 2018 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI LEBAK

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TRANSPORTASI

U

SKALA : 1:153.000

0 4 8 16 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Transportasi

Transportasi Darat
- Stasiun Penumpang
- Terminal Barang
- Terminal Penumpang Tipe A
- Terminal Penumpang Tipe B
- Terminal Penumpang Tipe C
- Jalan Tol
- Jalan Arteri Primer
- Jalan Kolektor Primer
- Jalan Lokal Primer
- Jalan Lokal Sekunder
- Jalan Lingkungan Primer
- Jaringan Jalur Kereta Api Antarkota

Transportasi Laut
- Pangkalan Pendaratan Ikan
- Pelabuhan Perikanan Pantai
- Pelabuhan Pengumpan Lokal
- Terminal Khusus

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Dasar dan Peta Tematik telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
2. Citra Satelit Spot 6, Perekaman Tahun 2017. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
3. Permendagri No.43 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
4. Permendagri No.55 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
5. Permendagri No.57 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
6. Permendagri No.47 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tanggerang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
7. Permendagri No.4 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah
8. Hasil Analisis 2018 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI LEBAK

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Lampiran IV

Jaringan Jalan Lokal

NO	PENENTUAN RUAS JALAN	PANJANG RUAS (KM)	FUNGSI JALAN	FUNGSI SISTEM JARINGAN JALAN PRIMER	KARAKTERISTIK		
	NAMA RUAS JALAN				JENIS PERKERASAN	KELAS JALAN	LEBAR RATA-RATA (M)
	JALAN LUAR KOTA						
1	RANGKASBITUNG - KOLELET	6,1	JLP (Jalan Lokal Primer)	PKL-PKL	BETON, LASTON	IIIB	4
2	NAMENG - KOLELET	4,9	JLP (Jalan Lokal Primer)	PKL-PKL	BETON, LASTON	IIIB	2,50
3	CISALAK - CITERAS	5,7	JLP (Jalan Lokal Primer)	PKL-PKL	BETON, BATU	IIIB	5
4	PASIRJATI - CIBADAK	7,9	JLP (Jalan Lokal Primer)	PKL-PKL	LASTON	IIIB	2,50
5	TAJUR - BOJONGLELES	1,3	JLP (Jalan Lokal Primer)	PKW-PK.LING	LASTON	IIIB	3
6	PASIRKUTU - CILEUNGSIR	4,9	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	LASTON	IIIB	3
7	CIGOONG - PASIRMELATI	4,95	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	LASTON	IIIB	3
8	JAMBUBOL - MUARADUA	1,8	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	BETON, LASTON	IIIB	5
9	BANJARSARI - CIRINTEN	23,9	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	BETON, LASTON	IIIB	5
10	GUNUNGKENCANA - MALINGPING	30,5	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PKL	BETON, LASTON	IIIB	6
11	LEBAKSIUH - PASARKUPA	12,1	Jalan Strategis Kabupaten (JSK)	PKL - KSK	LASTON	IIIB	4
12	LEUWIDAMAR - PASARKUPA	40,15	Jalan Strategis Kabupaten (JSK)	PKL - KSK	BETON, LASTON	IIIB	4
13	PAREMPENG - JAYAMANIK	0,85	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	BETON	IIIB	5,5
14	SIMPANG - CIBOLEGER	7,1	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	LASTON	IIIB	4
15	CIBOLEGER - GARDU	8,8	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	LASTON	IIIB	4

NO	PENENTUAN RUAS JALAN	PANJANG RUAS (KM)	FUNGSI JALAN	FUNGSI SISTEM JARINGAN JALAN PRIMER	KARAKTERISTIK		
	NAMA RUAS JALAN				JENIS PERKERASAN	KELAS JALAN	LEBAR RATA-RATA (M)
16	RANGKASBITUNG - GAJRUG	49,5	JLP (Jalan Lokal Primer)	PKL-PKL	LASTON, BETON	IIIB	4
17	AWEH (CIBEUREUM) - CIKAPEK	20,75	JLP (Jalan Lokal Primer)	PKL-PKL	BETON, LASTON	IIIB	4
18	PALAYANGAN - MEKARJAYA	1,85	JLP (Jalan Lokal Primer)	PKL-PKL	BETON, LASTON	IIIB	4
19	LEUWIJAKSI - GUNUNGANTEN	5,9	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	BETON, LASTON	IIIB	4
20	CIBUNGUR (SABAGI) - SINDANGWANGI	24,00	JLP (Jalan Lokal Primer)	PKL-PKL	LASTON	IIIB	4
21	NEGLASARI - SINDANGSARI	7,3	JLP (Jalan Lokal Primer)	PKL-PKL	BETON, LASTON	IIIB	3
22	JAMPANG - MUNCANG	19,00	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PKL	BETON, LASTON	IIIB	3
23	GARDUBATOK - CANDI	7,5	JLP (Jalan Lokal Primer)	PKL-PK.LING	BETON, LASTON	IIIB	6
24	GEDONG - CURUGBITUNG	7,9	JLP (Jalan Lokal Primer)	PKL-PK.LING	BETON, LASTON	IIIB	5
25	PASIRKACAPI - COKEL	12,5	JLP (Jalan Lokal Primer)	PKL-PKL	LASTON, BATU	IIIB	4
26	LEUWIDULANG - PASIRNANGKA	1,3	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	LASTON	IIIB	3
27	GURADOG - HAMBERANG	3,05	JLP (Jalan Lokal Primer)	PKL-PKL	BETON, LASTON	IIIB	6
28	KOPI - SANGIANG	19,1	JSK (Jalan Strategis Kabupaten)	PKL-KSK	BETON, LASTON	IIIB	4
29	KADUBITUNG - BUJAL	9,5	JSK (Jalan Strategis Kabupaten)	KSK-PKL	BETON, LASTON	IIIB	3
30	LINGKAR - PASAR GAJRUG	0,6	JLP (Jalan Lokal Primer)	PKL-PKL	BETON	IIIB	5
31	SAJIRA - KALAWIJO	8,25	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PKL	BETON, LASTON	IIIB	4

NO	PENENTUAN RUAS JALAN	PANJANG RUAS (KM)	FUNGSI JALAN	FUNGSI SISTEM JARINGAN JALAN PRIMER	KARAKTERISTIK		
	NAMA RUAS JALAN				JENIS PERKERASAN	KELAS JALAN	LEBAR RATA-RATA (M)
32	SOMANG - SIMPANG	5,8	JSK (Jalan Strategis Kabupaten)	KSK-PKL	BETON, LASTON	IIIB	5
33	KADUBANA - PICUNG	12,7	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	BETON, LASTON	IIIB	4
34	CILELES - POSKO	13,55	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	BETON, LASTON	IIIB	5
35	TALAGA - PANGASAMAN	3,7	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	BETON	IIIB	5
36	CALEMBOH - TOPASARI	1,7	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	BETON	IIIB	5
37	PASIRHUNI - KUMPAY	6,00	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PKL	LASTON	IIIB	5
38	CIMINYAK - CIGEMBLONG	46,8	JSK (Jalan Strategis Kabupaten)	KSK-PKL	LASTON	IIIB	3
39	SOBANG - CIMERAK	6,15	JSK (Jalan Strategis Kabupaten)	KSK-PKL	BETON, LASTON	IIIB	2,50
40	KERTA - PASIRBUNTU	6,6	JLP (Jalan Lokal Primer)	PKL-PKL	LAPEN, BATU	IIIB	3
41	CIMAMPANG - KIARA PAYUNG (MAKO BRIMOB)	0,8	JLP (Jalan Lokal Primer)	PKL-PK.LING	LASTON	IIIB	5
42	SITUREGEN - PASARKUPA	33,4	JSK (Jalan Strategis Kabupaten)	KSK-PKL	BETON, LASTON	IIIB	3
43	LEBAKJAHA - MALINGPING SELATAN	0,7	JSK (Jalan Strategis Kabupaten)	PKL-KSK	LASTON	IIIC	3
44	MUARA - BINUANGEUN	4,85	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	LASTON	IIIB	3
45	BOLANG - WANASALAM	14,4	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PKL	LASTON	IIIB	4
46	BEJOD - KATAPANG	7,9	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PKL	LASTON	IIIB	5
47	CIHARA - SUKAHUJAN	10,4	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	LASTON, BATU	IIIB	3

NO	PENENTUAN RUAS JALAN	PANJANG RUAS (KM)	FUNGSI JALAN	FUNGSI SISTEM JARINGAN JALAN PRIMER	KARAKTERISTIK		
	NAMA RUAS JALAN				JENIS PERKERASAN	KELAS JALAN	LEBAR RATA-RATA (M)
48	SUKAHUJAN - CIGEMBLONG	19,65	JSK (Jalan Strategis Kabupaten)	KSK-PKL	BETON, LASTON, BATU	IIIB	3
49	CIBAYAWAK - CIAWI	19,8	JLP (Jalan Lokal Primer)	PKL-PK.LING	LASTON	IIIB	4
50	CIKATOMAS - TEGALLUMBU	15,35	JSK (Jalan Strategis Kabupaten)	KSK-PKL	LASTON,	IIIB	2,50
51	PASIRKURAY - CISITU/CIKIDANG	6,55	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	LASTON	IIIB	3
52	CIPARAY - WARUNGBANTEN	13,3	JSK (Jalan Strategis Kabupaten)	KSK - PKL	LASTON	IIIB	4
	JALAN DALAM KOTA						
53	R. TUMENGGUNG HARDIWINANGUN	1,13	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	LASTON	IIIC	10
54	MULTATULI	1,03	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	LASTON	IIIC	14
55	H.M.IKO JATMIKO	0,7	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	LASTON	IIIC	11
56	MAULANA YUSUF	0,55	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	LASTON	IIIC	8
57	Ir. H. JUANDA	1,56	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	LASTON	IIIC	8
58	BAKTI MANUNGGAL	1,06	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	LASTON	IIIC	4
59	MAYOR DJAMAL ALIM	1,00	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	LASTON	IIIC	4
60	LL.RE.MARTADINATA	1,75	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	LASTON	IIIC	5
61	KH. MOCH HARUN (TALAGA BIRU)	0,52	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	LASTON	IIIC	3
62	SYECH NAWAWI	1,25	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	LASTON	IIIC	4
63	LASKAR AMPERA	0,41	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	LASTON	IIIC	5

NO	PENENTUAN RUAS JALAN	PANJANG RUAS (KM)	FUNGSI JALAN	FUNGSI SISTEM JARINGAN JALAN PRIMER	KARAKTERISTIK		
	NAMA RUAS JALAN				JENIS PERKERASAN	KELAS JALAN	LEBAR RATA-RATA (M)
64	MAULANA HASANUDIN	2,58	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	BETON	IIIC	6
65	TB. MOCH.HASYIM	1,3	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	LASTON	IIIC	3
66	R. BIDIN SURYAGUNAWAN	0,77	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	LASTON	IIIC	3
67	SILIWANGI	4,4	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	LASTON	IIIC	11
68	TB. HASAN	2,15	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	LASTON	IIIC	5
69	LANGLANGBUANA	1,75	JLP (Jalan Lokal Primer)	PK.LING-PK.LING	LASTON	IIIC	3

Sumber : SK Bupati Lebak, Nomor 620/Kep.82-PUPR/2023 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten

BUPATI LEBAK

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Lampiran V

Jaringan Jalan Lingkungan

NO	PENENTUAN RUAS JALAN	PANJANG RUAS (KM)	FUNGSI JALAN	FUNGSI SISTEM JARINGAN JALAN PRIMER	KARAKTERISTIK		
	NAMA RUAS JALAN				JENIS PERKERASAN	KELAS JALAN	LEBAR RATA-RATA (M)
	JALAN LUAR KOTA						
1	PAMATANG WARU - TOPASARI	6,2	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PK.LING-PERSIL	BETON	IIIB	5
2	CIMAO - GUNUNGBUNGBANG	4,85	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PK.LING	BATU	IIIB	4
3	KUMPAY - CIPARIAMA	4,5	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PKL-PERSIL	LASTON, BATU	IIIB	3
4	SOBANG - CITOREK BARAT	10,45	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PK.LING	BETON, LAPEN ,BATU	IIIB	2,50
	JALAN DALAM KOTA						
5	KITARUNG	0,37	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PERSIL	LASTON	IIIC	3
6	KIMAKLUM	0,24	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PERSIL	LASTON	IIIC	6
7	KH.SYAM'UN	0,3	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PERSIL	LASTON	IIIC	3
8	SUNAN BONANG	0,23	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PERSIL	LASTON	IIIC	6
9	KH. WASYID 1	0,22	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PERSIL	LASTON	IIIC	3
10	KH. WASYID 2	0,12	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PERSIL	LASTON	IIIC	3
11	PATIH DERUS	0,22	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PERSIL	LASTON	IIIC	10

NO	PENENTUAN RUAS JALAN	PANJANG RUAS (KM)	FUNGSI JALAN	FUNGSI SISTEM JARINGAN JALAN PRIMER	KARAKTERISTIK		
	NAMA RUAS JALAN				JENIS PERKERASAN	KELAS JALAN	LEBAR RATA-RATA (M)
12	LETNAN MUHARAM	0,22	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PERSIL	LASTON	IIIC	8
13	R. MURYANI NATAATMAJA 1	0,15	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PERSIL	LASTON	IIIC	3
14	R. MURYANI NATAATMAJA 2	0,13	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PERSIL	LASTON	IIIC	17
15	R. MURYANI NATAATMAJA 3	0,12	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PERSIL	LASTON	IIIC	11
16	ABDI NEGARA	0,3	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PERSIL	LASTON	IIIC	8
17	KAUM (ALUN - ALUN BARAT)	0,15	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PERSIL	LASTON	IIIC	5
18	BERINGIN	0,38	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PERSIL	LASTON	IIIC	3
19	VETERAN	0,16	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PERSIL	LASTON	IIIC	3
20	BHAYANGKARA	0,14	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PERSIL	LASTON	IIIC	4
21	MA. SALMUN	0,27	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PERSIL	LASTON	IIIC	2
22	SUNAN GIRI	0,59	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PERSIL	LASTON	IIIC	8
23	RA.KARTINI	0,42	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PERSIL	LASTON	IIIC	8

NO	PENENTUAN RUAS JALAN		PANJANG RUAS (KM)	FUNGSI JALAN	FUNGSI SISTEM JARINGAN JALAN PRIMER	KARAKTERISTIK		
	NAMA RUAS JALAN					JENIS PERKERASAN	KELAS JALAN	LEBAR RATA-RATA (M)
24	R. HOLAND SUKADININGRAT	0,35	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PERSIL	LASTON	IIIC	4
25	KOTA BARU	0,35	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PERSIL	LASTON	IIIC	4
26	DJAJA RUKMANTARA	0,44	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PERSIL	LASTON	IIIC	4
27	TB.SURYAATMADJA	0,77	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PERSIL	LASTON	IIIC	8
28	KAPUGERAN	0,28	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PERSIL	LASTON	IIIC	3
29	H. SAMAYA	0,41	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PERSIL	LASTON	IIIC	3
30	DEWI SARTIKA 1	1,04	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PERSIL	LASTON	IIIC	3
31	DEWI SARTIKA 2	0,24	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PERSIL	LASTON	IIIC	3
32	DEWI SARTIKA 3	0,08	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PERSIL	LASTON	IIIC	3
33	KIHAJAR DEWANTARA	0,46	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PERSIL	LASTON	IIIC	3
34	BUDI UTOMO	0,35	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PERSIL	LASTON	IIIC	3
35	KH. ABDUL LATIF	0,81	Jling.P (Jalan Lingkungan Primer)	PERSIL-PERSIL	LASTON	IIIC	3

Sumber : SK Bupati Lebak, Nomor 620/Kep.82-PUPR/2023 Tentang Penetapan Status Ruas Jalan Kabupaten

BUPATI LEBAK

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN VI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN ENERGI

U

SKALA : 1:153.000

0 4 8 16 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Energi
- Gardu Listrik
- Pembangkit Listrik Lainnya
- Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)
- Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)
- Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)
- Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)
- Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET)
- Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)
- Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)
- Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Dasar dan Peta Tematik telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
2. Citra Satelit Spot 6, Perekaman Tahun 2017. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
3. Permendagri No.43 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
4. Permendagri No.55 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
5. Permendagri No.57 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
6. Permendagri No.47 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tanggerang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
7. Permendagri No.4 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah
8. Hasil Analisis 2018 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI LEBAK

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

595000 mT 610000 625000 640000 655000 670000 mT

106°0'0" BT 106°15'0" 106°30'0" BT

9305000 mU 9290000 9275000 9260000 9245000 9230000 mU

6°30'0" LS 6°45'0" 7°0'0" LS

KAB. SERANG

KAB. TANGERANG

KAB. PANDEGLANG

PROV. BANTEN

PROV. JAWA BARAT

KAB. LEBAK

Kec. Warunggunung
Kec. Cibadak
Kec. Rangkasbitung
Kec. Maja
Kec. Kalanganyar
Kec. Cikulur
Kec. Curugbitung
Kec. Cimarga
Kec. Sajira
Kec. Cileles
Kec. Leuwidamar
Kec. Muncang
Kec. Cipanas
Kec. Bojongmanik
Kec. Gunungkencana
Kec. Banjarsari
Kec. Lebakgedong
Kec. Cirinten
Kec. Sobang
Kec. Cijaku
Kec. Cigemblong
Kec. Wanasalam
Kec. Malingping
Kec. Cibeber
Kec. Panggarangan
Kec. Cihara
Kec. Bayah
Kec. Cilograng

S A M U D R A H I N D I A

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN VII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN TELEKOMUNIKASI

U

SKALA : 1:153.000

0 4 8 16 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG

Sistem Jaringan Telekomunikasi
- Jaringan Bergerak Seluler
- Jaringan Tetap

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Dasar dan Peta Tematik telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
2. Citra Satelit Spot 6, Perekaman Tahun 2017. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
3. Permendagri No.43 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
4. Permendagri No.55 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
5. Permendagri No.57 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
6. Permendagri No.47 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tanggerang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
7. Permendagri No.4 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah
8. Hasil Analisis 2018 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI LEBAK

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN SUMBER DAYA AIR

U

SKALA : 1:153.000

0 4 8 16 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Sumber Daya Air
- Bangunan Pengendalian Banjir
- Bangunan Sumber Daya Air
- Jaringan Irigasi Primer
- Jaringan Irigasi Sekunder

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Dasar dan Peta Tematik telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
2. Citra Satelit Spot 6, Perekaman Tahun 2017 Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
3. Permendagri No.43 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
4. Permendagri No.55 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
5. Permendagri No.57 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
6. Permendagri No.47 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tanggerang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
7. Permendagri No.4 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah
8. Hasil Analisis 2018 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI LEBAK

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Lampiran IX

Sistem Jaringan Irigasi

NO.	Kecamatan	Jaringan Irigasi	
		Primer	**Sekunder**
1	Banjarsari	1. Irigasi Ciaris ; 2. Irigasi Ciaseum ; 3. Irigasi Ciateul ; 4. Irigasi Ciateul 2 ; 5. Irigasi Cibarahung ; 6. Irigasi Cibeureum ; 7. Irigasi Cibodas 1 ; 8. Irigasi Cibodas 2 ; 9. Irigasi Cigendong ; 10. Irigasi Cikapas ; 11. Irigasi Cikatulampa ; 12. Irigasi Cikeongmas ; 13. Irigasi Ciluluk ; 14. Irigasi Cimadang ; 15. Irigasi Cingunun ; 16. Irigasi Ciomas ; 17. Irigasi Ciranggong ; 18. Irigasi Ciruji ; 19. Irigasi Cisampih ; 20. Irigasi Cisilad ; 21. Irigasi Curug Ipuh ;	1. Irigasi Ciaris ; 2. Irigasi Cisilad ;
2	Bayah	22. Irigasi Ciburial ; 23. Irigasi Cidikit 2 ; 24. Irigasi Ciguha ; 25. Irigasi Cijengkol ; 26. Irigasi Cikadu ; 27. Irigasi Cikaret ; 28. Irigasi Cikiruh ; 29. Irigasi Cimapag ; 30. Irigasi Cimeundeut ; 31. Irigasi Cimiring ; 32. Irigasi Cirangga ; 33. Irigasi Cisentul ; 34. Irigasi Ciwangun ; 35. Irigasi Curug Ciawi ; 36. Irigasi Gombong ; 37. Irigasi Lebak Tipar ; 38. Irigasi Lebakpicung ; 39. Irigasi Legon ; 40. Irigasi Sawarna Bawah .	3. Irigasi Cirangga ; 4. Irigasi Ciwangun ;
3	Bojongmanik	41. Irigasi Batok ; 42. Irigasi Batu ; 43. Irigasi Cibatu ; 44. Irigasi Cibengkung ; 45. Irigasi Cibeunyeur ; 46. Irigasi Cibiuk ; 47. Irigasi Cicala ; 48. Irigasi Cikeuyeup (Bojongmanik) ; 49. Irigasi Cimayang Girang ; 50. Irigasi Cimayang Hilir 1 ; 51. Irigasi Cimayang Hilir 2 ; 52. Irigasi Cimayang Hilir 3 ; 53. Irigasi Cimindang ; 54. Irigasi Cimuli ; 55. Irigasi Citamiang (Bojongmanik) ; 56. Irigasi Ciujung Hilir ;	-

NO.	Kecamatan	Jaringan Irigasi	
		Primer	**Sekunder**
		57. Irigasi Parakan Kananga ;	
4	Cibadak	58. Irigasi Catang Limus ; 59. Irigasi Cikondang ; 60. Irigasi Cimajan ; 61. Irigasi Ciselaraja ; 62. Irigasi Rajut ;	5. Irigasi Cikondang ; 6. Irigasi Ciselaraja ;
5	Cibeber	63. Irigasi Batu Belang ; 64. Irigasi Cadas Mahpar ; 65. Irigasi Ciakar ; 66. Irigasi Ciater ; 67. Irigasi Ciayunan ; 68. Irigasi Cibanteng ; 69. Irigasi Cibanteng 1 ; 70. Irigasi Cibanteng 2 ; 71. Irigasi Cibatu Hideung ; 72. Irigasi Cibeber ; 73. Irigasi Cibeber 2 ; 74. Irigasi Cibece ; 75. Irigasi Cibengkung ; 76. Irigasi Ciburial ; 77. Irigasi Cicandra ; 78. Irigasi Cidadap ; 79. Irigasi Cigambreng ; 80. Irigasi Cihambali ; 81. Irigasi Cihaneut ; 82. Irigasi Cihanjawar 2 ; 83. Irigasi Ciherang 1 ; 84. Irigasi Ciherang 3 ; 85. Irigasi Ciherang Warung Banten ; 86. Irigasi Cijangkar ; 87. Irigasi Cijarab ; 88. Irigasi Cikabuyutan ; 89. Irigasi Cikahuripan ; 90. Irigasi Cikarang 2 ; 91. Irigasi Cikasintu ; 92. Irigasi Cikatomas 2 ; 93. Irigasi Cikeuyeup ; 94. Irigasi Cikidang ; 95. Irigasi Cikiruh ; 96. Irigasi Cilayi ; 97. Irigasi Cilubang ; 98. Irigasi Cingagoler ; 99. Irigasi Ciomas 1 ; 100. Irigasi Ciomas 2 ; 101. Irigasi Ciparangrang ; 102. Irigasi Ciparay ; 103. Irigasi Ciparay Cibitung ; 104. Irigasi Cipulus ; 105. Irigasi Cirangkong ; 106. Irigasi Cisalimar ; 107. Irigasi Ciseureuh ; 108. Irigasi Cisono ; 109. Irigasi Citorek 2 ; 110. Irigasi Citorek 2 Girang ; 111. Irigasi Citorek Wangun ; 112. Irigasi Ciungwanara 1 ; 113. Irigasi Ciungwanara 2 ; 114. Irigasi Ciungwanara 3 ; 115. Irigasi Ciusul 1 ; 116. Irigasi Ciusul 2 ; 117. Irigasi Curug Buluh ; 118. Irigasi Curug Dendeng ;	7. Irigasi Ciherang 1 ; 8. Irigasi Cijarab ; 9. Irigasi Cikeuyeup ; 10. Irigasi Cikidang ; 11. Irigasi Curug Dendeng ;

NO.	Kecamatan	Jaringan Irigasi	
		Primer	Sekunder
		119. Irigasi Curug Walet ; 120. Irigasi Gunung Botol ; 121. Irigasi Lebak Picung ; 122. Irigasi Leuwi Anjing ; 123. Irigasi Parakanpanjang ; 124. Irigasi Pasir Peuteuy ;	
6	Cigemblong	125. Irigasi Cigemblong ; 126. Irigasi Cikate ; 127. Irigasi Cikunting ; 128. Irigasi Citomo 1 ; 129. Irigasi Citomo 2 ; 130. Irigasi Jamrut ;	-
7	Cihara	131. Irigasi Cibarengkok (Cihara) ; 132. Irigasi Cijengkol ; 133. Irigasi Cijoho ; 134. Irigasi Cikareuteug ; 135. Irigasi Cimandiri ; 136. Irigasi Ciparahu ; 137. Irigasi Cipeucangpare ; 138. Irigasi Cipeusing ; 139. Irigasi Cipondok Panjang ; 140. Irigasi Citeupuseun ; 141. Irigasi Curugkebo ; 142. Irigasi Leuwi Nila ; 143. Irigasi Panyandungan ; 144. Irigasi Panyaungan ;	12. Irigasi Cimandiri ; 13. Irigasi Cipeucangpare ;
8	Cijaku	145. Irigasi Cadas Gantung ; 146. Irigasi Cijeuray ; 147. Irigasi Cimenga ; 148. Irigasi Cipalabuh ; 149. Irigasi Cipeundeuy ; 150. Irigasi Cisigung ; 151. Irigasi Citomo 1 ; 152. Irigasi Curug Tilu 2 ; 153. Irigasi Leuwi Bentang ; 154. Irigasi Rahong Belang ;	-
9	Cikulur	155. Irigasi Curug Goong ; 156. Irigasi Batu ; 157. Irigasi Bunut ; 158. Irigasi Cibogo ; 159. Irigasi Cihideung ; 160. Irigasi Cikalung ; 161. Irigasi Cikarang Hilir ; 162. Irigasi Cikoncer ; 163. Irigasi Cikondang ; 164. Irigasi Cikupa ; 165. Irigasi Cililitan ; 166. Irigasi Cimariku ; 167. Irigasi Cipicung ; 168. Irigasi Cirape ; 169. Irigasi Cireret ; 170. Irigasi Cisalam ; 171. Irigasi Cituak ; 172. Irigasi Leuwi Banen ; 173. Irigasi Leuwibedul ; 174. Irigasi Taman Jaya ;	14. Irigasi Batu ; 15. Irigasi Bunut ; 16. Irigasi Cikondang ;
10	Cileles	175. Irigasi Banjar ; 176. Irigasi Ciambel ; 177. Irigasi Cicanggong 2 ; 178. Irigasi Cicariwuheun ; 179. Irigasi Cicikral ;	17. Irigasi Cisilad ;

NO.	Kecamatan	Jaringan Irigasi	
		Primer	Sekunder
		180. Irigasi Cigeong ; 181. Irigasi Cikatulampa ; 182. Irigasi Cikeongmas ; 183. Irigasi Cimonggor ; 184. Irigasi Cinanahu ; 185. Irigasi Cingarawong ; 186. Irigasi Cipeuteuy ; 187. Irigasi Cirenggel ; 188. Irigasi Ciroge ; 189. Irigasi Cisero ; 190. Irigasi Cisilad ; 191. Irigasi Nagerang ; 192. Irigasi Talaga .	
11	Cilograng	193. Irigasi Bantar Kalapa ; 194. Irigasi Ciawi Hilir ; 195. Irigasi Cibeber ; 196. Irigasi Cikahuripan ; 197. Irigasi Cikatomas 1 ; 198. Irigasi Cinangka ; 199. Irigasi Cireundeu ; 200. Irigasi Cirumah Landak ; 201. Irigasi Citarate ; 202. Irigasi Curug Buluh ; 203. Irigasi Curug Kopo ; 204. Irigasi Curugdengdong ; 205. Irigasi Curugpurut ; 206. Irigasi Lebak Peundeuy ; 207. Irigasi Lebak Tipar ; 208. Irigasi Leuwi Karang ; 209. Irigasi Panaruan ; 210. Irigasi Pasir Peuteuy ; 211. Irigasi Sawarna Bawah ;	18. Irigasi Bantar Kalapa ; 19. Irigasi Ciawi Hilir ; 20. Irigasi Cibeber ; 21. Irigasi Cikatomas 1 ; 22. Irigasi Curug Kopo ; 23. Irigasi Curugdengdong ; 24. Irigasi Lebak Tipar ;
12	Cimarga	212. Irigasi Cicanggirahong ; 213. Irigasi Cigembor ; 214. Irigasi Cilahun (Cilamun) ; 215. Irigasi Cimarga ; 216. Irigasi Ciondok ; 217. Irigasi Ciranca ; 218. Irigasi Cirocek ; 219. Irigasi Ciruyung ; 220. Irigasi Margaluyu ; 221. Irigasi Munjul ;	25. Irigasi Cimarga ;
13	Cipanas	222. Irigasi Bungbas ; 223. Irigasi Cibaliung ; 224. Irigasi Cibeunyeuh ; 225. Irigasi Cibunut ; 226. Irigasi Cigembong ; 227. Irigasi Ciharamay ; 228. Irigasi Cijambu ; 229. Irigasi Cikaak ; 230. Irigasi Cikaduheulang ; 231. Irigasi Cikaracak ; 232. Irigasi Cilejet ; 233. Irigasi Cimangeunteung ; 234. Irigasi Cimaung ; 235. Irigasi Cimodar ; 236. Irigasi Cipanas ; 237. Irigasi Cipancar ; 238. Irigasi Cipicungbera ; 239. Irigasi Cisela ; 240. Irigasi Curugsumel ; 241. Irigasi Gandung ;	26. Irigasi Bungbas ; 27. Irigasi Cibunut ; 28. Irigasi Cilejet ; 29. Irigasi Cimangeunteung ; 30. Irigasi Cipanas ; 31. Irigasi Kimajan ;

NO.	Kecamatan	Jaringan Irigasi	
		Primer	Sekunder
		242. Irigasi Gunung Haur ; 243. Irigasi Kadu Guling ; 244. Irigasi Kimajan ; 245. Irigasi Kisamaun ; 246. Irigasi Leuwiheureung ; 247. Irigasi Sanghiang Taleus ; 248. Irigasi Sikleuk ;	
14	Cirinten	249. Irigasi Cibinglu ; 250. Irigasi Cilimus ; 251. Irigasi Cimanyangray ; 252. Irigasi Cinangkaruka (Cirinten) ; 253. Irigasi Cipalabuh ; 254. Irigasi Ciputan ; 255. Irigasi Cirangkas ; 256. Irigasi Cirinten ; 257. Irigasi Cisaat ; 258. Irigasi Citamiang ; 259. Irigasi Citamiang 2 ; 260. Irigasi Citiis ; 261. Irigasi Pagerbitung ; 262. Irigasi Pangelangan ;	32. Irigasi Citamiang ;
15	Curugbitung	263. Irigasi Cidadap ; 264. Irigasi Cisarua ;	-
16	Gunungkencana	265. Irigasi Cibeusi ; 266. Irigasi Ciburahung ; 267. Irigasi Cihajere ; 268. Irigasi Cikeusik ; 269. Irigasi Cilimus (Cibulakan) ; 270. Irigasi Cimanyangray ; 271. Irigasi Cirangkas ; 272. Irigasi Cisanghiang ; 273. Irigasi Cisuren ; 274. Irigasi Citeureup ; 275. Irigasi Curug Ipuh ; 276. Irigasi Curug Sewu ; 277. Irigasi Gunung Kendeng ; 278. Irigasi Leuwibolerang ; 279. Irigasi Leuwibuleud 1 ; 280. Irigasi Leuwibuleud 2 ; 281. Irigasi Nangela ; 282. Irigasi Situ Kompeni .	33. Irigasi Curug Sewu ;
17	Kalanganyar	283. Irigasi Cimarga ; 284. Irigasi Leuwipanjang ;	34. Irigasi Cimarga ;
18	Lebakgedong	285. Irigasi Cibajra ; 286. Irigasi Cibengbeng ; 287. Irigasi Ciladaeun ; 288. Irigasi Cilangke ; 289. Irigasi Cinangka ; 290. Irigasi Cinasa ; 291. Irigasi Cinyiru ; 292. Irigasi Cipanas ; 293. Irigasi Cirahong Ciguha ; 294. Irigasi Cisoka ; 295. Irigasi Ciupih ; 296. Irigasi Gempoy ; 297. Irigasi Gunung Gebas ; 298. Irigasi Karangbolong ;	35. Irigasi Cipanas ;
19	Leuwidamar	299. Irigasi Cadas Gantung ; 300. Irigasi Ciangsana ; 301. Irigasi Cibarengkok ; 302. Irigasi Cibeas ;	-

NO.	Kecamatan	Jaringan Irigasi	
		Primer	Sekunder
		303. Irigasi Cibogel ; 304. Irigasi Ciboleger ; 305. Irigasi Cicadek ; 306. Irigasi Cicanggo ; 307. Irigasi Ciherang ; 308. Irigasi Cikadongdong 1 ; 309. Irigasi Cikadongdong 2 ; 310. Irigasi Cikekel ; 311. Irigasi Cilengsor ; 312. Irigasi Cipeuyah ; 313. Irigasi Cirangkas Hilir ; 314. Irigasi Cisangiang ; 315. Irigasi Cisimeut ; 316. Irigasi Ciujung Hilir ; 317. Irigasi Cupalandak ; 318. Irigasi Leuwi Huut ; 319. Irigasi Parakan Beusi ; 320. Irigasi Pasir Eurih ;	
20	Maja	321. Irigasi Bantar Jaya ; 322. Irigasi Cibondol ; 323. Irigasi Cilaja ; 324. Irigasi Cimalang ; 325. Irigasi Cimalaung ;	-
21	Malingping	326. Irigasi Cadas Gantung ; 327. Irigasi Cicangkeuteuk ; 328. Irigasi Cigarukgak ; 329. Irigasi Cihanjaeun ; 330. Irigasi Cilangkahan 2 ; 331. Irigasi Cipeucangpare ; 332. Irigasi Cipeundeuy ; 333. Irigasi Citalang ; 334. Irigasi Citatarpahang ; 335. Irigasi Mumunggang ;	36. Irigasi Cilangkahan 2 ; 37. Irigasi Cipeucangpare ;
22	Muncang	336. Irigasi Cadas Gantung ; 337. Irigasi Cibiksir ; 338. Irigasi Cicariweuheun ; 339. Irigasi Cico'o Timur ; 340. Irigasi Cieksel ; 341. Irigasi Cigarungcilaki ; 342. Irigasi Cikarag ; 343. Irigasi Cikawah ; 344. Irigasi Cikeong ; 345. Irigasi Cikere ; 346. Irigasi Cikeuyeup (Muncang) ; 347. Irigasi Cikokompol ; 348. Irigasi Cikujang ; 349. Irigasi Cilaki ; 350. Irigasi Cilunglum ; 351. Irigasi Ciminyak ; 352. Irigasi Cirangpang ; 353. Irigasi Cireungis ; 354. Irigasi Cisela Gunung ; 355. Irigasi Eunyay ; 356. Irigasi Leuwi Huut ; 357. Irigasi Leuwi Urug .	38. Irigasi Cilaki ;
23	Panggarangan	358. Irigasi Cadas Koneng ; 359. Irigasi Ciaglugur ; 360. Irigasi Ciapus ; 361. Irigasi Cibelengbeng ; 362. Irigasi Cijengkol (Gunung Gede) ; 363. Irigasi Cijoho ;	39. Irigasi Ciaglugur ;

NO.	Kecamatan	Jaringan Irigasi	
		Primer	Sekunder
		364. Irigasi Cikoleang ; 365. Irigasi Cimancak ; 366. Irigasi Cimandiri ; 367. Irigasi Cimandiri (Girang) ; 368. Irigasi Cimapag ; 369. Irigasi Cimuncang ; 370. Irigasi Cimungkal ; 371. Irigasi Cipakus ; 372. Irigasi Cisiih Girang ; 373. Irigasi Cisorong ; 374. Irigasi Curug Ciung ; 375. Irigasi Curug Tilu ; 376. Irigasi Gunung Gede ; 377. Irigasi Hawalad ; 378. Irigasi Menced ; 379. Irigasi Naringgul ; 380. Irigasi Parakan Kadu .	
24	Rangkasbitung	381. Irigasi Cibondol ; 382. Irigasi Cijoro ;	40. Irigasi Cijoro ; 41. Irigasi Cikambuy ; 42. Irigasi Cikuda ; 43. Irigasi Cipancur ; 44. Irigasi Curug ; 45. Irigasi Kadubale ; 46. Irigasi Leuwipanjang ;
25	Sajira	383. Irigasi Cibojan ; 384. Irigasi Cicukang ; 385. Irigasi Cidengdong ; 386. Irigasi Cigarungcilaki ; 387. Irigasi Cihonje ; 388. Irigasi Cikoneng ; 389. Irigasi Cikumpay ; 390. Irigasi Cilaja ; 391. Irigasi Cilantuk ; 392. Irigasi Cipunglu ; 393. Irigasi Ciputih ; 394. Irigasi Citeupuseun ; 395. Irigasi Citinggar ; 396. Irigasi Ciwaru 1 ; 397. Irigasi Ciwaru 2 ; 398. Irigasi Leuwi Gentong ; 399. Irigasi Ungkal Munding .	47. Irigasi Leuwi Gentong ;
26	Sobang	400. Irigasi Ciastim ; 401. Irigasi Cibalerangan ; 402. Irigasi Cibengkok ; 403. Irigasi Ciciung ; 404. Irigasi Cijanotreng ; 405. Irigasi Cijengkol ; 406. Irigasi Cikabayan ; 407. Irigasi Cikaterkes ; 408. Irigasi Cikawah ; 409. Irigasi Cikeuyeup (Sobang) ; 410. Irigasi Cilesang ; 411. Irigasi Cimanual ; 412. Irigasi Cimondene ; 413. Irigasi Cinangkaruka (Sobang) ; 414. Irigasi Cipadang ; 415. Irigasi Ciparabakti ; 416. Irigasi Cipeuteuy ; 417. Irigasi Cipicung ; 418. Irigasi Cipicung 2 ;	48. Irigasi Cipicung ;

NO.	Kecamatan	Jaringan Irigasi	
		Primer	Sekunder
		419. Irigasi Cirompang ; 420. Irigasi Cisanding Catang ; 421. Irigasi Citalahab ; 422. Irigasi Citujah ; 423. Irigasi Ciwalang ; 424. Irigasi Karangbuay ; 425. Irigasi Leuwimakam ; 426. Irigasi Pasir Sereh ; 427. Irigasi Ranca Kalo ; 428. Irigasi Serdang Agung ; 429. Irigasi Sindang Agung ;	
27	Wanasalam	430. Irigasi Cikarang ; 431. Irigasi Cipeucang ; 432. Irigasi Malang Nengah .	-
28	Warunggunung	433. Irigasi Ajid ; 434. Irigasi Bengkok ; 435. Irigasi Bunut Oteng ; 436. Irigasi Cieundik ; 437. Irigasi Cikoncer ; 438. Irigasi Cilembun ; 439. Irigasi Cilewong ; 440. Irigasi Cipangasih ; 441. Irigasi Ciselaraja ; 442. Irigasi Cisitu ; 443. Irigasi Ciwaru ; 444. Irigasi Heas ; 445. Irigasi Leuwi Hoya ; 446. Irigasi Pasirbedil ; 447. Irigasi Rajut ; 448. Irigasi Rancadundu ; dan 449. Irigasi Suprit .	49. Irigasi Ajid ; 50. Irigasi Ciruyung ; 51. Irigasi Ciselaraja ; 52. Irigasi Heas ; 53. Irigasi Pasirbedil ; dan 54. Irigasi Rancadundu .

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Lebak, 2021

,

BUPATI LEBAK

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Lampiran X

Bangunan Pengendali Banjir dan Bangunan Sumber Daya Air

NO	KECAMATAN	NAMA BANGUNAN/SDEW	BANGUNAN PENGENDALIAN BANJIR	BANGUNAN SUMBER DAYA AIR
1	Banjarsari	Bang. Bagi Cisilad		v
		Bang. Oncoran Cibodas 1		v
		Bang. Oncoran Cingunun		v
		Bang. Oncoran Ciranggong		v
		Bang. Oncoran Ciruji		v
		Bang. Oncoran Cisilad		v
		Bang. Pelimpah Cikatulampa		v
		Bang. Pelimpah Cimadang		v
		Bang. Pelimpah Ciranggong		v
		Bang. Suplesi Cikatulampa		v
		Bang. Ukur Cimadang		v
		Bendung Ciaris		v
		Bendung Ciaseum		v
		Bendung Ciateul 1		v
		Bendung Ciateul 2		v
		Bendung Cibarahung		v
		Bendung Cibeureum		v
		Bendung Cibodas 1		v
		Bendung Cibodas 2		v
		Bendung Cigendong		v
		Bendung Cikapas		v
		Bendung Ciliman		v
		Bendung Cimadang		v
		Bendung Cingunun		v
		Bendung Ciomas		v
		Bendung Ciranggong		v
		Bendung Ciruji		v
		Bendung Cisampih		v
		Bendung Curug Ipuh		v
		Embung Citulang		v
		Sadap Ciaris		v
		Sadap Cingunun		v
		Sadap Ciruji		v
		Sadap Cisilad		v
		Sadap Curug Ipuh		v
		Situ Cimadang	v	v
		Situ Gede Citeupuseun	v	v
		Waduk Ciceureum	v	
		Waduk Cilemer	v	v
		Waduk Ciliman	v	v
		Waduk Cimalur	v	
2	Bayah	Bang. Oncoran Cirangga		v
		Bang. Oncoran Ciwangun		v
		Bang. Pelimpah Samping Cirangga		v
		Bendung Ciburial		v
		Bendung Cidikit 2		v
		Bendung Cigombong		v
		Bendung Ciguha		v
		Bendung Cimapag		v
		Bendung Cimeundeut		v
		Bendung Cimiring		v
		Bendung Cirangga		v
		Bendung Cisentul		v

NO	KECAMATAN	NAMA BANGUNAN/SDEW	BANGUNAN PENGENDALIAN BANJIR	BANGUNAN SUMBER DAYA AIR
		Bendung Ciwangun		v
		Bendung Curug Ciawi		v
		Bendung Lebak Tipar		v
		Bendung Lebakpicung		v
		Bendung Legon		v
		Bendung Sawarna Bawah		v
		Sadap Cikaret		v
		Sadap Cirangga		v
		Sadap Ciwangun		v
		Sadap Lebakpicung		v
3	Bojongmanik	Bang. Oncoran Cimayang Hilir 1		v
		Bang. Oncoran Cimindang		v
		Bang. Pelimpah Cimayang Girang		v
		Bang. Suplesi Ciujung Hilir		v
		Bendung Batok		v
		Bendung Batu		v
		Bendung Cibatu		v
		Bendung Cibengkung		v
		Bendung Cibeunyeur		v
		Bendung Cibiuk		v
		Bendung Cicala		v
		Bendung Cikeuyeup (Bojongmanik)		v
		Bendung Cimayang Girang		v
		Bendung Cimayang Hilir 1		v
		Bendung Cimayang Hilir 2		v
		Bendung Cimayang Hilir 3		v
		Bendung Cimindang		v
		Bendung Cimuli		v
		Bendung Citamiang (Bojongmanik)		v
		Bendung Ciujung Hilir		v
		Bendung Parakan Kenanga		v
		Sadap Batok		v
		Sadap Cibiuk		v
		Sadap Cimayang Girang		v
		Sadap Cimayang Hilir 1		v
		Sadap Cimayang Hilir 3		v
		Sadap Cimindang		v
		Sadap Parakan Kenanga		v
4	Cibadak	Bang. Oncoran Catang Limus		v
		Bang. Oncoran Cikondang		v
		Bendung Catang Limus		v
		Bendung Cimajan		v
		Sadap Cikondang		v
		Sadap Cimajan		v
		Sadap Ciselaraja		v
		Sadap Rajut		v
5	Cibeber	Bang. Oncoran Ciseureuh		v
		Bang. Pelimpah Ciaksintu		v
		Bang. Pelimpah Ciater		v
		Bang. Pelimpah Cibatu Hideung		v
		Bang. Pelimpah Ciherang 1		v
		Bang. Pelimpah Ciherang Warung Banten		v
		Bang. Pelimpah Cijarab		v
		Bang. Pelimpah Cikahuripan		v
		Bang. Pelimpah Cilubang		v
		Bang. Pelimpah Ciomas 1		v

NO	KECAMATAN	NAMA BANGUNAN/SDEW	BANGUNAN PENGENDALIAN BANJIR	BANGUNAN SUMBER DAYA AIR
		Bang. Pelimpah Cisalimar		v
		Bang. Pelimpah Curug Walet		v
		Bang. Pelimpah Leuwi Anjing		v
		Bang. Pelimpah Samping Cijangkar		v
		Bang. Pelimpah Samping Cikidang		v
		Bang. Pelimpah Samping Cisono		v
		Bang. Pelimpah Samping Ciunwanara 1		v
		Bang. Suplesi Cibeber 2		v
		Bang. Suplesi Cijarab		v
		Bang. Suplesi Cikasintu		v
		Bang. Suplesi Cikeuyeup		v
		Bang. Suplesi Ciomas 1		v
		Bang. Suplesi Ciparangrang		v
		Bang. Suplesi Ciseureuh		v
		Bang. Suplesi Cisono		v
		Bang. Ukur Cikidang		v
		Bendung Batu Belang		v
		Bendung Cadas Mahpar		v
		Bendung Ciakar		v
		Bendung Ciater		v
		Bendung Ciawi Hilir		v
		Bendung Ciayunan		v
		Bendung Cibanteng		v
		Bendung Cibanteng 1		v
		Bendung Cibanteng 2		v
		Bendung Cibatu Hideung		v
		Bendung Cibeber 2		v
		Bendung Cibece		v
		Bendung Cicandra		v
		Bendung Cidadap		v
		Bendung Cigambreng		v
		Bendung Cihaneut		v
		Bendung CIhanjawar 2		v
		Bendung Ciherang 1		v
		Bendung Ciherang 3		v
		Bendung Ciherang Warung Banten		v
		Bendung Cijangkar		v
		Bendung Cijarab		v
		Bendung Cikabuyutan		v
		Bendung Cikahuripan		v
		Bendung Cikarang 2		v
		Bendung Cikaret		v
		Bendung Cikasintu		v
		Bendung Cikatomas 2		v
		Bendung Cikeuyeup		v
		Bendung Cikidang		v
		Bendung Cikiruh		v
		Bendung Cilayi		v
		Bendung Cilubang		v
		Bendung Cingagoler		v
		Bendung Ciomas 1		v
		Bendung Ciomas 2		v
		Bendung Ciparangrang		v
		Bendung Ciparay		v
		Bendung Ciparay Cibitung		v
		Bendung Cipulus		v

NO	KECAMATAN	NAMA BANGUNAN/SDEW	BANGUNAN PENGENDALIAN BANJIR	BANGUNAN SUMBER DAYA AIR
		Bendung Cirangkong		v
		Bendung Cisalimar		v
		Bendung Ciseureuh		v
		Bendung Cisono		v
		Bendung Citorek 2		v
		Bendung Citorek 2 Girang		v
		Bendung Citorek Wangun		v
		Bendung Ciungwanara 1		v
		Bendung Ciungwanara 2		v
		Bendung Ciungwanara 3		v
		Bendung Ciusul 1		v
		Bendung Ciusul 2		v
		Bendung Curug Buluh		v
		Bendung Curug Dendeng		v
		Bendung Curug Walet		v
		Bendung Gunung Botol		v
		Bendung Lebak Picung		v
		Bendung Leuwi Anjing		v
		Bendung Parakanpanjang		v
		Bendung Pasir Peuteuy		v
		Pelimpah Cingagoler		v
		Sadap Ciakar		v
		Sadap Cibanteng 1		v
		Sadap Cibatu Hideung		v
		Sadap Cibece		v
		Sadap Cicandra		v
		Sadap Ciherang 1		v
		Sadap Ciherang 3		v
		Sadap Ciherang Warung Banten		v
		Sadap Cijangkar		v
		Sadap Cijarab		v
		Sadap Cikahuripan		v
		Sadap Cikasintu		v
		Sadap Cikidang		v
		Sadap Cilayi		v
		Sadap Cilubang		v
		Sadap Ciparay		v
		Sadap Cipulus		v
		Sadap Cisalimar		v
		Sadap Cisono		v
		Sadap Citorek 2 Girang		v
		Sadap Ciungwanara 2		v
		Sadap Ciungwanara 3		v
		Sadap Ciusul 1		v
		Sadap Ciusul 2		v
		Sadap Curug Dendeng		v
		Sadap Leuwi Anjing		v
		Sadap Paraknpanjang		v
		Situ Ciburial	v	v
		Situ Cikamunding / Hiang	v	
		Situ Lebak Larang	v	
		Situ Sinar Galih	v	v
6	Cigemblong	Bang. Oncoran Citomo 1		v
		Bang. Pelimpah Cigemblong		v
		Bang. Pelimpah Jamrut		v
		Bendung Cigemblong		v
		Bendung Cikate		v

NO	KECAMATAN	NAMA BANGUNAN/SDEW	BANGUNAN PENGENDALIAN BANJIR	BANGUNAN SUMBER DAYA AIR
		Bendung Citomo 2		v
		Bendung Jamrut		v
		Sadap Cigemblong		v
		Sadap Citomo 2		v
7	Cihara	Bang. Bagi Cimandiri		v
		Bang. Oncoran Cimandiri		v
		Bang. Pelimpah Samping Cimandiri		v
		Bang. Pelimpah Samping Cipeucangpare		v
		Bang. Ukur Cimandiri		v
		Bendung Cibarengkok (Cihara)		v
		Bendung Cibelengbeng		v
		Bendung Cijengkol		v
		Bendung Cijoho		v
		Bendung Cikareuteug		v
		Bendung Ciparahu		v
		Bendung Cipeusing		v
		Bendung Cipondok Panjang		v
		Bendung Citeupuseun		v
		Bendung Curugkebo		v
		Bendung Leuwi Nila		v
		Bendung Panyandungan		v
		Bendung Panyaungan		v
		Embung Citeureup		v
		Sadap Cimandiri		v
		Sadap Cipeucangpare		v
		Sadap Leuwi Nila		v
8	Cijaku	Bang. Pelimpah Cijeurai		v
		Bang. Pelimpah Cipeundeuy		v
		Bang. Pelimpah Curug Tilu 2		v
		Bendung Cadas Gantung		v
		Bendung Cijeurai		v
		Bendung Cimenga		v
		Bendung Cipeundeuy		v
		Bendung Citomo 1		v
		Bendung Curug Tilu 2		v
		Bendung Leuwi Bentang		v
		Bendung Rahong Belang		v
		Sadap Cadas Gantung		v
		Sadap Cijeurai		v
		Waduk Cilangkahan	v	
9	Cikulur	Bang. Oncoran Cikalung		v
		Bang. Oncoran Cikupa		v
		Bang. Oncoran Cimariku		v
		Bang. Oncoran Cisalam		v
		Bang. Oncoran Leuwibedul		v
		Bang. Pelimpah Cikupa		v
		Bang. Pelimpah Cirape		v
		Bang. Pelimpah Samping Cikondang		v
		Bang. Sadap Cituak		v
		Bang. Suplesi Cihideung		v
		Bang. Suplesi Cikarang Hilir		v
		Bang. Suplesi Leuwi Banen		v
		Bang. Suplesi Taman Jaya		v
		Bang. Ukur Bunut		v
		Bang. Ukur Cikondang		v
		Bendung Bunut		v

NO	KECAMATAN	NAMA BANGUNAN/SDEW	BANGUNAN PENGENDALIAN BANJIR	BANGUNAN SUMBER DAYA AIR
		Bendung Cibogo		v
		Bendung Cihideung		v
		Bendung Cikalung		v
		Bendung Cikarang HIlir		v
		Bendung Cikondang		v
		Bendung Cikupa		v
		Bendung Cililitan		v
		Bendung Cimariku		v
		Bendung Cipicung		v
		Bendung Cirape		v
		Bendung Cireret		v
		Bendung Cisalam		v
		Bendung Cituak		v
		Bendung Curug Goong		v
		Bendung Leuwi Banen		v
		Bendung Leuwibedul		v
		Bendung Taman Jaya		v
		Embung Julad		v
		Embung Taman Jaya		v
		Sadap Bunut		v
		Sadap Cihideung		v
		Sadap Cikalung		v
		Sadap Cikarang Hilir		v
		Sadap Cikondang		v
		Sadap Cikupa		v
		Sadap Cimariku		v
		Sadap Cirape		v
		Sadap Cisalam		v
		Sadap Curug Goong		v
		Sadap Leuwi Banen		v
		Situ Cibangreng	v	v
10	Cileles	Bang. Oncoran Cicanggong 2		v
		Bang. Oncoran Cisilad		v
		Bang. Pelimpah Cicanggong 2		v
		Bang. Pelimpah Cicariwuheun		v
		Bang. Pelimpah Cikatulampa		v
		Bang. Pelimpah Cimonggor		v
		Bang. Pelimpah Cingarawong		v
		Bang. Pelimpah Ciroge		v
		Bang. Pelimpah Nangerang		v
		Bang. Pelimpah Samping Cisilad		v
		Bang. Pelimpah Talaga		v
		Bang. Suplesi Cigoeng		v
		Bang. Suplesi Cikeong		v
		Bendung Banjar		v
		Bendung Ciambel		v
		Bendung Cicanggong 2		v
		Bendung Cicariwuheun		v
		Bendung Cicikral		v
		Bendung Cigoeng		v
		Bendung Cikatulampa		v
		Bendung Cikeong		v
		Bendung Cimonggor		v
		Bendung Cinanahu		v
		Bendung Cingarawong		v
		Bendung Cipeuteuy		v
		Bendung Cirenggel		v

NO	KECAMATAN	NAMA BANGUNAN/SDEW	BANGUNAN PENGENDALIAN BANJIR	BANGUNAN SUMBER DAYA AIR
		Bendung Ciroge		v
		Bendung Cisero		v
		Bendung Cisilad		v
		Bendung Nangerang		v
		Bendung Talaga		v
		Embung Cicaper		v
		Embung Cihurang		v
		Embung Cisadang		v
		Embung Parungkujang		v
		Embung Telaga		v
		Sadap Cigoeng		v
		Sadap Cingarawong		v
		Sadap Ciroge		v
		Sadap Cisilad		v
11	Cilograng	Bang. Bagi Bantar Kalapa		v
		Bang. Oncoran Cibeber		v
		Bang. Oncoran Cikatomas 1		v
		Bang. Oncoran Cireundeu		v
		Bang. Oncoran Cirumah Landak		v
		Bang. Pelimpah Bantar Kalapa		v
		Bang. Pelimpah Citarate		v
		Bang. Pelimpah Leuwi Karang		v
		Bang. Pelimpah Samping Ciaktomas 1		v
		Bang. Pelimpah Samping Ciawi Hilir		v
		Bang. Pelimpah Samping Curugdengdong		v
		Bang. Suplesi Cireundeu		v
		Bang. Suplesi Cirumah Landak		v
		Bang. Suplesi Curug Kopo		v
		Bendung Bantar Kalapa		v
		Bendung Ciawi Hilir		v
		Bendung Cikatomas 1		v
		Bendung Cinangka		v
		Bendung Cireundeu		v
		Bendung Cirumah Landak		v
		Bendung Citarate		v
		Bendung Curug Kopo		v
		Bendung Curugdengdong		v
		Bendung Curugpurut		v
		Bendung Leuwi Karang		v
		Sadap Ciawi Hilir		v
		Sadap Cikahuripan		v
		Sadap Cikatomas 1		v
		Sadap Cireundeu		v
		Sadap Cirumah Landak		v
		Sadap Citarate		v
		Sadap Curug Buluh		v
		Sadap Curug Kopo		v
		Sadap Curugdengdong		v
		Sadap Lebak Tipar		v
		Sadap Leuwi Karang		v
		Sadap Pasir Peuteuy		v
		Situ Cikamunding	v	v
		Situ Cikamunding / Hiang	v	v
		Situ Cimaesta	v	v
12	Cimarga	Bang. Pelimpah Cigembor		v

NO	KECAMATAN	NAMA BANGUNAN/SDEW	BANGUNAN PENGENDALIAN BANJIR	BANGUNAN SUMBER DAYA AIR
		Bang. Pelimpah Ciondok		v
		Bang. Pelimpah Samping Cimarga		v
		Bang. Pertemuan Cimarga		v
		Bang. Suplesi Cicanggirahong		v
		Bang. Suplesi Cigembor		v
		Bang. Suplesi Cilahun (Cilamun)		v
		Bang. Suplesi Margaluyu		v
		Bang. Ukur Cimarga		v
		Bendung Cicanggirahong		v
		Bendung Cigembor		v
		Bendung Cilahun (Cilamun)		v
		Bendung Ciondok		v
		Bendung Ciranca		v
		Bendung Cirocek		v
		Bendung Ciruyung (Cimarga)		v
		Bendung Margaluyu		v
		Bendung Munjul		v
		Embung Cicae		v
		Embung Gunung Anten		v
		Sadap Cigembor		v
		Sadap Cimarga		v
		Sadap Ciondok		v
		Sadap Cirocek		v
		Situ Palayangan	v	v
		Waduk/pengairan (situ palayangan)	v	
13	Cipanas	Bang. Oncoran Bungbas		v
		Bang. Oncoran Cikaak		v
		Bang. Oncoran Cipanas		v
		Bang. Oncoran Cipancar		v
		Bang. Oncoran Curugsumel		v
		Bang. Oncoran Kadu Guling		v
		Bang. Oncoran Kimajan		v
		Bang. Oncoran Leuwiheureung		v
		Bang. Pelimpah Cigembong		v
		Bang. Pelimpah Ciharamay		v
		Bang. Pelimpah Cimaung		v
		Bang. Pelimpah Cipanas		v
		Bang. Pelimpah Kadu Guling		v
		Bang. Pelimpah Leuwiheureung		v
		Bang. Pelimpah Samping Bungbas		v
		Bang. Pelimpah Samping Cibunut		v
		Bang. Pelimpah Samping Cieucit		v
		Bang. Pelimpah Samping Cimangeunteung		v
		Bang. Pelimpah Samping Cipanas		v
		Bang. Pelimpah Samping Kimajan		v
		Bang. Pelimpah Sanghiang Taleus		v
		Bang. Pelimpah Sikleuk		v
		Bang. Pembagi Cimaung		v
		Bang. Pembuang Cikaak		v
		Bang. Pembuang Cimaung		v
		Bang. Pertemuan Bungbas		v
		Bang. Pertemuan Cieucit		v
		Bang. Pertemuan Cimangeunteung		v
		Bang. Pertemuan Cipanas		v
		Bang. Pertemuan Kimajan		v
		Bang. Suplesi Ciharamay		v

NO	KECAMATAN	NAMA BANGUNAN/SDEW	BANGUNAN PENGENDALIAN BANJIR	BANGUNAN SUMBER DAYA AIR
		Bang. Suplesi Cijambu		v
		Bang. Suplesi Cikaracak		v
		Bang. Suplesi Cipancar		v
		Bang. Suplesi Cipicungbera		v
		Bang. Suplesi Cisela		v
		Bang. Suplesi Gandung		v
		Bang. Suplesi Gunung Haur		v
		Bang. Suplesi Kadu Guling		v
		Bang. Suplesi Kisamaun		v
		Bang. Suplesi Leuwiheureung		v
		Bang. Suplesi Sanghiang Taleus		v
		Bang. Suplesi Sikleuk		v
		Bang. Ukur Cibunut		v
		Bang. Ukur Cimangeunteung		v
		Bang. Ukur Cipanas		v
		Bendung Bungbas		v
		Bendung Cibaliung		v
		Bendung Cibeunyeuh		v
		Bendung Cibungbas		v
		Bendung Cieucit		v
		Bendung Cigembong		v
		Bendung Ciharamay		v
		Bendung Cijambu		v
		Bendung Cikaak		v
		Bendung Cikaduheulang		v
		Bendung Cikaracak		v
		Bendung Cilejet		v
		Bendung Cimangeunteung		v
		Bendung Cimaung		v
		Bendung Cimodar		v
		Bendung Cipancar		v
		Bendung Cipicungbera		v
		Bendung Cisela		v
		Bendung Curugsumel		v
		Bendung Gandung		v
		Bendung Gunung Haur		v
		Bendung Kadu Guling		v
		Bendung Kimajan		v
		Bendung Kisamaun		v
		Bendung Konso-lidasi Cimalur		v
		Bendung Konso-lidasi Cisela		v
		Bendung Leuwiheureung		v
		Bendung Sanghiang Taleus		v
		Bendung Sikleuk		v
		Embung Palwa		v
		Sadap Bungbas		v
		Sadap Cibunut		v
		Sadap Cieucit		v
		Sadap Ciharamay		v
		Sadap Cijambu		v
		Sadap Cikaracak		v
		Sadap Cilejet		v
		Sadap Cimangeunteung		v
		Sadap Cimaung		v
		Sadap Cimodar		v
		Sadap Cipanas		v
		Sadap Cipancar		v

NO	KECAMATAN	NAMA BANGUNAN/SDEW	BANGUNAN PENGENDALIAN BANJIR	BANGUNAN SUMBER DAYA AIR
		Sadap Cipicungbera		v
		Sadap Cisela		v
		Sadap Gandung		v
		Sadap Gunung Haur		v
		Sadap Kadu Guling		v
		Sadap Kimajan		v
		Sadap Kisamaun		v
		Sadap Leuwiheureung		v
		Sadap Sanghiang Taleus		v
		Sadap Sikleuk		v
14	Cirinten	Bang. Oncoran Cinangkaruka		v
		Bang. Oncoran Citiis		v
		Bang. Oncoran Pagerbitung		v
		Bang. Suplesi Citiis		v
		Bendung Cibinglu		v
		Bendung Cilimus		v
		Bendung Cimanyangray		v
		Bendung Cinangkaruka (Cirinten)		v
		Bendung Cipalabuh		v
		Bendung Ciputan		v
		Bendung Cirangkas		v
		Bendung Cirinten		v
		Bendung Cisaat		v
		Bendung Citamiang (Cirinten)		v
		Bendung Citamiang 2		v
		Bendung Citiis		v
		Bendung Pagerbitung		v
		Bendung Pangelangan		v
		Embung Cibeunteur		v
		Sadap Cibinglu		v
		Sadap Cilimus		v
		Sadap Cinangkaruka		v
		Sadap Ciputan		v
		Sadap Citamiang		v
		Sadap Pangelangan		v
15	Curugbitung	Bang. Pelimpah Cidadap		v
		Bendung Cidadap		v
		Bendung Cisarua		v
		Situ Ciguradog	v	
16	Gunungkencana	Bang. Pelimpah Ciburahung		v
		Bang. Suplesi Leuwibolerang		v
		Bendung Cibeusi		v
		Bendung Ciburahung		v
		Bendung Cihajere		v
		Bendung Cikeusik		v
		Bendung Cilimus (Cibulakan)		v
		Bendung Cisanghiang		v
		Bendung Cisuren		v
		Bendung Citeureup		v
		Bendung Curug Ipuh		v
		Bendung Curug Sewu		v
		Bendung Gunung Kendeng		v
		Bendung Leuwibuleud 1		v
		Bendung Leuwibuleud 2		v
		Bendung Nangela		v
		Bendungan Leuwibolerang		v
		Embung Cikeusik		v

NO	KECAMATAN	NAMA BANGUNAN/SDEW	BANGUNAN PENGENDALIAN BANJIR	BANGUNAN SUMBER DAYA AIR
		Embung Cirumah Hiang		v
		Sadap Cihajere		v
		Sadap Citeureup		v
		Sadap Curug Sewu		v
		Sadap Leuwibolerang		v
		Situ Kompeni	v	v
17	Kalanganyar	Bang. Oncoran Cimarga		v
		Bang. Pertemuan Cimarga		v
		Bendung Leuwipanjang		v
		Embung Alingan		v
		Embung Cilandak		v
		Embung Curug		v
		Sadap Cimarga		v
18	Lebakgedong	Bang. Bagi Cinyiru		v
		Bang. Oncoran Cibengbeng		v
		Bang. Oncoran Ciladaeun		v
		Bang. Oncoran Cilangke		v
		Bang. Oncoran Cipanas		v
		Bang. Oncoran Cisoka		v
		Bang. Pelimpah Cibajra		v
		Bang. Pelimpah Cibengbeng		v
		Bang. Pelimpah Ciladaeun		v
		Bang. Pelimpah Cinangka		v
		Bang. Pelimpah Cisoka		v
		Bang. Pelimpah Gunung Gebas		v
		Bang. Suplesi Cilangke		v
		Bang. Suplesi Cisoka		v
		Bang. Suplesi Gunung Gebas		v
		Bang. Ukur Cipanas		v
		Bendung Cibajra		v
		Bendung Cibengbeng		v
		Bendung Ciladaeun		v
		Bendung Cilangke		v
		Bendung Cinangka		v
		Bendung Cinyiru		v
		Bendung Cipanas		v
		Bendung Cirahong Ciguha		v
		Bendung Cisoka		v
		Bendung Ciupih		v
		Bendung Gunung Gebas		v
		Bendung Karangbolong		v
		Bendung Konso-lidasi Ciberang		v
		Pintu Pembuang Cipanas		v
		Sadap Cibengbeng		v
		Sadap Cinangka		v
		Sadap Cinyiru		v
		Sadap Cipanas		v
		Sadap Gempoy		v
		Sadap Gunung Gebas		v
19	Leuwidamar	Bang. Oncoran Ciangsana		v
		Bang. Oncoran Cirangkas Hilir		v
		Bang. Pelimpah Cipulandak		v
		Bang. Suplesi Cisimeut		v
		Bang. Ukur Cisimeut		v
		Bendung Ciangsana		v
		Bendung Cibarengkok		v
		Bendung Cibeas		v

NO	KECAMATAN	NAMA BANGUNAN/SDEW	BANGUNAN PENGENDALIAN BANJIR	BANGUNAN SUMBER DAYA AIR
		Bendung Cibogel		v
		Bendung Cicadek		v
		Bendung Cicanggo		v
		Bendung Ciherang		v
		Bendung Cikadongdong 1		v
		Bendung Cikadongdong 2		v
		Bendung Cikekel		v
		Bendung Cilengsor		v
		Bendung Cirangkas Hilir		v
		Bendung Cisangiang		v
		Bendung Cisimeut		v
		Bendung Cupalandak		v
		Bendung Parakan Beusi		v
		Bendung Pasir Eurih		v
		Sadap Cibarengkok		v
		Sadap Cibeas		v
		Sadap Cibogel		v
		Sadap Ciboleger		v
		Sadap Cikadongdong 1		v
		Sadap Cikekel		v
		Sadap Cirangkas Hilir		v
		Sadap Cisangiang		v
		Sadap Cisimeut		v
		Sadap Ciujung Hilir		v
		Sadap Leuwi Huut		v
		Situ Ciboleger	v	v
		Situ Ciboleger/Cidangdang	v	
		Situ Cikekel	v	
		Situ Dangdang Ageung	v	
20	Maja	Bang. Pelimpah Cimalaung		v
		Bendung Bantar Jaya		v
		Bendung Cimalang		v
		Bendung Cimalaung		v
		Embung Cikeutreuk		v
		Embung Cirangkong		v
		Waduk Cicinta	v	
		Situ Cicinta	v	v
21	Malingping	Bang. Bagi Cipeucangpare		v
		Bang. Oncoran Cihanjaeun		v
		Bang. Oncoran Cipeucangpare		v
		Bang. Oncoran Citatarpahang		v
		Bang. Pelimpah Cigarukgak		v
		Bang. Pelimpah Samping Cilangkahan 2		v
		Bang. Pelimpah Samping Cipeucangpare		v
		Bang. Ukur Cilangkahan 2		v
		Bang. Ukur Cipeucangpare		v
		Bendung Cicangkeuteuk		v
		Bendung Cigarukgak		v
		Bendung Cihanjaeun		v
		Bendung Cilangkahan 2		v
		Bendung Cipeucangpare		v
		Bendung Cipeundeuy		v
		Bendung Citalang		v
		Bendung Citatarpahang		v
		Bendung Mumunggang		v

NO	KECAMATAN	NAMA BANGUNAN/SDEW	BANGUNAN PENGENDALIAN BANJIR	BANGUNAN SUMBER DAYA AIR
		Rawa Bagedur	v	
		Sadap Cilangkahan 2		v
		Sadap Cipeucangpare		v
		Sadap Citatarpahang		v
		Waduk Cibinuangen	v	
22	Muncang	Bang. Bagi Cirangpang		v
		Bang. Oncoran Cikeong		v
		Bang. Oncoran Cirangpang		v
		Bang. Oncoran Eunyay		v
		Bang. Pelimpah Cikeong		v
		Bang. Pelimpah Cikokompol		v
		Bang. Pelimpah Ciminyak		v
		Bang. Pelimpah Cireungis		v
		Bang. Pelimpah Eunyay		v
		Bang. Sadap Cikokompol		v
		Bang. Suplesi Cico'o Timur		v
		Bang. Suplesi Cikarag		v
		Bang. Suplesi Cikeong		v
		Bang. Suplesi Cikeuyeup		v
		Bang. Suplesi Cireungis		v
		Bang. Suplesi Cisela Gunung		v
		Bang. Suplesi Eunyay		v
		Bang. Suplesi Leuwi Huut		v
		Bang. Ukur Cico'o Timur		v
		Bang. Ukur Cilaki		v
		Bendung Cadas Gantung		v
		Bendung Cibiksir		v
		Bendung Cicariweuheun		v
		Bendung Cico'o Timur		v
		Bendung Cieksel		v
		Bendung Cigarungcilaki		v
		Bendung Cikarag		v
		Bendung Cikawah		v
		Bendung Cikeong		v
		Bendung Cikere		v
		Bendung Cikeuyeup (Muncang)		v
		Bendung Cikokompol		v
		Bendung Cikujang		v
		Bendung Cilaki		v
		Bendung Cilunglum		v
		Bendung Ciminyak		v
		Bendung Cirangpang		v
		Bendung Cireungis		v
		Bendung Cisela Gunung		v
		Bendung Cupalandak		v
		Bendung Eunyay		v
		Bendung Leuwi Huut		v
		Bendung Leuwi Urug		v
		Embung Babakan Waluya		v
		Embung Cikere		v
		Embung Kadubugang		v
		Sadap Cibiksir		v
		Sadap Cicariweuheun		v
		Sadap Cico'o Timur		v
		Sadap Cikeong		v
		Sadap Cikeuyeup		v
		Sadap Cikujang		v

NO	KECAMATAN	NAMA BANGUNAN/SDEW	BANGUNAN PENGENDALIAN BANJIR	BANGUNAN SUMBER DAYA AIR
		Sadap Cilaki		v
		Sadap Cilunglum		v
		Sadap Ciminyak		v
		Sadap Cireungis		v
		Sadap Eunyay		v
		Sadap Leuwi Urug		v
23	Panggarangan	Bang. Bagi Cisiih Girang		v
		Bang. Oncoran Cigalugur		v
		Bang. Oncoran Cisiih Girang		v
		Bang. Pelimpah Samping Ciapus		v
		Bang. Pelimpah Samping Cigalugur		v
		Bang. Pelimpah Samping Cisiih Girang		v
		Bang. Sadap Cimancak		v
		Bang. Suplesi Cipakus		v
		Bang. Suplesi Cisorong		v
		Bang. Ukur Cisiih Girang		v
		Bendung Cadas Koneng		v
		Bendung Ciapus		v
		Bendung Cigalugur		v
		Bendung Cijengkol (Gunung Gede)		v
		Bendung Cikoleang		v
		Bendung Cimancak		v
		Bendung Cimandiri		v
		Bendung Cimandiri (Girang)		v
		Bendung Cimapag		v
		Bendung Cimuncang		v
		Bendung Cimungkal		v
		Bendung Cipakus		v
		Bendung Cisiih Girang		v
		Bendung Cisorong		v
		Bendung Curug Ciung		v
		Bendung Curug Tilu		v
		Bendung Gunung Gede		v
		Bendung Hawalad		v
		Bendung Menced		v
		Bendung Naringgul		v
		Embung Cibeureum		v
		Embung Sampaleun		v
		Sadap Ciapus		v
		Sadap Cigalugur		v
		Sadap Cipakus		v
		Sadap Cisiih Girang		v
		Situ Gunung Buleud	v	
24	Rangkasbitung	Bang. Bagi Cijoro		v
		Bang. Oncoran Cijoro		v
		Bendung Cibondol		v
		Bendung Cikambuy		v
		Bendung Cikuda		v
		Bendung Cipancur		v
		Bendung Curug		v
		Bendung Kadubale		v
		Bendung Leuwi Panjang		v
		Embung Curug Banteng		v
		Embung Sentral		v
		Bendung Karian		v
		Sadap Cijoro		v

NO	KECAMATAN	NAMA BANGUNAN/SDEW	BANGUNAN PENGENDALIAN BANJIR	BANGUNAN SUMBER DAYA AIR
		Sadap Curug		v
		Situ Cijoro	v	v
		Situ Cikuda	v	v
		Situ Rancalentah	v	v
		Situ Rawa Sari	v	
		Waduk Karian	v	v
25	Sajira	Bang. Bagi Cikoneng		v
		Bang. Bagi Ciwaru 1		v
		Bang. Bagi Leuwi Gentong		v
		Bang. Oncoran Cigarungcilaki		v
		Bang. Oncoran Cikoneng		v
		Bang. Oncoran Cikumpay		v
		Bang. Oncoran Cipunglu		v
		Bang. Pelimpah Cibojan		v
		Bang. Pelimpah Cidengdong		v
		Bang. Pelimpah Cikoneng		v
		Bang. Pelimpah Cipunglu		v
		Bang. Pelimpah Ciwaru 1		v
		Bang. Pelimpah Samping Cigarungcilaki		v
		Bang. Suplesi Cilaja		v
		Bang. Suplesi Citeupuseun		v
		Bang. Suplesi Citinggar		v
		Bang. Suplesi Ciwaru 2		v
		Bang. Suplesi Leuwi Gentong		v
		Bendung Cicukang		v
		Bendung Cidengdong		v
		Bendung Cihonje		v
		Bendung Cikoneng		v
		Bendung Cikumpay		v
		Bendung Cilaja		v
		Bendung Cilantuk		v
		Bendung Cipunglu		v
		Bendung Ciputih		v
		Bendung Citeupuseun		v
		Bendung Ciwaru 1		v
		Bendung Ciwaru 2		v
		Bendung Leuwi Gentong		v
		Bendung Ungkal Munding		v
		Embung Pasir Leles		v
		Situ Citinggar	v	
		Sadap Cibojan		v
		Sadap Cicukang		v
		Sadap Cidengdong		v
		Sadap Cihonje		v
		Sadap Cilaja		v
		Sadap Cipunglu		v
		Sadap Citinggar		v
		Sadap Ciwaru 1		v
		Sadap Ciwaru 2		v
		Sadap Leuwi Gentong		v
		Sadap Ungkal Munding		v
		Situ Bojan	v	
		Situ Cibojan	v	v
		Situ Cidendong	v	
		Situ Cikondang	v	
		Situ Citinggar	v	v
		Situ Ciunem	v	

NO	KECAMATAN	NAMA BANGUNAN/SDEW	BANGUNAN PENGENDALIAN BANJIR	BANGUNAN SUMBER DAYA AIR
26	Sobang	Bang. Oncoran Ciparabakti		v
		Bang. Pelimpah Cinangkaruka		v
		Bang. Pelimpah Cipadang		v
		Bang. Pelimpah Ciparabakti		v
		Bang. Pelimpah Cipeuteuy		v
		Bang. Pelimpah Cipicung 2		v
		Bang. Pelimpah Cisanding Catang		v
		Bang. Pelimpah Leuwimakam		v
		Bang. Pelimpah Sindang Agung		v
		Bang. Pelimpah Walang		v
		Bang. Suplesi Ciastim		v
		Bang. Suplesi Cikeuyeup		v
		Bang. Suplesi Cinangkaruka		v
		Bang. Suplesi Ciparabakti		v
		Bang. Suplesi Cipeuteuy		v
		Bang. Suplesi Cisanding Catang		v
		Bang. Suplesi Citujah		v
		Bendung Ciastim		v
		Bendung Cibalerangan		v
		Bendung Cibengkok		v
		Bendung Ciciung		v
		Bendung Cijanotreng		v
		Bendung Cijengkol		v
		Bendung Cikabayan		v
		Bendung Cikaterkes		v
		Bendung Cikeuyeup (Sobang)		v
		Bendung Cilesang		v
		Bendung Cimanual		v
		Bendung Cimondene		v
		Bendung Cinangkaruka (Sobang)		v
		Bendung Cipadang		v
		Bendung Ciparabakti		v
		Bendung Cipeuteuy		v
		Bendung Cipicung		v
		Bendung Cipicung 2		v
		Bendung Cirompang		v
		Bendung Cisanding Catang		v
		Bendung Citalahab		v
		Bendung Citujah		v
		Bendung Karangbuay		v
		Bendung Leuwimakam		v
		Bendung Pasir Sereh		v
		Bendung Ranca Kalo		v
		Bendung Serdang Agung		v
		Bendung Sindang Agung		v
		Bendung Walang		v
		Embung Rancakiarjali		v
		Sadap Cibengkok		v
		Sadap Cipicung		v
		Sadap Cisanding Catang		v
27	Wanasalam	Bendung Cikarang		v
		Bendung Cipeucang		v
		Bendung Malang Nengah		v
		Embung Badong		v
		Embung Cisarap		v
		Rawa Gunggrung	v	
		Rawa Lebak keusik	v	

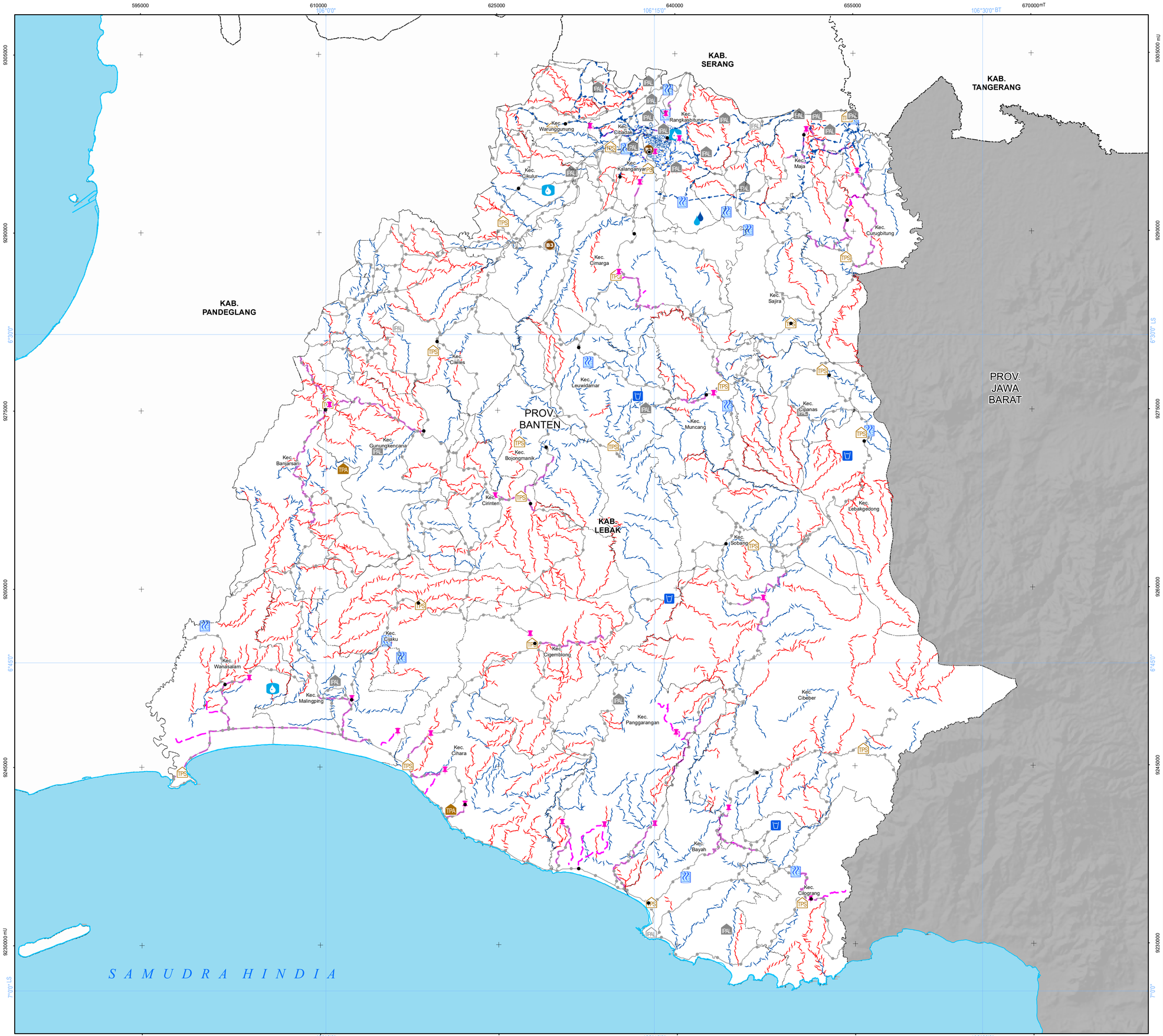
NO	KECAMATAN	NAMA BANGUNAN/SDEW	BANGUNAN PENGENDALIAN BANJIR	BANGUNAN SUMBER DAYA AIR
		Sadap Cikarang		v
		Sadap Cipeucang		v
28	Warunggunung	Bang. Oncoran Cipangasih		v
		Bang. Oncoran Suprit		v
		Bang. Pelimpah Cilembun		v
		Bang. Pelimpah Cipangasih		v
		Bang. Pelimpah Leuwi Hoya		v
		Bang. Pelimpah Samping Ciselaraja		v
		Bang. Pelimpah Samping Heas		v
		Bang. Pelimpah Samping Pasirbedil		v
		Bang. Pelimpah Suprit		v
		Bang. Pertemuan Heas		v
		Bang. Pertemuan Pasirbedil		v
		Bang. Pertemuan Rancadundu		v
		Bang. Suplesi Ajid		v
		Bang. Ukur Cilembun		v
		Bang. Ukur Ciselaraja		v
		Bendung Ajid		v
		Bendung Bunut Oteng		v
		Bendung Cieundik		v
		Bendung Cikoncer		v
		Bendung Cilembun		v
		Bendung Cilewong		v
		Bendung Cipangasih		v
		Bendung Ciruyung (Warunggunung)		v
		Bendung Ciselaraja		v
		Bendung Cisitu		v
		Bendung Ciwaru		v
		Bendung Leuwi Hoya		v
		Bendung Pasirbedil		v
		Bendung Rajut		v
		Bendung Suprit		v
		Sadap Bagi Ajid		v
		Sadap Bengkok		v
		Sadap Bunut Oteng		v
		Sadap Cikoncer		v
		Sadap Cilembun		v
		Sadap Cilewong		v
		Sadap Cipangasih		v
		Sadap Ciselaraja		v
		Sadap Ciwaru		v
		Sadap Heas		v
		Sadap Pasirbedil		v
		Sadap Rancadundu		v
		Sadap Suprit		v
		Situ Cilembun	v	v

Sumber : Dinas PUPR Kabupaten Lebak, 2021

BUPATI LEBAK

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN XI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG SISTEM JARINGAN PRASARANA LAINNYA

U

SKALA : 1:153.000

0 4 8 16 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai
- Badan Air

RENCANA STRUKTUR RUANG
Sistem Jaringan Prasarana Lainnya

Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
- Bak Penampungan Air Hujan
- Sumur Pompa
- Unit Air Baku
- Unit Produksi
- Jaringan Air Baku
- Unit Distribusi

Sistem Pengelolaan Air Limbah (SPAL)
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik
- Infrastruktur Sistem Pengelolaan Air Limbah Non Domestik
- Jaringan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik

Sistem Jaringan Persampahan
- Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)
- Tempat Penampungan Sementara (TPS)
- Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)

Sistem Drainase
- Jaringan Drainase Primer
- Jaringan Drainase Sekunder

Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)
- Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)

Sistem Jaringan Evakuasi Bencana
- Tempat Evakuasi Bencana
- Jalur Evakuasi Bencana

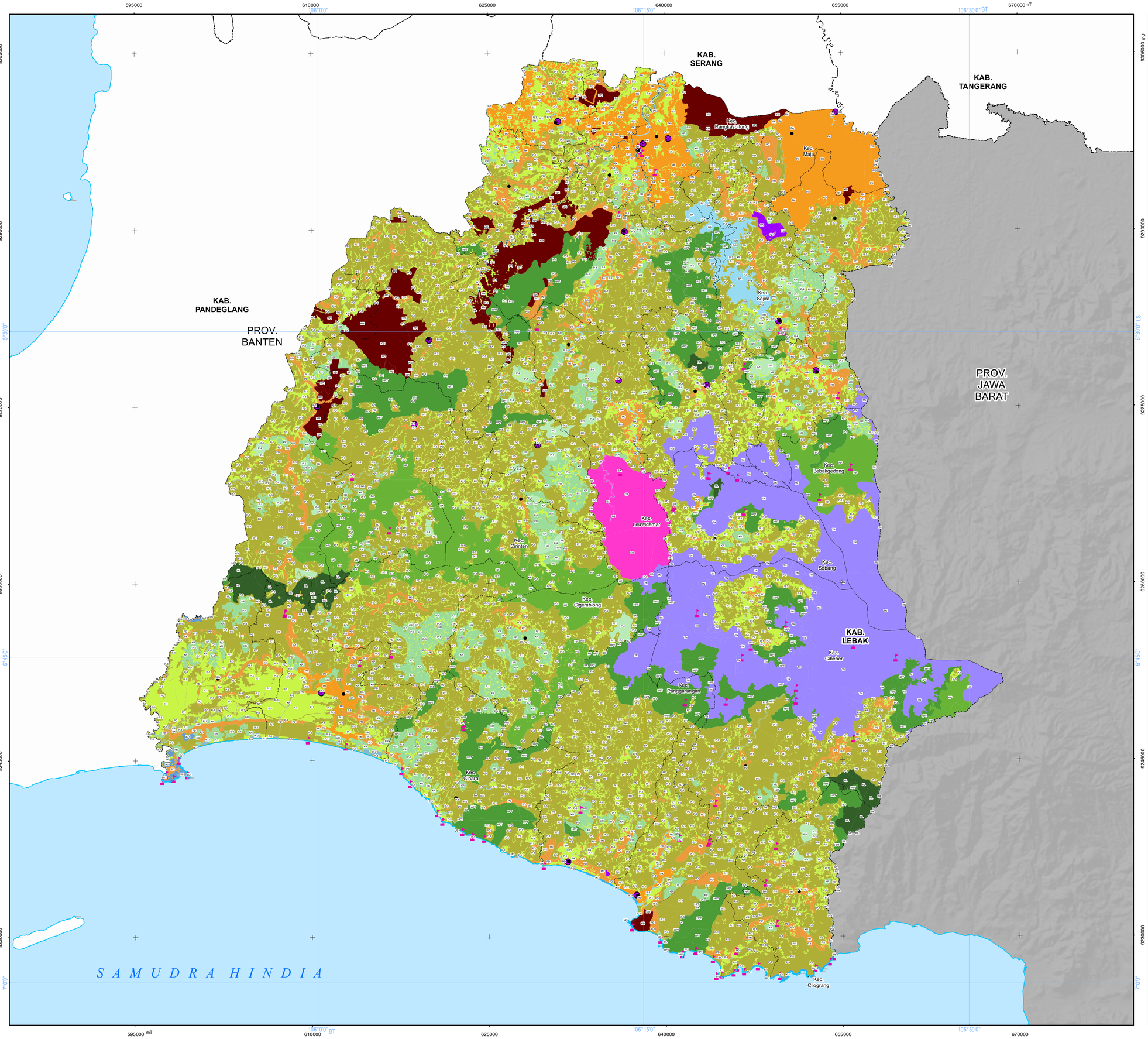
SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Dasar dan Peta Tematik telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
2. Citra Satelit Spot 6, Perekaman Tahun 2017 Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
3. Permendagri No.43 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
4. Permendagri No.55 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
5. Permendagri No.57 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
6. Permendagri No.47 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tanggerang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
7. Permendagri No.4 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah
8. Hasil Analisis 2018 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI LEBAK

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN XII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA POLA RUANG

U

SKALA : 1:153.000

0 4 8 16 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai

Rencana Pola Ruang

Kawasan Lindung

Badan Air
- BA Badan Air

Kawasan Cagar Budaya
- CB Kawasan Cagar Budaya

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- HL Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Konservasi
- TN Taman Nasional

Kawasan Budi Daya

Lokasi Pariwisata
- Lokasi Pariwisata

Kawasan Hutan Produksi
- HPT Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HP Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan Pemukiman
- PK Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Perikanan
- KPT Kawasan Perikanan Tangkap
- KPZ Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Perkebunan Rakyat
- KR Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan Pertanian
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 Kawasan Perkebunan
- P-4 Kawasan Peternakan

Kawasan Peruntukan Industri
- KPI Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pertahanan dan Keamanan
- Lokasi Pertahanan dan Keamanan
- KPH Kawasan Pertahanan dan Keamanan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Dasar dan Peta Tematik telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
2. Citra Satelit Spot 6, Perekaman Tahun 2017.Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
3. Permendagri No.43 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
4. Permendagri No.55 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
5. Permendagri No.57 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
6. Permendagri No.47 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tanggerang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
7. Permendagri No.4 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
8. Keputusan Menteri LHK No.6607/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Banten Sampai dengan Tahun 2020
9. SK.6744/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 Tentang MHA Kasepuhan Karang
10. SK.1548/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/2/2019 Tentang MHA Kasepuhan Cirompang
11. SK.1547/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/2/2019 Tentang MHA Kasepuhan Pasir Eurih
12. SK.6164/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/7/2019 Tentang MHA Kasepuhan Citorek
13. SK.10247/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2019 Tentang MHA Kasepuhan Cibarani
14. SK.10084/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2022 Tentang MHA Kasepuhan Cisungsang
15. Kepmen ATR/Ka BPN No. 215/Kep-7.1/IX/2015 Tentang Penegasan dan Pengakuan Hak Milik Komunal Atas Nama Masyarakat Baduy Atas Tanah di Kabupaten Lebak
16. Hasil Analisis 2018 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI LEBAK

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Lampiran XIII

Sebaran Kawasan Pariwisata

JENIS WISATA	NAMA OBJEK WISATA DAN LOKASI
Wisata Alam	**Pantai** 1. Pantai Cihara di Kecamatan Cihara; 2. Pantai Talanca di Kecamatan Malingping; 3. Pantai Cimandiri di Kecamatan Panggarangan; 4. Pantai Cibobos di Kecamatan Panggarangan; 5. Pantai Tanjung Panto di Kecamatan Wanasalam; 6. Pantai Karang Seke di Kecamatan Wanasalam; 7. Pantai Binuangeun di Kecamatan Wanasalam; 8. Pantai Sawah Sikabayan di Kecamatan Wanasalam; 9. Pantai Karangmalang di Kecamatan Wanasalam; 10. Pantai Bagedur di Kecamatan Malingping; 11. Pantai Karangtaraje di Kecamatan Bayah; 12. Pantai Sawarna di Kecamatan Bayah; 13. Pantai Legon Pari di Kecamatan Bayah; 14. Pantai Pulau Manuk di Kecamatan Bayah; 15. Pantai Ciantir di Kecamatan Bayah; 16. Pantai Tanjung Layar di Kecamatan Bayah; 17. Pantai Karangseupang di Kecamatan Bayah; 18. Pantai Cibareno di Kecamatan Cilograng; 19. Pantai Citarate di Kecamatan Cilograng; 20. Pantai Guha Gede di Kecamatan Cilograng; 21. Pantai Karang Bokor di Kecamatan Bayah; 22. Pantai Goa Langir di Kecamatan Bayah; 23. Pantai Karang Babi di Kecamatan Cilograng; 24. Pantai Karang Beureum di Kecamatan Bayah; dan 25. Pantai Sukahujan di Kecamatan Cihara. **Goa** 1. Goa Lalay di Kecamatan Bayah; 2. Goa Lauk di Kecamatan Cilograng 3. Goa Langit di Kecamatan Bayah; 4. Goa Sangiang di Kecamatan Sobang **Curug** 1. Air Terjun Curugrame di Kecamatan Cijaku; 2. Curug Kanteh di Kecamatan Cilograng; 3. Curug Ciporolak di Kecamatan Cibeber 4. Curug Karang di Kecamatan Muncang 5. Curug Sata di Kecamatan Gunungkencana 6. Curug Munding di Kecamatan Gunungkencana **Situ** 1. Situ Palayangan di Kecamatan Cimarga; dan 2. Situ Cijoro Bendungan di Kecamatan Rangkasbitung. **Hutan** 1. Taman Nasional Gunung Halimun Salak 2. Wisata Gunung Luhur
Wisata Budaya	1. Wisata budaya Suku Baduy di Kecamatan Leuwidamar; 2. Wisata budaya seren taun di Kecamatan Cibeber dan Sobang; 3. Situs Cibedug di Kecamatan Cibeber; 4. Situs Kosala di Kecamatan Cipanas; 5. Situs Batu Bedil di Kecamatan Bayah; dan 6. Masyarakat Kasepuhan di Kecamatan Cibeber
Wisata Buatan	1. Wisata arung jeram di Kecamatan Lebakgedong; 2. Wisata pemandian air panas di Kecamatan Cipanas; 3. Wisata air panas senanghati di Kecamatan Malingping; 4. Wisata Air Panas Cikawah di Kecamatan Sobang;

JENIS WISATA	NAMA OBJEK WISATA DAN LOKASI
	5. Wisata Hutan Meranti di Kecamatan Muncang 6. Wisata Kebun Teh Cikuya di Kecamatan Cibeber 7. Wisata Geo Ex Aneka Tambang di Kecamatan Cibeber 8. Museum Multatuli di Kecamatan Rangkasbitung 9. Rumah Peninggalan Edward Douwess Dekker di Kecamatan Rangkasbitung 10. Balong Ranca Indah di Kecamatan Rangkasbitung
Wisata Religi	Wisata Ziarah Wong Sagati di Kecamatan Sajira.
Situs Geologi / *Geosite*	1. Cadas Kudatuan di Kecamatan Sajira 2. Fosil Kayu Sempur di Kecamatan Sajira 3. Curug Cikawah di Kecamatan Sobang 4. Gua Sanghiang di Kecamatan Sobang 5. Curug Cipicung di Kecamatan Sobang 6. Curug Cisuren di Kecamatan Cibeber 7. Gunung Luhur di Kecamatan Cibeber 8. Curug Ciporolak di Kecamatan Cibeber 9. Kompleks Mineralisasi Cirotan di Kecamatan Cibeber 10. Batu Bedil di Kecamatan Cibeber 11. Endapan Gunung api Tua Bantar Gadung di Kecamatan Bayah 12. Endapan Delta Karang Taraje di Kecamatan Bayah 13. Karangbokor di Kecamatan Bayah 14. Kompleks Gua Langir di Kecamatan Bayah 15. Tanjung Layar di Kecamatan Bayah 16. Gua Lalay di Kecamatan Bayah 17. Endapan Turbidit Karang Taraje Sawarna di Kecamatan Bayah 18. Pantai Seupang di Kecamatan Bayah 19. Gua Lauk di Kecamatan Cilograng 20. Gua Wayang di Kecamatan Panggarangan 21. Gua Awipis Karang Kandang di Kecamatan Panggarangan 22. Intrusi Gunung Buleud di Kecamatan Panggarangan 23. Lignit Karangkamulyan di Kecamatan Cihara 24. Karang Songsong di Kecamatan Cihara 25. Bukit Sodong di Kecamatan Cihara 26. Pantai Karangmeja di Kecamatan Cihara 27. Granodiorit Cihara di Kecamatan Cihara 28. Batuan Metamorf Cihara di Kecamatan Cihara 29. Curug Rame di Kecamatan Cijaku 30. Curug Dengdeng di Kecamatan Malingping 31. Air Panas Citando di Kecamatan Malingping 32. Curug Munding di Kecamatan Gunungkencana

Sumber : 1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lebak, 2022
2. Kepmen ESDM No. 164.K/HK.02/MEM.G/2022

BUPATI LEBAK

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN XIV
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA KAWASAN STRATEGIS

U

SKALA : 1:153.000

0 4 8 16 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai

Penetapan Kawasan Strategis

Sudut Kepentingan
- Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan Hidup
- Pendayagunaan Sumber Daya Alam dan/atau Teknologi Tinggi
- Pertumbuhan Ekonomi
- Sosial dan Budaya

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Dasar dan Peta Tematik telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
2. Citra Satelit Spot 6, Perekaman Tahun 2017. lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
3. Permendagri No.43 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
4. Permendagri No.55 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
5. Permendagri No.57 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
6. Permendagri No.47 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tanggerang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
7. Permendagri No.4 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
8. Keputusan Menteri LHK No.6607/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Banten Sampai dengan Tahun 2020
9. SK.6744/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 Tentang MHA Kasepuhan Karang
10. SK.1548/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/2/2019 Tentang MHA Kasepuhan Cirompang
11. SK.1547/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/2/2019 Tentang MHA Kasepuhan Pasir Eurih
12. SK.6164/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/7/2019 Tentang MHA Kasepuhan Citorek
13. SK.10247/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2019 Tentang MHA Kasepuhan Cibarani
14. SK.10084/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2022 Tentang MHA Kasepuhan Cisungsang
15. Kepmen ATR/Ka BPN No. 215/Kep-7.1/IX/2015 Tentang Penegasan dan Pengakuan Hak Milik Komunal Atas Nama Masyarakat Baduy Atas Tanah di Kabupaten Lebak
16. Hasil Analisis 2018 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI LEBAK

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

Lampiran XV

Indikasi Program Utama

No		Program Utama		Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana						
								PJM-1		PJM-2				
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
A		**PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG**												
	1	**Perwujudan Pengembangan Pusat Permukiman**												
		1.1	Pengembangan dan Penataan Pusat Kegiatan Wilayah (PKW)	Pengembangan Kawasan Pusat Pemerintahan Daerah	Kecamatan Rangkasbitung	APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR)							
				Pembangunan, pengembangan, dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas yang menunjang Pusat Permukiman.		APBN, APBD Kab/Prov & Swasta	Kementerian/Lembaga, Pemprov, Pemkab & Swasta							
				Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang Perkotaan Kecamatan Rangkasbitung		APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR)							
				Peningkatan sarana Rumah Sakit Umum Daerah		APBD Kab APBD Prov, & Swasta	Pemprov, Pemkab & Swasta							
				Peningkatan sarana pasar lokal utama		APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR, Dinas Perindag)							
				Pengembangan prasarana perdagangan regional		APBD Kab & Prov / Swasta	Pemkab & Pemprov (Dinas Perindag)							
				Peningkatan dan pengembangan terminal		APBD Kab, APBD Prov & APBN	Kementerian/Lembaga, Pemprov, & Pemkab							
				Peningkatan kapasitas pelayanan air minum perkotaan		APBD Kab & Prov	Pemkab & Pemprov (PDAM, Dinas PUPR)							
				Pengembangan prasarana dan sarana permukiman		APBD Kab, APBD Prov, APBN, & Swasta	Kementerian/Lembaga, Pemprov, Pemkab, & Swasta							
				Pengembangan dan peningkatan sarana sosial dan budaya perkotaan		APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR dan Dinas Pariwisata dan Budaya)							
		1.2		Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	Kecamatan Bayah; Kecamatan Cipanas;	APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR)							

No	Program Utama		Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana						
							PJM-1		PJM-2				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Pengembangan dan Penataan Pusat Kegiatan Lokal (PKL)	Pembangunan, pengembangan, dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas yang menunjang Pusat Permukiman	Kecamatan Maja Kecamatan Malingping	APBN, APBD Kab/Prov & Swasta	Kementerian/Lembaga, Pemprov, Pemkab & Swasta							
			pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan		APBD Kab APBD Prov, & Swasta	Pemprov, Pemkab, & Swasta							
			Peningkatan sarana pasar lokal utama		APBD Kab/Swasta	Pemkab (Dinas Perindag)							
			Pengembangan dan peningkatan terminal penumpang dan barang		APBN & APBD Kab/Prov	Kementerian/Lembaga, Pemprov, Pemkab (Dinas PUPR, Dinas Perhubungan)							
			Pengembangan dan peningkatan kapasitas pelayanan air minum		APBD Kab & Prov	Pemkab & Pemprov (PDAM, Dinas PUPR)							
			Pengembangan prasarana dan sarana permukiman		APBN, APBD Kab, APBD Prov, & Swasta	Kementerian/Lembaga, Pemprov, Pemkab, & Swasta							
			Pengembangan dan peningkatan sarana sosial dan budaya		APBD Kab	Pemkab							
		1.3 Pengembangan Pusat Pelayan Kawasan	Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang	Kecamatan Cileles; Kecamatan Leuwidamar; Kecamatan Cikulur; Kecamatan Cibeber; Kecamatan Wanasalam; Kecamatan Cijaku; Kecamatan Cirinten; Kecamatan Gunungkencana; Kecamatan Banjarsari; Kecamatan Muncang; Kecamatan Curugbitung; Kecamatan Cilograng; dan Kecamatan Warunggunung	APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR)							
			Pembangunan, pengembangan, dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas yang menunjang Pusat Permukiman			Pemkab (Dinas PUPR)							
			Peningkatan sarana pelayanan kesehatan			Pemkab (Dinas Kesehatan)							
			Peningkatan sarana pasar lingkungan			Pemkab (Dinas PUPR, Dinas Perindag)							
			Peningkatan kapasitas pelayanan air minum			Pemkab (Dinas PUPR, PDAM)							
			Pembangunan dan Peningkatan terminal penumpang			Pemkab (Dinas Perhubungan)							
			Pengembangan prasarana dan sarana permukiman			Pemkab (Dinas Permukiman, Dinas PUPR)							

No	Program Utama			Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana						
								PJM-1		PJM-2				
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Pengembangan dan peningkatan sarana sosial dan budaya			Pemkab							
				Pengembangan prasarana dan sarana untuk mendukung pengembangan agroindustri dan agropolitan			Pemkab (Dinas Pertanian, Dinas Perindag, Dinas PUPR)							
		1.4	Pengembangan dan Penataan Pusat Pelayan Lingkungan pada masing-masing pusat Desa/Kelurahan	Pembangunan, pengembangan, dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas yang menunjang Pusat Permukiman	Kecamatan Warunggunung Kecamatan Cibadak Kecamatan Cikulur Kecamatan Cimarga Kecamatan Sajira Kecamatan Curugbitung Kecamatan Lebakgedong Kecamatan Sobang Kecamatan Bojongmanik Kecamatan Banjarsari Kecamatan Gunnung kencana Kecamatan Wanasalam Kecamatan Malingping Kecamatan Cihara Kecamatan Cigembong Kecamatan Panggarangan	APBD Kab	Pemkab						
				Peningkatan sarana pelayanan kesehatan			Pemkab (Dinas Kesehatan)							
				Peningkatan sarana pasar lingkungan			Pemkab (Dinas PUPR, Dinas Perindag)							
				Peningkatan kapasitas pelayanan air minum di perdesaan			Pemkab (Dinas PUPR, PDAM)							
				Pengembangan prasarana dan sarana dasar permukiman			Pemkab (Dinas Permukiman, Dinas PUPR)							
				Pengembangan prasarana dan sarana untuk mendukung pengembangan agroindustri dan agropolitan			Pemkab (Dinas Pertanian, Dinas Perindag, Dinas PUPR)							
				Pengembangan dan peningkatan sarana sosial dan budaya			Pemkab							
	2	**Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana**												
		2.1	Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Transportasi	**A. Sistem Jaringan Transportasi Darat**										
				1. Pembangunan dan Pemeliharaaan Jalan Tol	Ruas Jalan Tol Serang – Panimbang	APBN, BUMN, & Swasta	Kemen PUPR, BUMN, dan Swasta							
				2. Pembangunan Sistem Jaringan Trasnportasi Angkutan Massal Cepat Terpadu Berbasis Jalan										
				Pembangunan Sistem Jaringan Trasnportasi Angkutan Massal Cepat Terpadu Berbasis Jalan	Kabupaten Lebak	APBN, APBD Prov Swasta	Kemen PUPR, Dinas PUPR Prov, BUMN							

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana						
						PJM-1		PJM-2				
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		3. Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Arteri Primer	Ruas Jalan Bts. Kota Pandeglang – Bts. Kota Rangkasbitung	APBN	Kemen PUPR							
			Ruas Jalan *By Pass* Rangkasbitung (Jln. Soekarno Hatta - Rangkasbitung)									
			Ruas Jalan Cikande - Rangkasbitung									
		4. Pengembangan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan Kolektor Primer	Ruas Jalan Bts. Kota Rangkasbitung-Cigelung (Bts. Prov Jabar)	APBN	Kemen PUPR							
			Ruas Jalan Raya Cipanas (Rangkasbitung)									
			Ruas Jalan Muara Binuangeun - Simpang									
			Ruas Jalan Bayah-Cibarenok-bts. Prov. Jabar									
			Ruas Jalan Raya Cikande (Jln. Otto Iskandardinata Rangkasbitung)									
			Ruas Jalan Ciruas - Petir - Warunggunung	APBD Prov	Pemprov (Dinas PUPR)							
			Ruas Jalan Simpang - Bayah									
			Ruas Jalan Citeras-Kopo (Citeras-Tigaraksa)									
			Ruas Jalan Maja – Koleang									
			Ruas Jalan Picung-Malingping-Simpang									
			Ruas Jalan Ciparay-Wr. Banten									
			Ruas Jalan Bayah - Cikotok									
			Ruas Jalan Cikotok- Bts. Jabar									
			Ruas Jalan Cikumpay - Ciparay									

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana						
						PJM-1		PJM-2				
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Ruas Jalan Jendral Ahmad Yani (Rangkasbitung)									
			Ruas Jalan Picung - Munjul									
			Ruas Jalan Sunan Kalijaga (Rangkasbitung)									
			Ruas Jalan Gunung Madur - Pulo Manuk									
			Ruas Jalan Gunung Luhur - Cipulus									
			Ruas Jalan Cipanas - Ciparay									
		5. Jaringan Jalan Lingkungan Primer										
		Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaaan Jaringan Jalan Lingkungan Primer	Ruas – ruas jalan lingkungan primer	APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR)							
		6. Jaringan Jalan Lokal Primer dan Lokal Sekunder										
		Pembangunan, Pengembangan dan Pemeliharaaan Jaringan Jalan Lokal Primer dan Lokal Sekunder	Ruas-ruas jalan Lakal Primer dan Lokal Sekunder	APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR)							
		7. Terminal Penumpang										
		Peningkatan, pengembangan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe A	Kecamatan Cibadak	APBN	Kementerian/Lembaga							
		Peningkatan Terminal Penumpang Tipe B menjadi Tipe A	Kecamatan Malingping	APBN, APBD Prov	Kementerian/Lembaga Pemprov (Dinas Perhubungan)							
		Pengembangan Terminal Penumpang Tipe A	Kecamatan Malingping	APBN	Kementerian/Lembaga							
		Peningkatan Terminal Penumpang Tipe C menjadi Tipe B	Kecamatan Cipanas	APBD Kab, dan APBD Prov,	Pemprov & Pemkab (Dinas Perhubungan)							
		Pengembangan dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe B	Kecamatan Bayah	APBD Prov,	Pemprov (Dinas Perhubungan)							

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana						
						PJM-1		PJM-2				
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Pengembangan, dan pemeliharaan Terminal Penumpang Tipe C	Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Kalanganyar	APBD Kab	Pemkab (Dinas Perhubungan)							
		Pembangunan dan peningkatan sub terminal menjadi Terminal Penumpang Tipe C	Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Panggarangan, Wanassalam, Kecamatan Maja	APBD Kab	Pemkab (Dinas Perhubungan)							
		Kajian Pembangun Terminal Penumpang Tipe B	Kecamatan Maja	APBD Prov	Pemprov (Dinas Perhubungan)							
		8. Terminal Barang										
		Pengembangan terminal barang	Kecamatan Maja dan Kecamatan Warunggunung	APBD Kab, APBD Prov, dan Swasta	Pemprov dan Pemkab							
		9. Sistem Jaringan Kereta Api										
		Pembangunan jaringan jalur kereta api antarkota	jalur Cilegon – Serang – Pandeglang - Rangkasbitung	APBD Prov, APBN dan BUMN	Kementerian/Lembaga, Pemprov, PT. KAI							
		Pengembangan dan pemeliharaan jaringan jalur kereta api antarkota	Jalur Serpong – Maja – Rangkasbitung - Merak	APBD Prov, APBN dan BUMN	Kementerian/Lembaga, Pemprov, PT. KAI							
		Pengembangan angkutan antarkota	Jalur Serpong – Maja – Rangkasbitung - Merak	APBD Prov, APBN dan BUMN	Kementerian/Lembaga, Pemprov, PT. KAI							
		Pengembangan jalur ganda dan elektrifikasi	Jalur Serpong – Maja – Rangkasbitung - Merak	APBD Prov, APBN dan BUMN	Kementerian/Lembaga, Pemprov, PT. KAI							
		Pengaktifan kembali jaringan jalur kereta api antarkota	jalur Saketi - Bayah jalur Rangkasbitung – Saketi – Labuan	APBD Prov, APBN dan BUMN	Kementerian/Lembaga, Pemprov, PT. KAI							
		Pembangunan Stasiun Penumpang Kota Baru Kecamatan Maja	Kecamatan Maja	APBD Prov, APBN, BUMN, dan Swasta	Kementerian/Lembaga, Pemprov, PT. KAI, dan Swasta							
		Pengaktifan Kembali dan pengembangan stasiun penumpang	Stasiun Banjarsari di Kecamatan Banjarasari,	APBD Prov, APBN dan BUMN	Kementerian/Lembaga, Pemprov, PT. KAI							

No	Program Utama			Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana						
								PJM-1		PJM-2				
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					Stasiun Kerta di Kecamatan Banajarsari, Stasiun Malingping di Kecamatan Malingping, Stasiun Panggarangan di Kecamatan Panggarangan, Stasiun Bayah di Kecamatan Bayah									
				Peningkatan pelayanan sarana dan prasarana stasiun penumpang	Stasiun Rangkasbitung di Kecamatan Rangkasbitung, Stasiun Citeras di Kecamatan Rangkasbitung, Stasiun Maja di Kecamatan Maja	APBD Prov, APBN dan BUMN	Kementerian/Lembaga, Pemprov, PT. KAI							
				B. Sistem Jaringan Transportasi Laut										
				Pembangunan dan pengembangan Pelabuhan pengumpan lokal	Kecamatan Wanasalam, Kecamatan Bayah	APBN, APBD Prov	Kementerian/Lembaga, Pemprov							
				Pengembangan dan peningkatan sarana dan prasarana terminal khusus	Kecamatan Bayah	Swasta	Swasta							
				Pengembangan dan peningkatan pelabuhan PPI menjadi PPP	Kecamatan Wanasalam	APBN, APBD Prov	Kementerian/Lembaga, Pemprov							
				Pembangunan Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)	Kecamatan Cilograng	APBN, APBD Prov	Kementerian/Lembaga, Pemprov							
			2.2	Perwujudan Sistem Jaringan Energi	Peningkatan pasokan daya listrik yang bersumber dari PLN Ranting Kecamatan Rangkasbitung secara bertahap hingga menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Lebak	Kecamatan Rangkasbitung	APBN, BUMN	Kementerian/Lembaga & PLN							
					Pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA)	Kecamatan Rangkasbitung	APBD Prov, APBN, BUMN, & Swasta	Kementerian/Lembaga, Pem Prov, PLN, Swasta							

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana						
						PJM-1		PJM-2				
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Mikro Hidro (PLTMH)	Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cigemblong, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Sobang.	APBD Prov, APBN, BUMN, & Swasta	Kementerian/Lembaga, Pem Prov, PLN, Swasta							
		Pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB)	Kecamatan Bayah, Kecamatan Cihara, Kecamatan Malingping, Kecamatan Wanasalam	APBD Prov, APBN, BUMN, & Swasta	Kementerian/Lembaga, Pem Prov, PLN, Swasta							
		Pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berupa Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP)	Kecamatan Sobang	APBD Prov, APBN, BUMN, & Swasta	Kementerian/Lembaga, Pem Prov, PLN, Swasta							
		Pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan berupa Pembangkit tenaga lainnya	Kecamatan Panggarangan	APBD Prov, APBN, BUMN, & Swasta	Kementerian/Lembaga, Pem Prov, PLN, Swasta							
		Pembangunan dan pengembangan infrastruktur ketenagalistrikan dan sarana pendukung	Seluruh Kecamatan	APBD Prov, APBN, BUMN, & Swasta	Kementerian/Lembaga, Pem Prov, PLN, Swasta							
		Peningkatan kapasitas pembangkit listrik eksisiting	Seluruh Kecamatan	APBN, BUMN	Kementerian/Lembaga & PLN							
		Peningkatan kapasitas dan pelayanan Gardu Listrik	Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Cijaku, dan Kecamatan Bayah	APBN, BUMN	Kementerian/Lembaga & PLN							
		Pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik berupa SUTET	Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Maja	APBN, BUMN	Kementerian/Lembaga & PLN							
		Pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik berupa SUTT	Kecamatan Cijaku, Kecamatan Malingping, Kecamatan Cihara, Kecamatan Panggarangan,	APBN, BUMN	Kementerian/Lembaga & PLN							

No	Program Utama			Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana						
								PJM-1		PJM-2				
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					Kecamatan Bayah, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Cikulur, Kecamatan Cibadak, Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Maja, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Curugbitung, Kecamatan Sajira, dan Kecamatan Gunungkencana									
				Pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik berupa SUTM	Seluruh Kecamatan	APBN, BUMN	Kementerian/Lembaga & PLN							
				Pengembangan dan pemeliharaan jaringan listrik berupa SUTR	Seluruh Kecamatan	APBN, BUMN	Kementerian/Lembaga & PLN							
		2.3	Perwujudan Sistem Jaringan Telekomunikasi	Pembangunan infrastruktur jaringan telekomunikasi	Seluruh Kecamatan	APBD Kab, BUMN & Swasta	PemKab (Dinas Kominfo), BUMN & Swasta							
				penataan dan pengaturan menara *base transceiver station* (BTS)		APBD Kab & BUMN	PemKab (Dinas Kominfo) & BUMN							
				Pembangunan dan pengembangan menara *base transceiver station* (BTS)		BUMN & Swasta	BUMN & Swasta							
				Pengembangan fasilitas internet gratis pada fasilitas publik		BUMN & Swasta	BUMN & Swasta							
				Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan menara *base transceiver station* (BTS)		APBD Kab, BUMN & Swasta	PemKab (Dinas Kominfo), BUMN & Swasta							
				Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan tetap	Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibadak, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cihara,	BUMN & Swasta	BUMN & Swasta							

No	Program Utama		Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana						
							PJM-1		PJM-2				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Kecamatan Cikulur, Kecamatan Cileles, Kecamatan Cijaku, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Curugbitung, Kecamatan Gunungkencana, Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Lebakgedong, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Malingping, Kecamatan Maja, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Sajira, Kecamatan Sobang, Kecamatan Wanasalam, Kecamatan Warunggunung									
		2.4	Perwujudan Sistem Jaringan Sumber Daya Air	Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan irigasi primer	Seluruh Kecamatan	APBD Prov/Kab	Pemprov, Pemkab						
				Pembangunan, pengembangan, dan pemeliharaan jaringan irigasi sekunder	Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibadak, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cihara, Kecamatan Cikulur, Kecamatan Cileles Kecamatan Cilograng, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Cirinten, Kecamatan Gunungkencana, Kecamatan Kalanganyar,	APBD Prov/Kab	Pemprov, Pemkab							

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana						
						PJM-1		PJM-2				
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Kecamatan Lebakgedong, Kecamatan Malingping, Kecamatan Muncang, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Sajira, Kecamatan Sobang, Kecamatan Warunggunung									
		Pengembangan dan pemeliharaan bangunan pengendalian banjir	Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cikulur, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Cijaku, Kecamatan Curugbitung, Kecamatan Gunungkencana, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Maja, Kecamatan Malingping, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Sajira, Kecamatan Wanasalam, Kecamatan Warunggunung	APBN, APBD Prov/Kab, BUMN, & Swasta	Kementerian/Lembaga, Pemprov, Pemkab, BUMN & Swasta							
		Pengembangan, peningkatan dan pemeliharaan bangunan sumber daya air	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov/Kab, BUMN, & Swasta	Kementerian/Lembaga, Pemprov, Pemkab, BUMN & Swasta							
		Kajian Pembangunan Bendungan Leuwi Kopo	Kecamatan Gunungkencana	APBN, APBD Prov, BUMN & Swasta	Kementerian/Lembaga, Pemprov, BUMN & Swasta							
		Kajian Pembangunan Bendungan Cilawang	Kecamatan Curugbitung									
		Pengelolaan jaringan sumber daya air lintas provinsi	WS Cidanau – Ciujung – Cidurian	APBD Prov	Pemprov							

No	Program Utama			Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana						
								PJM-1		PJM-2				
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					WS Cibaliung – Cisawarna WS Ciliman – Cibungur									
				Pengelolaan DAS lintas Kabupaten	DAS Ciujung DAS Cidurian DAS Cimandiri DAS Cimadur DAS Cisiih DAS Kecamatan Cihara DAS Cibaliung DAS Cisawarna DAS Cipager DAS CIbareno DAS Cilangkahan DAS Cibungur DAS Ciliman	APBN, APBD Prov	Kementerian/Lembaga, Pemprov							
				Pengelolaan dan pengembangan Cekungan Air Tanah (CAT)	Seluruh Kecamatan	APBD Prov	Pemprov							
		2.5	Perwujudan Pengembangan Prasarana Wilayah Lainnya	**A. Sistem Peyediaan Air Minum**										
				Pengembangan jaringan air baku	Kecamatan Cibadak, Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Warunggunung, Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Maja, Kecamatan Sajira, Kecamatan Curugbitung	APBD Kab, APBD Prov, APBN, BUMN, BUMD Swasta	Kementerian/Lembaga, Pemprov, Pemkab, PDAM, Swasta							
				Pengembangan unit air baku	Kecamatan Rangkasbitung									
				Pengembangan unit produksi	Kecamatan Maja, Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibadak, Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Sajira, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Lebakgedong, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Muncang,	APBD Kab, BUMD, BUMN	Pemkab, PDAM, BUMN							

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana						
						PJM-1		PJM-2				
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Kecamatan Wanasalam, Kecamatan Cijaku									
		Pengembangan unit distribusi	Kecamatan Cibadak, Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Rangkasbitung	APBD Kab, BUMD, BUMN	Pemkab, PDAM, BUMN							
		Pengembangan sumur pompa	Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Cikulur, Kecamatan Wanasalam	APBN, APBD Kab	Kementerian/Lembaga, Pemkab							
		Pengembangan bak penampung air hujan	Kecamatan Lebakgedong, Kecamatan Bayah, Cigemblong, Kecamatan Leuwidamar	APBN, APBD Kab	Kementerian/Lembaga, Pemkab							
		Pengembangan Sistem Unit Produksi Air Minum yang Melayani Kawasan Perkotaan Jabodetabek-Punjur meliputi SPAM Regional Karian	Kecamatan Cibadak, Curungbitung, Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Maja, Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Sajira, dan Kecamatan Warunggunung	APBN, BUMN, & Swasta	Kementerian/Lembaga, Swasta							
		Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas sistem penyediaan air minum	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Kab, APBD Prov, BUMD dan Swasta	Kementerian/Lembaga, Pemprov, Pemkab, PDAM, & Swasta							
		B. Sistem Pengelolaan Air Limbah										
		Pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah non domestik	Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Cileles, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Bayah	APBD Kab dan Swasta	Pemkab (Dinas LH) & Swasta							
		Pengembangan infrastruktur sistem pengelolaan air limbah domestik	Kecamatan Cibadak, Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Cikulur, Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Maja, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Cipanas, Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian/Lembaga, Pemkab (Dinas LH)							

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana						
						PJM-1		PJM-2				
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Gunungkencana, Kecamatan Malingping Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Bayah									
		Pengembangan jaringan sistem pengelolaan air limbah domestik	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian/Lembaga, Pemkab (Dinas LH)							
		Pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas sistem pengelolaan air limbah	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, APBD Kab	Kementerian/Lembaga, Pemkab (Dinas LH)							
		Pengembangan Instalasi Pengolah Lumpur Tinja (IPLT)	Seluruh Kecamatan	APBD Kab dan Swasta	Pemkab (Dinas LH) & Swasta							
		C. Sistem Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)										
		Pengembangan sistem pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Kecamatan Rangkasbitung	APBD Kab	Pemkab (Dinas LH), Swasta							
		Pengembangan prasarana pengolahan limbah industri	Seluruh Kecamatan	APBD Kab, Swasta	Pemkab (Dinas LH), Swasta							
		Pengembangan prasarana pengolahan limbah medis	Seluruh Kecamatan	APBD Kab, Swasta	Pemkab (Dinas LH), Swasta							
		Pengembangan prasarana pengolahan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)	Seluruh Kecamatan	APBD Kab, Swasta	Pemkab (Dinas LH), Swasta							
		D. Pengelolaan Persampahan										
		Pembangunan dan pengembangan Tempat Penampungan Sementara (TPS)	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Pemkab (Dinas LH)							
		Pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)	Kecamatan Maja, Kecamatan Cihara, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Bayah, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Leuwidamar	APBD Kab	Pemkab (Dinas LH)							
		Pembangunan dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST)	Kecamatan Maja	APBD Prov/Kab	Pemprov, Pemkab (Dinas LH)							

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana						
						PJM-1		PJM-2				
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Kajian Pembangunan dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) Cilulumpang	Kecamatan Cileles	APBD Prov/Kab	Pemprov, Pemkab (Dinas LH)							
		Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas sistem jaringan persampahan	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Pemkab (Dinas LH)							
		Peningkatan peran serta masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan persampahan	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Pemkab (Dinas LH)							
		Pengembangan pengelolaan sampah *reduce, reuse, recycle*	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Pemkab (Dinas LH)							
		E. Jalur dan Ruang Evakuasi Bencana										
		Pengembangan jalur evakuasi bencana banjir tingkat tinggi	Kecamatan Maja, Kecamatan Curugbitung, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Gunungkencana, Kecamatan Wanasalam, Kecamatan Malingping, Kecamatan Cihara, Kecamatan Panggarangan.	APBD Kab	Pemkab (BPBD, Dinas PUPR)							
		Pengembangan jalur evakuasi bencana gempa bumi tingkat tinggi	Kecamatan Cibadak, Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Maja, Kecamatan Curugbitung, Kecamatan Muncang, Kecamatan Sajira, Kecamatan Bojongmanik, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Malingping, Kecamatan Cigemblong, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Bayah, Kecamatan Cirinten, dan Kecamatan Cilograng.	APBD Kab	Pemkab (BPBD, Dinas PUPR)							

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana						
						PJM-1		PJM-2				
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Pengembangan jalur evakuasi bencana longsor tingkat tinggi	Kecamatan Cibeber	APBD Kab	Pemkab (BPBD, Dinas PUPR)							
		Pengembangan jalur evakuasi bencana likuefaksi tingkat sedang dan tingkat tinggi	Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Cihara, Kecamatan Cibadak, Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Maja, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Malingping, Kecamatan Wanasalam.	APBD Kab	Pemkab (BPBD, Dinas PUPR)							
		Pengembangan jalur evakuasi bencana tsunami tingkat tinggi	Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Cihara, Kecamatan Malingping, Kecamatan Wanasalam.	APBD Kab	Pemkab (BPBD, Dinas PUPR)							
		Pengembangan tempat evakuasi bencana banjir tingkat tinggi	Kecamatan Maja, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Wanasalam, Kecamatan Malingping, Kecamatan Cihara, Kecamatan Panggarangan.	APBD Kab	Pemkab (BPBD, Dinas PUPR)							
		Pengembangan tempat evakuasi bencana gempa bumi tingkat tinggi	Kecamatan Cibadak, Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Muncang, Kecamatan Malingping, Kecamatan Cigemblong, Kecamatan Bayah, Kecamatan Cirinten, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Cibeber, dan Kecamatan Cilograng.	APBD Kab	Pemkab (BPBD, Dinas PUPR)							
		Pengembangan tempat ecakuasi bencana longsor tingkat tinggi	Kecamatan Cibeber	APBD Kab	Pemkab (BPBD, Dinas PUPR)							
		Pengembangan tempat evakuasi bencana likuefaksi tingkat sedang dan tingkat timggi	Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Cihara, Kecamatan Cibadak, Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Maja,	APBD Kab	Pemkab (BPBD, Dinas PUPR)							

No	Program Utama			Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana						
								PJM-1		PJM-2				
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
					Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Malingping, Kecamatan Wanasalam.									
				Pengembangan tempat evakuasi bencana tsunami tingkat tinggi	Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Cihara, Kecamatan Malingping, Kecamatan Wanasalam.	APBD Kab	Pemkab (BPBD, Dinas PUPR)							
				Pengembangan sistem mitigasi bencana	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Pemkab (BPBD, Dinas PUPR)							
				Pengembangan sistem pengelolaan Kawasan rawan bencana	Seluruh Kecamatan	APBD Kab	Pemkab (BPBD, Dinas PUPR)							
				F. Sistem Drainase										
				Pengembangan dan pemelihraan jaringan drainase primer	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov, & APBD Kab	Kementerian/Lembaga, Pemprov & Pemkab (Dinas PUPR)							
				Pengembangan dan pemeliharaan jaringan drainase sekunder	Seluruh kecamatan	APBN, APBD Prov, & APBD Kab	Kementerian/Lembaga, Pemprov & Pemkab (Dinas PUPR)							
				Penyusunan Rencana Induk Drainase	Seluruh kecamatan	APBD Kab	Pemkab (Dinas PUPR)							
B	**PERWUJUDAN POLA RUANG**													
	Perwujudan Kawasan Lindung													
	1	1.1	Perwujudan Kawasan Badan Air	Operasional dan pemeliharaan badan air berupa sungai, danau, embung dan waduk	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov, dan APBD Kab	Kementerian/Lembaga, Pemprov, Pemkab (Dinas PUPR dan Dinas LH)							
				Pengembangan tanggul di badan air berupa sungai, danau, embung dan waduk										
				Pengelolaan hidrologi dan kualitas air pada badan air berupa sungai, danau, embung dan waduk										
				Pengendalian kegiatan budi daya di kawasan badan air berupa sungai, danau, embung dan waduk										

No	Program Utama		Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana						
							PJM-1		PJM-2				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1.2	Perwujudan Kawasan Perlindungan terhadap Kawasan Dibawahnya	Pengawasan dan pematauan dalam rangka mencegah penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Lindung	Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cijaku, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Gunungkencana, Kecamatan Malingping, Kecamatan Muncang, Kecamatan Sobang, dan Kecamatan Wanasalam.	APBN, APBD Prov, dan APBD Kab	Kementerian/Lembaga, Pemprov (Dinas LHK) & Pemkab (Dinas LH)							
			Rehabilitasi dan reklamasi Kawasan Hutan Lindung										
			Penetapan dan pengembangan kawasan resapan air										
			pelestarian, pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan adat sebagai cagar budaya										
			Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat sekitar Kawasan Hutan Lindung dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Lindung										
			Pengendalian kegiatan budidaya di Kawasan Hutan Lindung										
	1.3	Perwujudan kawasan konservasi	Rehabitiasi kawasan konservasi sebagai upaya pelestarian	Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cigemblong, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Lebakgedong, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Muncang, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Sajira, dan Kecamatan Sobang.	APBN & APBD Prov/Kab	Kementerian/Lembaga, Pemprov, Pemkab (Dinas LHK)							
			Pengawasan dan pemantauan Kawasan Taman Nasional										
			Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah										
			pelestarian, pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan adat sebagai cagar budaya										
			Pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan Taman Nasional										
			Sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat sekitar dalam upaya pelestarian Taman Nasional										

No	Program Utama		Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana						
							PJM-1		PJM-2				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	1.4	Perwujudan Kawasan Cagar budaya	Pelestarian, pengembangan, dan pengelolaan Kawasan Cagar Budaya	Kecamatan Bojongmanik, Kecamatan Cigemblong, Kecamatan Cirinten, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Muncang, dan Kecamatan Sobang.	APBN, APBD Prov, dan APBD Kab	Kementerian/Lembaga, Pemprov, dan Pemkab (Dinas LH)							
			Pengendalian dan Perlindungan Kawasan Cagar Budaya										
			Pengendalian kegiatan budi daya pada cagar budidaya agar tidak mengganggu fungsi utama kawasan cagar budidaya										
			Pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan dalam upaya pelestarian kawasan cagar budaya										
	Perwujudan Kawasan Budidaya												
	2	2.1	Pengembangan kawasan hutan produksi terbatas	Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Bayah, Kecamatan Bojongmanik, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cigemblong, Kecamatan Cihara, Kecamatan Cijaku, Kecamatan Cikulur, Kecamatan Cileles, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Cirinten, Kecamatan Gunungkencana Kecamatan Lebakgedong, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Malingping, Kecamatan Muncang, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Sajira, Kecamatan Sobang, Kecamatan Wanasalam.	APBN, APBD Prov, dan APBD Kab	Kementerian/Lembaga, Pemprov, dan Pemkab (Dinas LH)							
			Rehabilitasi dan reklamasi Kawasan Hutan Produksi Terbatas										
			Pengawasan dan pematauan dalam rangka mencegah penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Terbatas										
			Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah										
			Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Terbatas										
			Pengembangan hutan tanaman rakyat										
			Pengembangan budidaya wana tani sebagai lumbung ketahanan pangan dan rehabilitasi lahan										
			pelestarian, pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan adat sebagai cagar budaya										

No	Program Utama		Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana						
							PJM-1		PJM-2				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam										
			Pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan Hutan Produksi Terbatas agar tidak mengganggu fungsi utama kawasan										
		2.2	Rehabilitasi dan reklamasi Kawasan Hutan Produksi Tetap	Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cigemblong, Kecamatan Cijaku, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Cirinten, Kecamatan Curugbitung, Kecamatan Gunungkencana, Kecamatan Lebakgedong, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Wanasalam.	APBN, APBD Prov, dan APBD Kab	Kementerian/Lembaga, Pemprov, dan Pemkab (Dinas LH)							
			Pengawasan dan pemataуan dalam rangka mencegah penebangan liar dan kebakaran Kawasan Hutan Produksi Tetap										
			Pengembangan vegetasi tegakan tinggi yang mampu memberikan perlindungan terhadap permukaan tanah dan mampu meresapkan air ke dalam tanah										
			Pembinaan dan sosialisasi kepada masyarakat sekitar dalam upaya pelestarian Kawasan Hutan Produksi Tetap										
			Pengembangan hutan tanaman rakyat										
			Pengembangan budidaya wana tani sebagai lumbung ketahanan pangan dan rehabilitasi lahan										
			pelestarian, pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan adat sebagai cagar budaya										
			Pengembangan sistem tebang pilih, tebang gilir, dan rotasi tanaman yang mendukung keseimbangan alam										
			Pengendalian kegiatan budidaya pada kawasan Hutan Produksi										

No	Program Utama		Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana						
							PJM-1		PJM-2				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Tetap agar tidak mengganggu fungsi utama kawasan										
		2.3	Pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat	Pengembangan Kawasan Perkebunan Rakyat	Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Bayah, Kecamatan Bojongmanik, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cigemblong, Kecamatan Cihara, Kecamatan Cijaku, Kecamatan Cikulur, Kecamatan Cileles, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Cirinten, Kecamatan Curugbitung, Kecamatan Gunungkencana, Kecamatan Kalanganyar, Kecamatan Lebakgedong, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Maja, Kecamatan Malingping, Kecamatan Muncang, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Sajira, Kecamatan Sobang, Kecamatan Wanasalam, dan Kecamatan Warunggunung.	APBD Prov dan APBD Kab	Pemprov dan Pemkab (Dinas Pertanian, Dinas LHK)						
				Rehabilitasi Kawasan Perkebunan Rakyat yang rusak									
				Peningkatan produktivitas Kawasan Perkebunan Rakyat									
				pelestarian, pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan adat sebagai cagar budaya									
				Pengendalian dan pengawasan kegiatan budidaya di sekitar kawasan perkebunan rakyat									
				Sosilalisasi dan pembinaan masyarakat dalam rangka pengembangan kegiatan perkebunan									
		2.4	Pengembangan kawasan pertanian	Pengembangan kawasan pertanian Tanaman Pangan	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov & Kab, Swasta	Kementerian/Lembaga, Pemprov, Pemkab (Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas							
				Peningkatan produktivitas lahan tanaman pangan									

No	Program Utama	Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana						
						PJM-1		PJM-2				
						2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan pertanian			Peternakan, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas LHK), Swasta							
		Intensifikasi dan diversifikasi pertanian di kawasan tanaman pangan										
		Pengembangan dan optimalisasi sistem jaringan irigasi di kawasan tanaman pangan										
		Pengendalian kegiatan budidaya di sekitar kawasan tanaman pangan yang dapat mengurangi fungsi utama kawasan										
		Penyusunan kebijakan insentif dan disinsentif pada Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan										
		Pengembangan kawasan perkebunan										
		Pengembangan sarana dan prasarana pendukung kegiatan perkebunan										
		Pengembangan dan peningkatan produksi komoditi unggulan perkebunan										
		optimalisasi program penggunaan bibit unggul yang mendukung perkembangan perkebunan										
		pengembangan agroindustri dengan fungsi yang didasarkan pada potensi perkebunan.										
		Penataan dan pengendalian lokasi peternakan dan sentra produksi peternakan di kawasan pertanian										
		Pengembangan komoditas peternakan yang bernilai ekonomi tinggi di kawasan peternakan										

No	Program Utama		Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana						
							PJM-1		PJM-2				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			Intensifikasi budidaya peternakan di kawasan peternakan										
			Penetapan dan pengembangan LP2B dan LCP2B										
			Pengembangan agropolitan di kawasan petarnian										
			Penelitian dan pengembangan pertanian di kawasan pertanian										
		2.5	Pengembangan kawasan perikanan tangkap	Ekstensifikasi & intensifikasi perikanan di kawasan perikanan	Kecamatan Bayah, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Wanasalam.	APBN, APBD Prov & Kab	Kementerian/Lembaga, Pemprov, Pemkab (Dinas Perikanan)						
				Pengembangan prasarana dan sarana pendukung kawasan perikanan									
				Pengendalian kegiatan perikanan tangkap yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung									
			Pengembangan kawasan perikanan budi daya	Ekstensifikasi & intensifikasi perikanan di kawasan perikanan	Kecamatan Malingping, Kecamatan Wanasalam	APBN, APBD Prov & Kab	Kementerian/Lembaga, Pemprov, Pemkab (Dinas Perikanan)						
				Pengembangan komoditas perikanan unggulan di kawasan perikanan									
				Pengembangan sentra budidaya perikanan di kawasan perikanan									
				Pengembangan pengelolaan Balai Benih Ikan									
				Pengembangan prasarana dan sarana pendukung kawasan perikanan									
				Rehabilitasi kawasan perikanan budidaya untuk menjaga ekosistem sekitarnya									
				Pengendalian kegiatan perikanan budidaya yang berpotensi mengganggu kawasan berfungsi lindung									

No	Program Utama		Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana						
							PJM-1		PJM-2				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
		2.6 Pengembangan kawasan peruntukan industri	Penyusunan dokumen Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK)	Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Bayah, Kecamatan Bojongmanik, Kecamatan Cibadak, Kecamatan Cikulur, Kecamatan Cileles, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Curugbitung, Kecamatan Gunungkencana, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Maja, Kecamatan Rangkasbitung, dan Kecamatan Warunggunung.	APBN, APBD Prov & Kab dan swasta	Kementerian/Lembaga, Pemprov, Pemkab (Dinas Perindag dan Dinas PUPR), Swasta							
			Penyusunan dokumen studi kelayakan Kawasan Industri										
			Penyusunan dokumen Master Plan Kawasan Industri										
			Penyusunan dokumen Amdal Kawasan Industri										
			Pengembangan kawasan peruntukan industri yang berkelanjutan										
			Pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di kawasan peruntukan industri										
			Pengembangan kawasan industri										
			Pengawasan dan pemantauan kegiatan indutri untuk mencegah timbulnya dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya										
			Pengembangan dan penataan kawasan – kawasan industri berupa sentra industri kecil dan menengah										
			Monitoring dan Evaluasi Rencana Induk Pengembangan Industri Kabupaten (RPIK)										
		2.7 Perwujudan Kawasan Pariwisata	monitoring dan evaluasi pelaksanaan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah (RIPPDA)	Kecamatan Bayah, Kecamatan Cibeber, Kecamatan Cihara, Kecamatan Cijaku, Kecamatan Cilograng, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Gunungkencana, Kecamatan Lebakgedong, Kecamatan Leuwidamar,	APBN, APBD Prov & Kab, dan swasta	Kementerian/Lembaga, Pemprov, Pemkab (Dinas Perindag dan Dinas PUPR), Swasta							
			penataan dan pengendalian pembangunan kawasan obyek wisata alam, wisata buatan, dan wisata budaya										
			pengembangan sumber daya pariwisata dan ekonomi kreatif di lokasi pariwisata										

No	Program Utama		Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana						
							PJM-1		PJM-2				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
			peningkatan kualitas objek wisata	Kecamatan Malingping, Kecamatan Muncang, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Sajira, Kecamatan Sobang, Kecamatan Wanasalam.									
			pengelolaan lokasi pariwisata yang berkelanjutan										
			pengembangan pemasaran dan promosi kawasan wisata dalam rangka memperluas pangsa pasar wisata										
			pengembangan dan peningkatan prasarana, sarana, dan utilitas di lokasi pariwisata										
			pembinaan dan pemberdayaan masyarakat sekitar obyek wisata sebagai upaya pengembangan pariwisata										
		2.8	Perwujudan kawasan permukiman	Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Kawasan Permukiman	Seluruh Kecamatan	APBN, APBD Prov & Kab, BUMN dan swasta	Kementerian/Lembaga, Pemprov, Pemkab (Bapelitbangda, Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas LHK), BUMN, & Swasta						
				Pengembangan dan penataan kawasan permukiman perkotaan dan perdesaan									
				Pencadangan lahan untuk permukiman									
				Pengembangan dan peningkatan prasarana dan sarana lingkungan pendukung perumahan									
				Pengembangan Ruang Terbuka Hijau paling sedikit 30% dari luas permukiman									
				Penataan dan rehabiltasi kawasan permukiman kumuh									
				pelestarian, pengembangan dan pengelolaan kawasan hutan adat sebagai cagar budaya									
				Pengendalian dan penataan kawasan permukiman di daerah sempadan sungai dan pantai									

No	Program Utama			Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana						
								PJM-1		PJM-2				
								2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
				Monitoring dan Evaluasi Rencana Induk Pengembangan Kawasan Permukiman										
		2.9	Perwujudan Kawasan Pertahanan dan Keamanan	Penetapan batas atau deliniasi kawasan pertahanan dan keamanan	Kecamatan Cipanas, Kecamatan Rangkasbitung, Kecamatan Maja, Kecamatan Sajira, Kecamatan Leuwidamar, Kecamatan Cimarga, Kecamatan Muncang, Kecamatan Bojongmanik, Kecamatan Gunungkencana, Kecamatan Cileles, Kecamatan Banjarsari, Kecamatan Malingping, Kecamatan Panggarangan, Kecamatan Bayah, Kecamatan Warunggunung	APBN	Kementerian/Lembaga, TNI, Polri							
				Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan pertahanan dan keamanan										
C	**PERWUJUDAN KAWASAN STRATEGIS KABUPATEN**													
	1		Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Ekonomi	Penyusunan rencana pengembangan Kawasan Agrowisata sekitar Bendungan Karian	Kecamatan Banjarsari Kecamatan Cibadak Kecamatan Cikulur Kecamatan Cileles Kecamatan Cimarga Kecamatan Curugbitung Kecamatan Kalanganyar Kecamatan Maja Kecamatan Rangkasbitung Kecamatan Sajira Kecamatan Warunggunung	APBD Kab, BUMN, BUMD & Swasta	Pemkab (Bapelitbangda, Dinas PUPR, Dinas Pertanian, Dinas Perindag, Dinas Pariwisata, BUMN, BUMD & Swasta)							
				Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas perkotaan Kawasan Kota Baru Kecamatan Maja										
				Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas koridor Kecamatan Rangkasbitung – Kecamatan Cibadak, Citeras, Kecamatan Warunggunung – Kecamatan Cikulur - Kecamatan Cileles										

No	Program Utama		Kegiatan	Lokasi	Sumber Dana	Instansi Pelaksana	Waktu Pelaksana						
							PJM-1		PJM-2				
							2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029
	2	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Sosial Budaya	Rehabilitasi dan revitalisasi kawasan adat baduy	Kawasan Masyarakat Adat Baduy dan Kawasan Kaolotan Banten Kidul (Kecamatan Bojongmanik Kecamatan Cibeber Kecamatan Cigemblong Kecamatan Leuwidamar Kecamatan Muncang Kecamatan Sobang)	APBD Kab	Pemkab (Bapelitbangda, Dinas Pariwisata, Dinas PUPR, Dinas LH)							
			Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan adat baduy										
			Rehabiltasi dan revitalisasi kawasan kaolotan banten kidul										
			Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas kawasan kaolotan banten kidul										
	3	Perwujudan Kawasan Strategis Kabupaten dari Sudut Kepentingan Pendayagunaan Sumber daya Alam dan Teknologi Tinggi	Pengembangan prasarana, sarana, dan utilitas Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Gunung Endut	Kawasan pembangkit listrik tenaga panas bumi Gunung Endut (Kecamatan Sobang)	APBN, BUMN, APBD Kab	Kementerian/Lembaga, APBD Kab, BUMN							
			Penataan kawasan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi Gunung Endut										
	4	Program perwujudan kwasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup	Rehabilitasi kawasan hutan pada sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak	Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (Kecamatan Bayah Kecamatan Cibeber Kecamatan Cigemblong Kecamatan Cipanas Kecamatan Lebakgedong Kecamatan Leuwidamar Kecamatan Muncang Kecamatan Panggarangan Kecamatan Sajira Kecamatan Sobang)	APBN, APBD Prov & Kab	Kementerian/Lembaga, Pemprov, Pemkab							
			Pengendalian dan pengawasan sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun-Salak										

BUPATI LEBAK

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN XVI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN

U

SKALA : 1:153.000

0 4 8 16 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai

Rencana Pola Ruang
Kawasan Budi Daya
Kawasan Pertanian
- Kawasan Tanaman Pangan

Kawasan Ketentuan Khusus
- Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Dasar dan Peta Tematik telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
2. Citra Satelit Spot 6, Perekaman Tahun 2017 Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
3. Permendagri No.43 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
4. Permendagri No.55 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
5. Permendagri No.57 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
6. Permendagri No.47 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tanggerang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
7. Permendagri No.4 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
8. Keputusan Menteri LHK No.6607/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Banten Sampai dengan Tahun 2020
9. SK.6744/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 Tentang MHA Kasepuhan Karang
10. SK.1548/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/2/2019 Tentang MHA Kasepuhan Cirompang
11. SK.1547/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/2/2019 Tentang MHA 12. Kasepuhan Pasir Eurih
13. SK.6164/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/7/2019 Tentang MHA Kasepuhan Citorek
14. SK.10247/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2019 Tentang MHA Kasepuhan Cibarani
15. SK.10084/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2022 Tentang MHA Kasepuhan Ciusingsang
16. Kepmen ATR/Ka BPN No. 215/Kep-7.1/IX/2015 Tentang Penegasan dan Pengakuan Hak Milik Komunal Atas Nama Masyarakat Baduy Atas Tanah di Kabupaten Lebak
17. Hasil Analisis 2018 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI LEBAK

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN XVII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RAWAN BENCANA

U

SKALA : 1:153.000

0 4 8 16 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai

Rencana Pola Ruang

Kawasan Lindung
Badan Air
- BA Badan Air

Kawasan Cagar Budaya
- CB Kawasan Cagar Budaya

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- HL Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Konservasi
- TN Taman Nasional

Kawasan Budi Daya
Kawasan Hutan Produksi
- HPT Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HP Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan Pemukiman
- PK Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Perikanan
- PK1 Kawasan Perikanan Tangkap
- PK2 Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Perkebunan Rakyat
- KR Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan Pertanian
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 Kawasan Perkebunan
- P-3 Kawasan Peternakan

Kawasan Peruntukan Industri
- IN Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Ketentuan Khusus

Kawasan Rawan Bencana
- Rawan Banjir Tingkat Tinggi
- Rawan Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Likuefaksi Tingkat Sedang
- Rawan Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Likuefaksi Tingkat Sedang, Rawan Tsunami Tingkat Tinggi
- Rawan Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Likuefaksi Tingkat Tinggi, Rawan Tsunami Tingkat Tinggi
- Rawan Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Tsunami Tingkat Tinggi
- Rawan Gempa Bumi Tingkat Tinggi
- Rawan Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Banjir Tingkat Tinggi
- Rawan Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Likuefaksi Tingkat Sedang
- Rawan Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Banjir Tingkat Tinggi, Rawan Tsunami Tingkat Tinggi
- Rawan Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Likuefaksi Tingkat Sedang, Rawan Tsunami Kelas Tinggi
- Rawan Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Likuefaksi Tingkat Sedang
- Rawan Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Longsor Tingkat Tinggi
- Rawan Gempa Bumi Tingkat Tinggi, Rawan Tsunami Tingkat Tinggi
- Rawan Likuefaksi Tingkat Sedang
- Rawan Likuefaksi Tingkat Sedang, Rawan Tsunami Tingkat Tinggi
- Rawan Likuefaksi Tingkat Tinggi, Rawan Tsunami Tingkat Tinggi
- Rawan Longsor Tingkat Tinggi
- Rawan Tsunami Tingkat Tinggi

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Dasar dan Peta Tematik telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
2. Citra Satelit Spot 6, Perekaman Tahun 2017. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
3. Permendagri No.43 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
4. Permendagri No.55 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
5. Permendagri No.57 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
6. Permendagri No.47 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tanggerang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
7. Permendagri No.4 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
8. Keputusan Menteri LHK No.6607/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Banten Sampai dengan Tahun 2020
9. SK.6744/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 Tentang MHA Kasepuhan Karang
10. SK.1548/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/2/2019 Tentang MHA Kasepuhan Cirompang
11. SK.1547/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/2/2019 Tentang MHA 12. Kasepuhan Pasir Eurih
13. SK.6164/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/7/2019 Tentang MHA Kasepuhan Citorek
14. SK.10247/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2019 Tentang MHA Kasepuhan Cibarani
15. SK.10084/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2022 Tentang MHA Kasepuhan Cisungsang
16. Kepmen ATR/Ka BPN No. 215/Kep-7.1/IX/2015 Tentang Penegasan dan Pengakuan Hak Milik Komunal Atas Nama Masyarakat Baduy Atas Tanah di Kabupaten Lebak
17. Hasil Analisis 2018 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI LEBAK

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

595000 mT
610000
625000
640000
655000
670000
9305000 mU
9290000
9275000
9260000
9245000
9230000 mU
106°0'0" BT
106°15'0"
106°30'0" BT
6°30'0" LS
6°45'0"
7°0'0" LS

KAB. SERANG
KAB. TANGERANG
KAB. PANDEGLANG
KAB. LEBAK
PROV. BANTEN
PROV. JAWA BARAT

Kec. Warunggunung
Kec. Cibadak
Kec. Rangkasbitung
Kec. Kalanganyar
Kec. Cikulur
Kec. Maja
Kec. Cimarga
Kec. Curugbitung
Kec. Sajira
Kec. Cileles
Kec. Muncang
Kec. Leuwidamar
Kec. Cipanas
Kec. Gunungkencana
Kec. Banjarsari
Kec. Bojongmanik
Kec. Cirinten
Kec. Lebakgedong
Kec. Sobang
Kec. Cijaku
Kec. Cigemblong
Kec. Cibeber
Kec. Wanasalam
Kec. Malingping
Kec. Panggarangan
Kec. Cihara
Kec. Bayah
Kec. Cilograng

S A M U D R A H I N D I A

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN RESAPAN AIR

U
SKALA : 1:153.000
0 4 8 16 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai

Rencana Pola Ruang

Kawasan Lindung
Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Konservasi
- Taman Nasional

Kawasan Budidaya
Kawasan Hutan Produksi
- Kawasan Hutan Produksi Terbatas

Kawasan Pemukiman
- Kawasan Permukiman Perkotaan

Kawasan Perkebunan Rakyat
- Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan Pertanian
- Kawasan Tanaman Pangan
- Kawasan Perkebunan

Kawasaan Ketentuan Khusus
- Kawasan Resapan Air

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Dasar dan Peta Tematik telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
2. Citra Satelit Spot 6, Perekaman Tahun 2017. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
3. Permendagri No.43 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
4. Permendagri No.55 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
5. Permendagri No.57 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
6. Permendagri No.47 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tanggerang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
7. Permendagri No.4 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
8. Keputusan Menteri LHK No.6607/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Banten Sampai dengan Tahun 2020
9. SK.6744/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 Tentang MHA Kasepuhan Karang
10. SK.1548/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/2/2019 Tentang MHA Kasepuhan Cirompang
11. SK.1547/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/2/2019 Tentang MHA 12. Kasepuhan Pasir Eurih
13. SK.6164/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/7/2019 Tentang MHA Kasepuhan Citorek
14. SK.10247/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2019 Tentang MHA Kasepuhan Cibarani
15. SK.10084/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2022 Tentang MHA Kasepuhan Cisungsang
16. Kepmen ATR/Ka BPN No. 215/Kep-7.1/IX/2015 Tentang Penegasan dan Pengakuan Hak Milik Komunal Atas Nama Masyarakat Baduy Atas Tanah di Kabupaten Lebak
17. Hasil Analisis 2018 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI LEBAK

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN XIX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN SEMPADAN

U

SKALA : 1:153.000

0 4 8 16 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai

Rencana Pola Ruang

Kawasan Lindung

Badan Air
- BA Badan Air

Kawasan Cagar Budaya
- CBD Kawasan Cagar Budaya

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- HL Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Konservasi
- TN Taman Nasional

Kawasan Budi Daya

Kawasan Hutan Produksi
- HPT Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HP Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan Pemukiman
- PK Kawasan Permukiman Perkotaan
- PD Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Perikanan
- PK-1 Kawasan Perikanan Tangkap
- PK-2 Kawasan Perikanan Budi Daya

Kawasan Perkebunan Rakyat
- KR Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan Pertanian
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 Kawasan Perkebunan
- P-4 Kawasan Peternakan

Kawasaan Ketentuan Khusus

Kawasan Sempadan
- Sempadan Pantai
- Sempadan Situ, Danau, Embung, dan Waduk
- Sempadan Sungai

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Dasar dan Peta Tematik telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
2. Citra Satelit Spot 6, Perekaman Tahun 2017. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
3. Permendagri No.43 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
4. Permendagri No.55 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
5. Permendagri No.57 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
6. Permendagri No.47 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tanggerang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
7. Permendagri No.4 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
8. Keputusan Menteri LHK No.6607/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Banten Sampai dengan Tahun 2020
9. SK.6744/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 Tentang MHA Kasepuhan Karang
10. SK.1548/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/2/2019 Tentang MHA Kasepuhan Cirompang
11. SK.1547/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/2/2019 Tentang MHA 12. Kasepuhan Pasir Eurih
12. SK.6164/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/7/2019 Tentang MHA Kasepuhan Citorek
13. SK.10247/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2019 Tentang MHA Kasepuhan Cibarani
14. SK.10084/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2022 Tentang MHA Kasepuhan Cisungsang
15. Kepmen ATR/Ka BPN No. 215/Kep-7.1/IX/2015 Tentang Penegasan dan Pengakuan Hak Milik Komunal Atas Nama Masyarakat Baduy Atas Tanah di Kabupaten Lebak
16. Hasil Analisis 2018 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI LEBAK

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN XX
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN CAGAR BUDAYA

U

SKALA : 1:153.000

0 4 8 16 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai

Rencana Pola Ruang

Kawasan Lindung

Badan Air
- BA Badan Air

Kawasan yang Memberikan Perlindungan terhadap Kawasan Bawahannya
- HL Kawasan Hutan Lindung

Kawasan Konservasi
- TN Taman Nasional

Kawasan Budi Daya

Kawasan Hutan Produksi
- HPT Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HP Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan Pemukiman
- PD Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Perkebunan Rakyat
- KR Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan Pertanian
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-2 Kawasan Perkebunan

Kawasan Ketentuan Khusus
- Kawasan Hutan Adat

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Dasar dan Peta Tematik telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
2. Citra Satelit Spot 6, Perekaman Tahun 2017. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
3. Permendagri No.43 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
4. Permendagri No.55 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
5. Permendagri No.57 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
6. Permendagri No.47 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tanggerang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
7. Permendagri No.4 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
8. Keputusan Menteri LHK No.6607/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Banten Sampai dengan Tahun 2020
9. SK.6744/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 Tentang MHA Kasepuhan Karang
10. SK.1548/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/2/2019 Tentang MHA Kasepuhan Cirompang
11. SK.1547/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/2/2019 Tentang MHA 12. Kasepuhan Pasir Eurih
13. SK.6164/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/7/2019 Tentang MHA Kasepuhan Citorek
14. SK.10247/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2019 Tentang MHA Kasepuhan Cibarani
15. SK.10084/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2022 Tentang MHA Kasepuhan Cisungsang
16. Kepmen ATR/Ka BPN No. 215/Kep-7.1/IX/2015 Tentang Penegasan dan Pengakuan Hak Milik Komunal Atas Nama Masyarakat Baduy Atas Tanah di Kabupaten Lebak
17. Hasil Analisis 2018 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI LEBAK

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
PROVINSI BANTEN

LAMPIRAN XXI
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LEBAK
NOMOR 7 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG KAWASAN PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

U

SKALA : 1:153.000

0 4 8 16 Km

Proyeksi	: Universal Transverse Mercator
Sistem Grid	: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 48 S
Datum Horizontal	: Datum WGS 1984
Datum Vertikal	: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Ibukota Pemerintahan
- Ibukota Kabupaten/Kota
- Ibukota Kecamatan

Batas Administrasi
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota

Perairan
- Garis Pantai

Rencana Pola Ruang

Badan Air
- BA Badan Air

Kawasan Budi Daya

Kawasan Hutan Produksi
- HPT Kawasan Hutan Produksi Terbatas
- HP Kawasan Hutan Produksi Tetap

Kawasan Peruntukan Industri
- PI Kawasan Peruntukan Industri

Kawasan Pemukiman
- PD Kawasan Permukiman Perdesaan

Kawasan Perkebunan Rakyat
- KR Kawasan Perkebunan Rakyat

Kawasan Pertanian
- P-1 Kawasan Tanaman Pangan
- P-3 Kawasan Perkebunan
- P-4 Kawasan Peternakan

Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara
- Kawasan Pertambangan Mineral dan Batubara

SUMBER DATA DAN RIWAYAT PETA:
1. Peta Dasar dan Peta Tematik telah terkoreksi Badan Informasi Geospasial (BIG) Tahun 2018
2. Citra Satelit Spot 6, Perekaman Tahun 2017. Lembaga Penerbangan Antariksa Nasional (LAPAN)
3. Permendagri No.43 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Serang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
4. Permendagri No.55 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Bogor dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
5. Permendagri No.57 Tahun 2012 Tentang Batas Daerah Kabupaten Sukabumi dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
6. Permendagri No.47 Tahun 2015 Tentang Batas Daerah Kabupaten Tanggerang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
7. Permendagri No.4 Tahun 2016 Tentang Batas Daerah Kabupaten Pandeglang dengan Kabupaten Lebak Provinsi Banten
8. Keputusan Menteri LHK No.6607/MENLHK-PKTL/KUH/PLA.2/10/2021 Tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi Banten Sampai dengan Tahun 2020
9. SK.6744/MENLHK-PSKL/KUM.1/12/2016 Tentang MHA Kasepuhan Karang
10. SK.1548/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/2/2019 Tentang MHA Kasepuhan Cirompang
11. SK.1547/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/2/2019 Tentang MHA 12. Kasepuhan Pasir Eurih
13. SK.6164/MENLHK-PSKL/PKTHA/KUM.1/7/2019 Tentang MHA Kasepuhan Citorek
14. SK.10247/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2019 Tentang MHA Kasepuhan Cibarani
15. SK.10084/MENLHK-PSKL/PKTHA/PSL.1/12/2022 Tentang MHA Kasepuhan Cisungsang
16. Kepmen ATR/Ka BPN No. 215/Kep-7.1/IX/2015 Tentang Penegasan dan Pengakuan Hak Milik Komunal Atas Nama Masyarakat Baduy Atas Tanah di Kabupaten Lebak
17. Hasil Analisis 2018 - 2023

Catatan:
Peta ini bukan referensi resmi mengenai garis-garis batas administrasi

Mengetahui,
BUPATI LEBAK

Cap/Ttd.

ITI OCTAVIA JAYABAYA